

## Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance

142

Penerapan Tata Kelola  
Perusahaan  
The Implementation of  
Corporate Governance

181

Manajemen Risiko  
Risk Management

186

Audit Internal  
Internal Audit

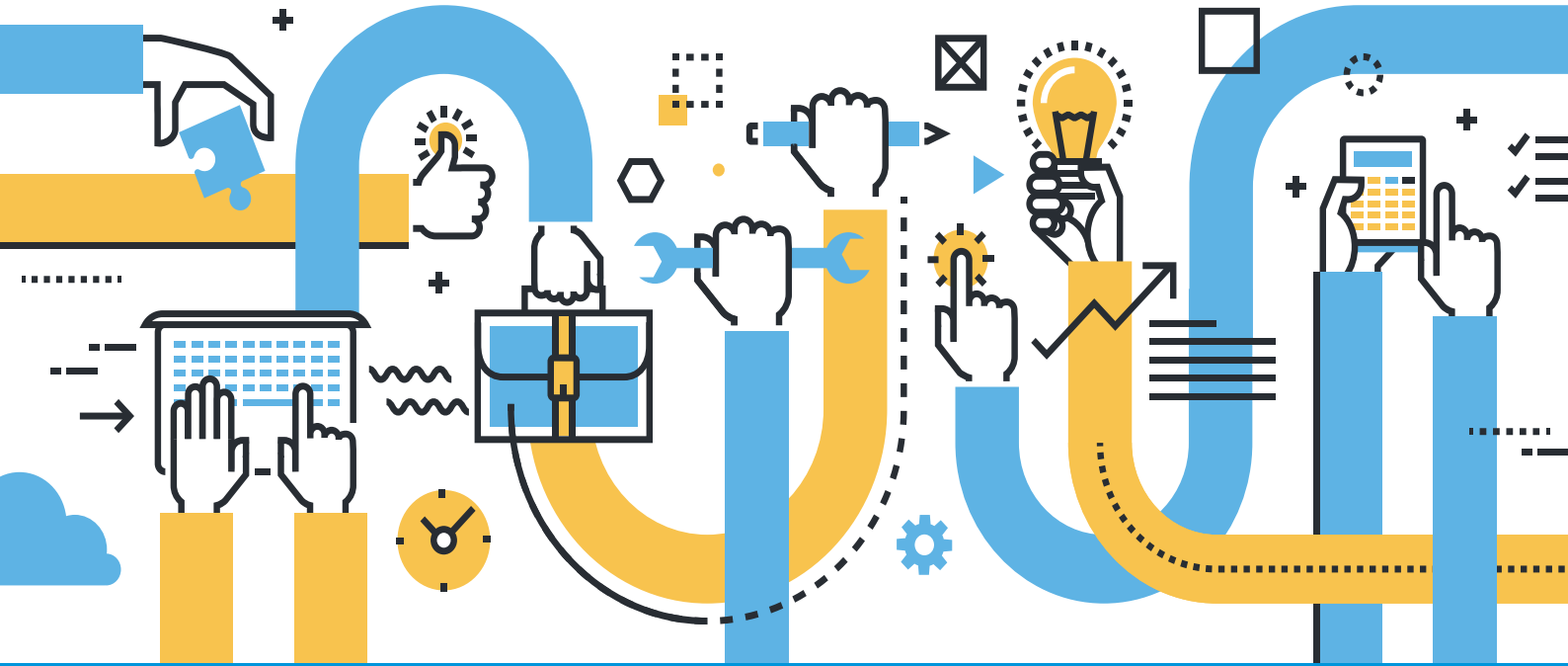
189

Corporate Affairs  
Corporate Affairs

# Ensuring

Perusahaan memandang praktik GCG sebagai struktur dan mekanisme yang berfungsi untuk mengatur pengelolaan perusahaan sehingga menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

The Company considers GCG practices as structure and mechanism to govern the management of the Company that generates sustainable economic benefits for all stakeholders.



# Transparency and Accountability

## Dasar Hukum

Dalam beberapa dekade terakhir, dunia bisnis meyakini bahwa dalam menciptakan sebuah pertumbuhan bisnis yang kuat dan berkelanjutan dibutuhkan sebuah keseimbangan, yaitu pertumbuhan secara kegiatan operasional, kegiatan finansial serta karakter dan etika bisnis yang berintegritas. Oleh karena itu, tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) berkembang menjadi sebuah praktik yang melandasi kinerja sebuah perusahaan, dan kemudian ditetapkan oleh pemerintah dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Penerapan praktik GCG Bakrieland mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. UU Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
2. Pedoman Umum GCG Indonesia Tahun 2006
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
4. Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahannya.

## Komitmen Bakrieland

Perusahaan memandang praktik GCG sebagai struktur dan mekanisme yang berfungsi untuk mengatur pengelolaan perusahaan sehingga menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Maka, penentuan dan penerapan nilai-nilai yang menjadi landasan dasar praktik GCG harus diimplementasikan secara tepat dan mendalam, sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud. Perusahaan berkomitmen

## Legal Foundation

During the past several decades, the business world has come to the realization that solid and sustainable business growth requires balance in operational activities and finances, as well as high standards of business ethics. In line with this, over the years, good corporate governance (GCG) has evolved into a business practice that underpins corporate performance, and has been codified by the government in applicable legislation.

Bakrieland complies with the following applicable GCG laws and regulations:

1. Indonesian Law No. 40/2007 on Limited Liability Companies
2. Indonesian GCG Code of 2006
3. Financial Services Authority (OJK) Regulation
4. Company Articles of Association and amendments.

## Bakrieland's Commitment

The Company considers GCG practices to be an effective management mechanism that generates sustainable economic benefits for all stakeholders. The values and principles that form the foundation of GCG practices must be appropriately and thoroughly applied to ensure the desired outcomes. The Company stands by its commitment to practice GCG in accordance with the methods laid out in existing laws and regulations, while implementing the



untuk menjalankan praktik GCG sesuai kaidah yang benar selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta menjunjung tinggi sikap transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, keadilan dan kewajaran.

Guna meningkatkan manfaat dan hasil dari penerapan praktik GCG, Perusahaan melengkapi diri dengan berbagai perangkat pendukung GCG. Selain visi, misi dan nilai-nilai Perusahaan yang telah ditetapkan pada awal berdirinya, Perusahaan memiliki Pedoman Perilaku, Sistem Pelaporan Pelanggaran, Panduan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan, Peraturan Perusahaan, Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi, serta berbagai Standar Prosedur Operasional. Seluruh struktur ini merupakan kesatuan sistem yang menunjang tercapainya keberhasilan penerapan praktik GCG di Bakrieland dan Anak Perusahaan.

## Prinsip-Prinsip Praktik GCG

Praktik GCG Perusahaan berlandaskan pada lima prinsip yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) serta *best practice* yang telah berkembang dari waktu ke waktu. Kelima prinsip tersebut dikenal dengan sebutan TARIF, yaitu Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Responsibilitas (Responsibility), Independensi (Independency) dan Keadilan serta Kewajaran (Fairness).

### Transparansi

Prinsip transparansi merupakan asas keterbukaan terhadap proses pengambilan keputusan, dan penyampaian informasi mengenai segala aspek perusahaan terutama yang berkaitan dengan kepentingan pemangku kepentingan dan publik secara benar dan tepat waktu. Perusahaan harus berinisiatif mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan. Dalam hal penyampaian informasi, Perusahaan berupaya untuk menyediakan akses seluas-luasnya bagi pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkannya mengenai Perusahaan.

principles of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness.

To gain additional benefit from implementing GCG, the Company has equipped itself with the necessary GCG supporting instruments. In addition to its corporate vision, mission and values, which we reset in place when the Company was established, the Company also has its own Code of Conduct, Whistleblowing System, Corporate Governance Implementation Guidelines, Corporate Regulations, Board Manuals for Commissioners and Directors, and various Standard Operating Procedures. These structures form a unified system that supports the effective implementation of GCG across the Bakrieland group.

## GCG Principles

The Company adheres to five core principles when implementing GCG, which were formulated by the National Committee on Governance Policy (KNKG), as well as best practices that have been developed over time. The five principles are also known as TARIF, an acronym for Transparency, Accountability, Responsibility, Independence and Fairness.

### Transparency

Transparency refers to the principle of openness in the decision-making processes, and the delivery of information on all aspects of the Company, primarily related to the stakeholders and public interest, in a truthful and timely manner. The Company must not only be proactive in disclosing matters required by the law, but also information required by the stakeholders to make decisions. In regard to disclosure, the Company is working to create the best possible means of access to any company information that may be required by its stakeholders.

**Penerapan**

Dalam menerapkan prinsip transparansi, Perusahaan mengutamakan asas keterbukaan dalam menjalankan bisnisnya dengan menyediakan informasi yang bersifat material dan relevan kepada pemangku kepentingan melalui akses informasi yang terjangkau dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan menyediakan informasi seluas-luasnya kepada publik dan pemegang saham, dengan tetap berpegang pada peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia. Secara periodik, Perusahaan menerbitkan laporan dalam dua Bahasa (Inggris dan Indonesia) untuk Laporan Keuangan Triwulan, Laporan Keuangan Semester, dan Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit, serta Laporan Tahunan. Publikasi informasi juga diberikan melalui paparan publik, media cetak dan elektronik, serta forum investor.

**Akuntabilitas**

Prinsip akuntabilitas menegaskan pada kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ Perusahaan sehingga kegiatan pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif dan efisien dan memberikan dampak yang diharapkan. Dampak yang dihasilkan dari penerapan sistem yang dijalankan harus mampu dipertanggungjawabkan (akuntabel) terpercaya dan dapat diandalkan.

**Penerapan**

Perusahaan menerapkan prinsip akuntabilitas melalui langkah-langkah pelaporan Direksi kepada Dewan Komisaris secara rutin mengenai rencana anggaran tahunan dan evaluasi bersama atas kinerja keuangan Perusahaan, penyampaian laporan keuangan pada RUPS Tahunan, pembentukan Audit Internal dan penunjukan auditor eksternal, serta pemberlakuan etika bisnis dan pedoman perilaku Perusahaan. Informasi keuangan Perusahaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik eksternal sebagai bentuk akuntabilitas dan keandalan informasi yang disajikan oleh Perusahaan.

**Responsibilitas**

Prinsip responsibilitas adalah wujud tanggung jawab Perusahaan dalam memenuhi kewajibannya untuk melaporkan kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan pengaturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan kewajibannya, Perusahaan turut menjaga ketertiban umum dan kesusilaan serta menyampaikan seluruh hasil kinerja terkait pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran perusahaan yang telah ditetapkan.

**Implementation**

The Company promotes business transparency by ensuring that all stakeholders have access to material and relevant information, which they can easily understand. The Company discloses information to both the public and shareholders in compliance with regulations issued by OJK and the Indonesia Stock Exchange. It periodically releases bilingual reports (English and Indonesian) including Quarterly and Mid-Term Financial Statements, audited Annual Financial Reports and Annual Reports. Information is also published in public exposes, print and electronic media, and investor forums.

**Accountability**

The principle of accountability emphasizes the need for well-defined functions, structures, systems and accountability of Company organs to ensure an effective and efficient management of the Company that generates an accurate and reliable impact.

**Implementation**

The Company ensures accountability through regular reports made by the Board of Directors to the Board of Commissioners pertaining to annual budget plans and joint evaluations of the Company's financial performance, delivery of financial reports at the Annual GMS, establishment of the Internal Audit unit and appointment of an external auditor, and applying business ethics and the Company's code of conduct. The Company's financial information is audited by an external Public Accounting Firm as a part of its commitment to accountability, including providing reliable information to stakeholders.

**Responsibility**

The Company is responsible for the fulfillment of its obligation to report about its compliance with existing laws and regulations. In fulfilling this duty, the Company also contributes to maintaining public order and morality, and delivers all outcomes related to the achievement of its corporate vision, mission, objectives and goals.

### **Penerapan**

Perusahaan berkomitmen untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan untuk menjaga kesinambungan bisnis Perusahaan. Perusahaan merealisasikan hal ini melalui penerbitan Laporan Tahunan setiap tahunnya, yaitu penyampaian hasil kinerja Perusahaan selama tahun buku yang disampaikan secara deskriptif dan dapat dipertanggungjawabkan, penerbitan buku Sustainability Report (SR) sebagai penyampaian hasil kinerja Perusahaan selama tahun buku atas kegiatan-kegiatan yang mampu memberikan dampak berkelanjutan, termasuk melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam berbagai bidang.

### **Independensi**

Prinsip independensi memastikan bahwa segala bentuk praktik GCG yang dilakukan oleh setiap organ tata kelola selalu mengedepankan prinsip profesionalitas dan objektivitas tanpa adanya intervensi dan tekanan dari pihak mana pun. Seluruh organ tata kelola harus berupaya maksimal dalam menghindari potensi terjadinya benturan kepentingan atau keberpihakan pada kepentingan tertentu.

### **Penerapan**

Perusahaan melakukan pengelolaan perusahaan secara independen, tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Masing-masing organ Perusahaan memiliki ruang lingkup pekerjaan dan tugas tanggung jawab tersendiri sehingga tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Sebagai contoh, Dewan Komisaris dan Direksi Bakrieland memiliki pendapat yang independen dalam setiap keputusan yang diambil, namun dimungkinkan untuk mendapatkan saran dari konsultan independen, hukum, sumber daya manusia dan komite-komite untuk menunjang kelancaran tugasnya. Selain itu, saat ini Dewan Komisaris Bakrieland beranggotakan 1 (satu) orang Komisaris Independen untuk menjamin independensi Dewan Komisaris dalam pengawasan Perusahaan.

### **Implementation**

The Company complies with the existing laws and regulations to achieve its goal of business sustainability, thus fulfilling its obligation to the public and the environment. This is achieved by issuing annual reports that provide a descriptive account of the Company's corporate performance during the fiscal year, as well as by publishing Sustainability Reports (SR) to highlight the outcomes of the Company's activities during the fiscal year that generate long-term business impact, including the implementation of CSR programs in various sectors.

### **Independence**

The principle of independence ensures that all forms of GCG practices implemented by each governance organ are conducted in a professional and objective manner, without any interference from an external party. All corporate governance organs must do their best to prevent possible conflicts of interest or partiality towards certain interests.

### **Implementation**

The Company manages the business in an independent manner, free from any conflicts of interest and interference or pressure from external parties. Each Company organ has its own scope of work, and set of duties and responsibilities, all equally important, that cannot be interfered with by any external party, as outlined by the existing laws and regulations, and the principles of a sound corporations. For example, Bakrieland's Board of Commissioners and Board of Directors may independently hold opinions on a decision, but the door remains open for advice or suggestions from an independent legal or human resource consultant and committees in order to support smooth implementation of duties. Furthermore, Bakrieland's Board of Commissioners currently has 1 (one) Independent Commissioner to guarantee the board's independence in overseeing the Company's operations.

## Keadilan/Kewajaran

Prinsip keadilan dan kewajaran memperlakukan setiap organ dengan setara tanpa mempertimbangkan latar belakang dan keragaman suku, ras atau agama. Prinsip ini merupakan wujud karakter bangsa Indonesia yang pluralisme dan dinamis. Prinsip ini berlaku pada penerapan sanksi dan penghargaan yang layak serta pantas, perlakuan terhadap individu secara objektif dan setara.

### Penerapan

Perusahaan menerapkan asas keadilan, kesetaraan dan kewajaran dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Perusahaan senantiasa menerapkan perlakuan yang setara kepada publik, otoritas pasar modal dan komunitas pasar modal. Secara internal, Perusahaan memastikan bahwa seluruh hak dan kewajiban karyawan terpenuhi dan terlaksana secara adil dan wajar. Peran aktif dan dukungan manajemen ditunjukkan melalui:

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite dan satuan kerja di bawah Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
- Penerapan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko.
- Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
- Perwujudan transparansi informasi, termasuk Laporan Keuangan Perusahaan
- Penerapan sosialisasi etika, nilai dan budaya perusahaan, serta tata kelola perusahaan dan pelaporan pelanggaran.
- Penerapan *review* GCG secara internal.

## Metode Penerapan GCG

Dalam mengimplementasikan praktik GCG sesuai dengan komitmen Perusahaan, dibutuhkan pedoman perilaku dan kode etik yang menjadi acuan bagi setiap anggota perusahaan dalam bersikap dan berperilaku. Dengan membudayakan nilai dan pedoman perilaku, maka setiap anggota perusahaan akan mampu merepresentasikan reputasi Perusahaan dan memberikan manfaat kinerja yang terbaik kepada seluruh pemangku kepentingan, baik internal dan eksternal. Perusahaan memiliki perangkat-perangkat dalam menerapkan praktik GCG, seperti:

1. Visi dan Misi Perusahaan
2. Tatanan Nilai
3. Roadmap GCG
4. Peraturan Perusahaan
5. Pedoman Perilaku dan Kode Etik
6. Panduan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan
7. Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi
8. Sistem Pelaporan Pelanggaran
9. Standard Operating Procedures (SOP)
10. Peraturan Perundangan yang berlaku di Indonesia

## Fairness

According to the principle of fairness, each employee is entitled to equal treatment, regardless of their gender, background, race, ethnicity or religion. This principle is a manifestation of the key characteristic of the Indonesian nation, namely that it embraces pluralism and diversity. It also applies to the imposition of sanctions or rewards, and the equal and impartial treatment of individuals.

### Implementation

The Company applies the principles of fairness and equality when upholding the rights of stakeholders that arise from agreements, and applicable laws and regulations. The Company at all times ensures equal treatment of the public, capital market authorities and the capital market community. Internally, the Company ensures that all employee rights and obligations are fulfilled and implemented in a fair and reasonable manner. The active role and support of the Company's management is demonstrated by the following:

- Fulfillment of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Directors.
- Fulfillment of the duties and responsibilities of the committees and units under the Board of Commissioners and/or Directors.
- Implementation of the compliance and risk management functions.
- Implementation of the Company Work and Budget Plan (RKAP).
- Disclosure of information, including the Company's Financial Reports.
- Dissemination of information about corporate ethics, values and culture, and corporate governance and the whistleblowing mechanism.
- Internal review of GCG.

## GCG Implementation Method

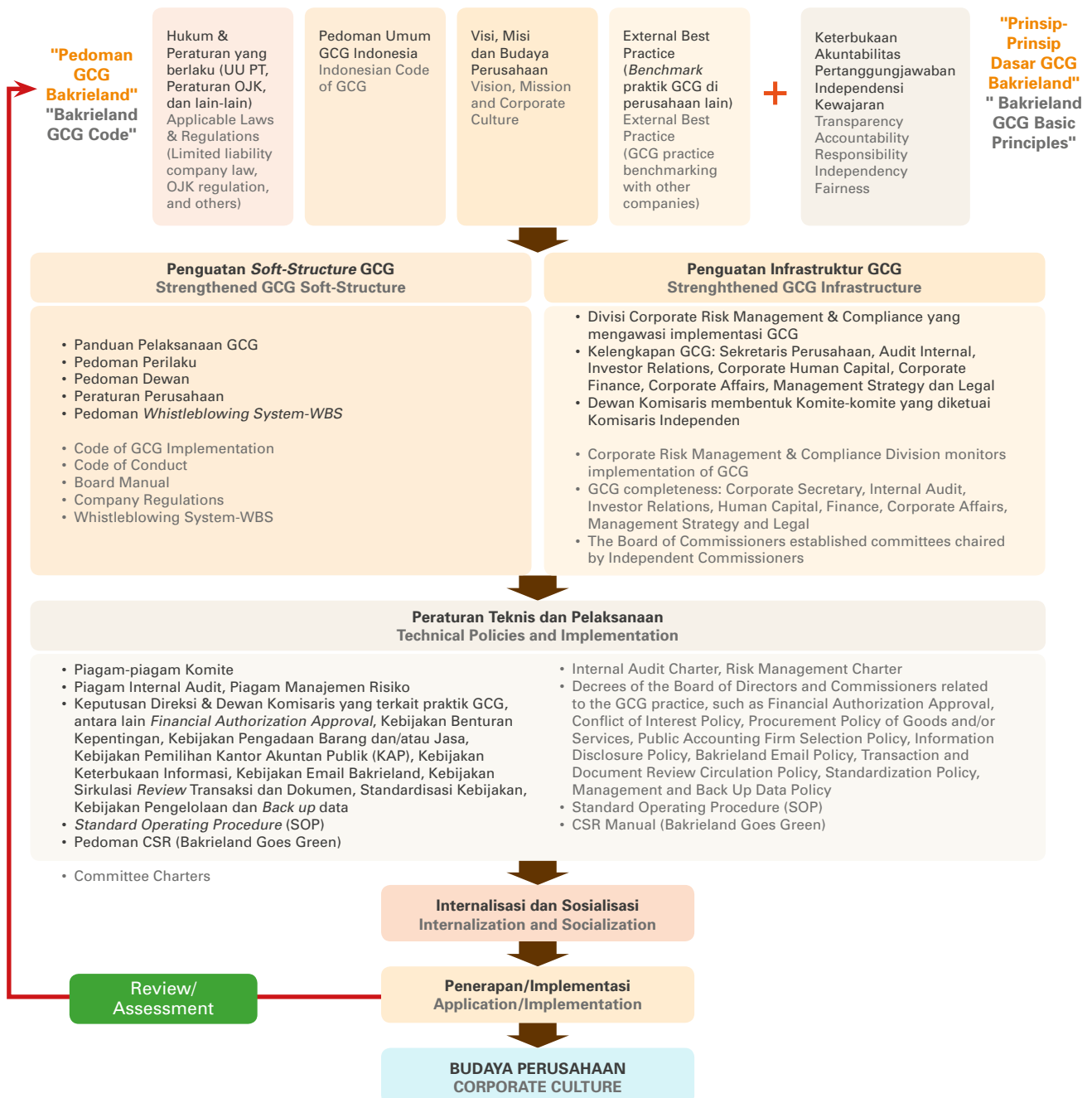
The Code of Conduct and the Code of Ethics are necessary to guide the conduct and behavior of every member of the Company, thus ensuring the fulfillment of the Company's commitment to the implementation of GCG. As representatives of the Company, all employees are expected to follow its values and codes, protect its reputation, and perform their duties to the best of their ability to benefit all internal and external stakeholders. The Company uses the following instruments to fulfill its commitment to GCG:

1. Corporate Vision and Mission
2. Corporate Values
3. GCG Roadmap
4. Company Regulations
5. Code of Conduct and Code of Ethics
6. Corporate Governance Implementation Guidelines
7. The Manual of the Board of Commissioners and Directors
8. Whistleblowing System
9. Standard Operating Procedures (SOP)
10. Existing Laws and Regulations in Indonesia

Dalam mengaplikasikan perangkat GCG tersebut, Perusahaan menggunakan pendekatan *top-down* sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, *best practice* dan nilai serta budaya Perusahaan. Unsur-unsur internal Perusahaan turut terlibat dalam penerapan GCG, dimulai dari tahap persiapan, internalisasi, implementasi dan evaluasi. Proses ini tergambar pada Bagan Proses Pencapaian Tujuan GCG Bakrieland, sebagai berikut:

In implementing the GCG instruments, the Company applies the top-down approach in accordance with the prevailing laws and regulations, best practices, and corporate values and culture. The Company's internal elements are also involved in implementing the principles of GCG, from the preparatory stage to internalization, implementation and evaluation. This is illustrated in the Diagram on the Process of Achieving Bakrieland's GCG Goals below:

### Bagan Proses Pencapaian Tujuan GCG di Bakrieland Diagram on the Achievement Process of GCG Objectives in Bakrieland





Perusahaan memiliki Panduan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang berfungsi sebagai landasan bagi Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi terkait proses penyusunan berbagai kebijakan yang mengatur alur kerja bisnis Perusahaan dengan mengutamakan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Panduan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Bakrieland mencakup berbagai aspek, antara lain kebijakan Tata Kelola Perusahaan, pedoman Tata Kelola bagi organ Perusahaan, prinsip-prinsip dan tujuan, struktur pengelolaan Perusahaan, serta kebijakan transparansi.

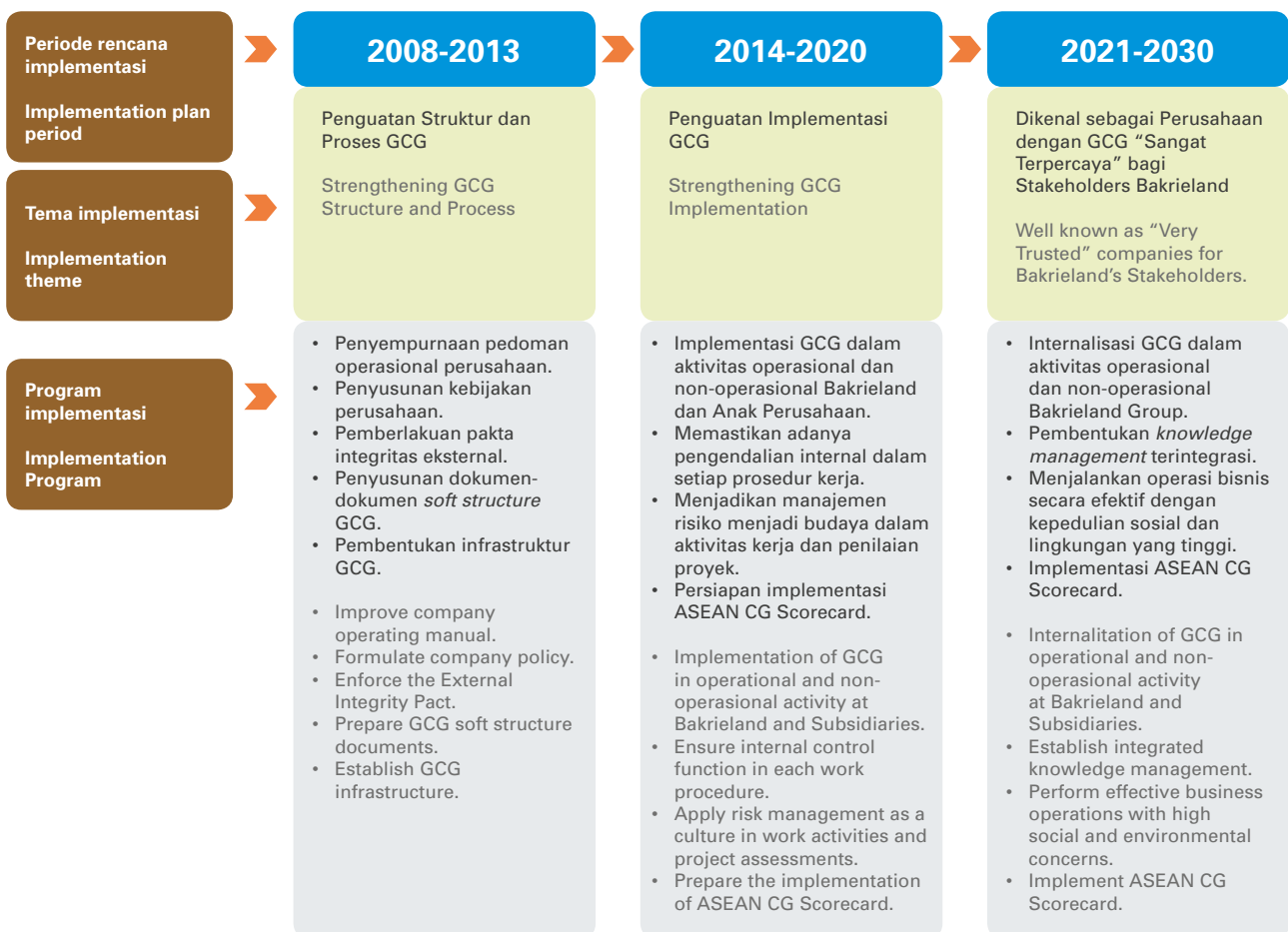
### Roadmap GCG

Roadmap GCG Bakrieland dirumuskan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan jangka panjang Perusahaan dan sebagai sarana untuk memantau perkembangan praktik GCG saat ini dan masa mendatang. Perusahaan telah merumuskan Roadmap GCG sejak 2008 dengan rencana implementasi yang terbagi dalam tiga periode, yaitu:

The Company's Corporate Governance Implementation Guidelines provide the necessary foundation for shareholders, the Board of Commissioners and the Board of Directors to implement the processes involved in formulating various policies that regulate Company business work flows in a way that complies with the prevailing legislation and ethical values. Bakrieland's Corporate Governance Implementation Guidelines cover various aspects, including the Corporate Governance Policy, Governance Guidelines for Company organs, principles and goals, and the Company's management structures and transparency policy.

### GCG Roadmap

Bakrieland's GCG Roadmap guides the implementation of the Company's long-term goals and the current and future GCG monitoring progress. The Company has been implementing the GCG Roadmap since 2008, and has an implementation plan that extends for three subsequent time frames:



Setiap periode Roadmap dilaksanakan sesuai dengan rencana program yang telah disusun. Manajemen melakukan peninjauan pencapaian implementasi GCG agar dapat mengevaluasi dan merumuskan penyempurnaan yang dibutuhkan. Rumusan Roadmap GCG Bakrieland selaras dengan "Big Bang Bakrieland 2020" agar tema

Each Road Map time frame is implemented in accordance with the program plan. The management is responsible for reviewing the extent to which GCG has been implemented in order to make any necessary improvements. Bakrieland's GCG Road Map was formulated in line with "Big Bang Bakrieland 2020" in order to ensure that the implemented

dan program yang dijalankan mampu mempercepat pencapaian visi Perusahaan dan meningkatkan pertumbuhan yang berkelanjutan.

## Peraturan Perusahaan

Peraturan Perusahaan memuat hak dan kewajiban karyawan yang berfungsi sebagai panduan dalam membina hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang dalam usaha meningkatkan efisiensi, produktivitas dan prestasi kerja yang optimal. Peraturan Perusahaan Bakrieland untuk periode tahun 2015-2017 telah disahkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.62/PHIJSK-PK/PP/I/2016 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Bakrieland Development Tbk.

## Pedoman Dewan

Pedoman Dewan mendeskripsikan rangkaian tahapan aktivitas secara bertahap, terstruktur, sistematis, dan mudah dipahami agar dapat dijalankan dengan konsisten. Pedoman Dewan berisi mengenai tata laksana kerja dan ketentuan-ketentuan yang menjadi rujukan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Pedoman Dewan disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan pemegang saham, serta praktik-praktik terbaik GCG. Pelaksanaan Pedoman Dewan merupakan salah satu bentuk komitmen Dewan Komisaris dan Direksi dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG, sekaligus sebagai penjabaran lebih lanjut dari Panduan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang telah dimiliki Bakrieland.

Pada 2016, Pedoman Dewan Bakrieland merujuk pada revisi kedua Pedoman Dewan (Board Manual) disahkan dengan Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris No. 001/KOM-DIR-Perusahaan/SK/I/2016, tentang Pengesahan Board Manual Revisi II, yang berlaku efektif tanggal 18 Januari 2016. Revisi dilakukan untuk menyesuaikan adanya peraturan OJK No. 033/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta adanya perubahan Anggaran Dasar PT Bakrieland Development Tbk. Revisi Pedoman Dewan mencakup pengaturan mengenai rangkap jabatan Dewan Komisaris dan Direksi, pengaturan mengenai rapat Dewan Komisaris dan Direksi, serta pengaturan mengenai Direktur Independen.

Tujuan penyusunan Pedoman Dewan adalah:

1. Menjadi pedoman atas tugas pokok, tanggung jawab dan fungsi kerja masing-masing organ Perusahaan.
2. Meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antar organ sehingga tercipta hubungan kerja yang *check and balance*.

programs are able to accelerate the fulfillment of the Company's vision and strengthen its sustainable growth.

## Company Regulations

Company regulations govern employee rights and obligations, and provide a guideon how to foster cooperativeand well-balanced work relationships in an effort to improve efficiency, productivity and work performance. Bakrieland's Company Regulations for 2015-2017 were approved by the Director General Decree of Industrial Relations and Employee Social Security No. KEP.62/PHIJSK-PK/PP/I/2016 regarding Ratification of the Company Regulations of PT Bakrieland Development Tbk.

## Board Manual

The Board Manual describes activity stages in a structured, systematic and easily understandable manner to ensure implementation consistency. The manual contains work procedures and conditions that the Boards of Commissioners and Directors should refer to in fulfilling their duties and responsibilities.

The Board Manual is prepared in accordance with the principles of corporate law, provisions ofthe Articles of Association, prevailing laws and regulations, directions from shareholders, and best GCG practices. The implementation of the manual demonstrates the commitment of the Boards of Commissioners and Directors to applying the principles of GCG, which further spells out Bakrieland's Corporate Governance Implementation Guidelines.

In 2016, Bakrieland's Board Manual referred to the second revision of the Board Manual approved bythe Directive of the Boards of Directors and Commissioners No. 001/KOM-DIR-PERSEROAN/SK/I/2016 regarding Ratification of the Second Revision of the Board Manual, which came into effect on 18 January, 2016. The revision was made in line with the issuance of OJK Regulation No. 033/POJK.04/2014 on the Boards of Directors and Commissioners of Issuers and Public Companies, and amendments to the Articles of Association of PT Bakrieland Development Tbk. The revised Board Manual regulates the concurrent positions and meetings of the Boards of Commissioners and Directors, and Independent Directors.

The Board Manual has been developed for the following purposes:

1. To provide guidance about the key duties, responsibilities and functions of each Company organ.
2. To improve the quality and effectiveness of work relationships among organs through a system of checks and balances.

3. Memperjelas ruang lingkup, tugas serta tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi maupun hubungan kerja diantara keduanya.
4. Memudahkan Dewan Komisaris dan Direksi untuk memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing.
5. Sebagai penerapan asas-asas GCG yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

## Etika Perusahaan

Etika Perusahaan dituangkan dalam Pedoman Perilaku Bakrieland. Pelaksanaan Etika Perusahaan yang berkesinambungan diharapkan dapat membentuk suatu budaya yang mengandung nilai-nilai Perusahaan. Perwujudan kode etik bersifat universal dan berlaku di seluruh level organisasi tanpa terkecuali.

## Pedoman Perilaku dan Kode Etik Pengesahan dan Sosialisasi

Pedoman Perilaku Bakrieland disahkan melalui SK Direksi No. 047/SK-Dir/IV/07. Seluruh manajemen dan karyawan Bakrieland wajib memahami dan menerapkan Pedoman Perilaku sebagai dasar penerapan perilaku yang mengatur hubungan antara karyawan dan Perusahaan, sesama karyawan, konsumen, pemasok, pemegang saham, pemangku kepentingan, pemerintah dan masyarakat. Pedoman Perilaku juga mengatur mekanisme dan pemberian sanksi atas tindakan penyimpangan.

Sosialisasi Pedoman Perilaku dilakukan antara lain dengan mewajibkan seluruh manajemen dan karyawan untuk menandatangani Surat Pernyataan Ketaatan terhadap Pedoman Perilaku setiap tahun sebagai bukti komitmen karyawan dan akan diarsipkan bersamaan dengan data karyawan yang bersangkutan. Penandatanganan oleh seluruh manajemen dan karyawan merupakan bukti bahwa Pedoman Perilaku berlaku untuk karyawan di seluruh level organisasi Perusahaan dan Anak Perusahaan, sampai dengan karyawan yang bersangkutan berhenti bekerja dari Perusahaan. Pedoman Perilaku diharapkan mampu menjadi pedoman karyawan dalam berperilaku dengan tetap menerapkan nilai-nilai dan budaya Perusahaan.

## Penanganan Penyimpangan atas Pedoman Perilaku

Penanganan Penyimpangan atas Pedoman Perilaku dapat dilakukan melalui mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP). Penanganan terhadap tindakan penyimpangan Pedoman Perilaku dilakukan melalui penyelidikan yang mendalam dan didasari fakta-fakta, sedangkan keputusannya dibuat dan diberikan berdasarkan pertimbangan akibat tindakan, tingkat kesengajaan dan motif tindakan.

Penanganan atas penyimpangan atas Pedoman Perilaku ditangani oleh Komite Sumber Daya Manusia, yang dengan melalui pertimbangan yang cermat dan objektif

3. To define the scope of work, duties and responsibilities of the Boards of Commissioners and Directors, and the work relationship between the two.
4. To make it easier for the Boards of Commissioners and Directors to understand their respective duties and responsibilities.
5. To apply the principles of GCG, namely transparency, accountability, responsibility, independence and fairness.

## Corporate Ethics

Corporate ethics are set out in Bakrieland's Code of Conduct. The consistent application of corporate ethics is expected to help nurture a culture that remains true to the Company's values. The code of ethics is applied at all organizational levels.

## Code of Conduct and Code of Ethics Ratification and Sensitization

Bakrieland's Code of Conduct was ratified by the Directive of the Board of Directors No. 047/SK-Dir/IV/07. All of Bakrieland's management and employees must fully understand and apply the Code of Conduct when building work relationships with other employees, as well as consumers, suppliers, shareholders, stakeholders, as well as the government and the public. The Code of Conduct also governs the improvement mechanism for sanctions for misconduct.

In building awareness about the Code of Conduct, all management and employees are required to sign a Statement of Compliance with the Code of Conduct on yearly basis, as a confirmation of their commitment. The statement becomes a part of their personnel file. The obligation of all management and employees to sign the statement of compliance clearly shows that the Code of Conduct applies to employees at all organizational levels of the Company and its Subsidiaries. The Code of Conduct guides each employee's standard of conduct and behavior, and ensures that it remains consistent with the Company's corporate values and culture.

## Handling Breaches of the Code of Conduct

Any breach of the Code of Conduct is dealt with through the Whistleblowing System. If the Code of Conduct has been breached, a thorough investigation is launched to establish the facts of the misdemeanors, and any decision made must take into account the consequences of the action, degree of intention and motive.

Breaches of the Code of Conduct are handled by the Human Resources Committee, which is responsible for handing out sanctions that fit the severity of the offence, and the

akan memutuskan jenis sanksi yang disesuaikan dengan bobot penyimpangan dan hirarki organisasi (pangkat atau jabatan karyawan). Sanksi kepada karyawan dapat berbentuk teguran lisan, surat peringatan (I, II, III), tidak mendapatkan kenaikan gaji, pangkat atau bonus, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK). Khusus untuk sanksi pemutusan hubungan kerja, setelah mendapatkan persetujuan Direksi, dilanjutkan dengan pengajuan permohonan izin kepada Departemen Tenaga Kerja sesuai UU Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

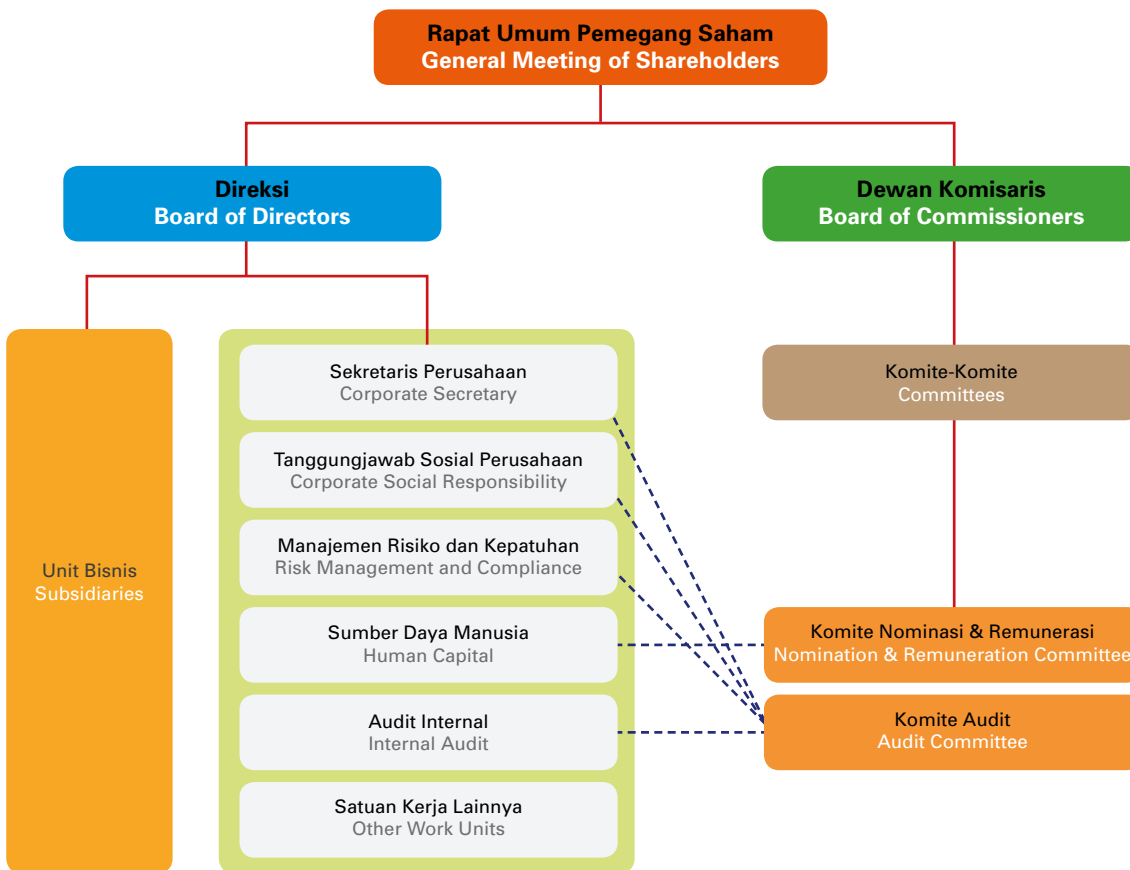
### Struktur GCG

Struktur tata kelola Perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi, komite-komite yang membantu Dewan Komisaris serta satuan kerja yang membantu Direksi.

employee's rank or position within the organizational hierarchy, after meticulous and objective consideration. Sanctions imposed on an employee may be in the form of a verbal warning; written warning (I, II, III); removal of the entitlement to a salary increase, promotion or bonus; or termination of employment. The decision to dismiss an employee must be approved by the Board of Directors, and followed by a request for permission from the Ministry of Manpower in accordance with the Manpower Law of the Republic of Indonesia.

### GCG Structure

The Company's good corporate governance structure consists of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, the Board of Directors, the committees assisting the Board of Commissioners and the units supporting the Board of Directors.



### RUPS

Berdasarkan pada UU No. 40 Tahun 2007 dan Anggaran Dasar Perusahaan, RUPS merupakan organ Perusahaan yang mempunyai wewenang tertinggi yang tidak dimiliki oleh Direksi atau Dewan Komisaris. Pelaksanaan RUPS dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun, atau dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali jika dibutuhkan.

### GMS

Pursuant to Law No.40/2007, and the Company's Articles of Association, GMS wields the highest power that is not conferred on the Boards of Directors or Commissioners. GMS is held at least once a year, or may be convened more than once a year if deemed necessary.

## Realisasi Keputusan RUPST 2015

Seluruh keputusan RUPST 2015 telah terealisasi di tahun 2015.

## RUPST 2016

Selama 2016, Bakrieland menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPST pada 30 September 2016, dan 1 (satu) kali rapat lanjutannya, yaitu pada 21 Oktober 2016. Perusahaan telah mempublikasikan seluruh Surat Pemberitahuan penyelenggaraan RUPS itu melalui Harian Terbit dan website [www.bakrieland.com](http://www.bakrieland.com).

## Realisasi Keputusan RUPST 2015

The entire 2015 Annual GMS resolutions have been realized in 2015.

## AGMS 2016

In 2016, Bakrieland held its Annual GMS only once on 30 September, 2016, and a follow-up meeting on 21 October, 2016. The Company published all notices of the GMS in the Harian Terbit daily and on its official website at [www.bakrieland.com](http://www.bakrieland.com).

Tabel Hasil RUPS Table GMS Resolutions

RUPS GMS	Mata Acara Agenda	Hasil Keputusan Resolution	Realisasi Realization
RUPST 30 September 2016  AGMS dated 30 September 2016	<p><b>Mata Acara Pertama</b> Persetujuan atas Laporan Pertanggungjawaban Direksi tentang jalannya Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.</p> <p><b>Mata Acara Kedua</b> Persetujuan dan Pengesahan atas Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.</p> <p><b>Mata Acara Ketiga</b> Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku Perusahaan untuk tahun buku 2016.</p> <p><b>Mata Acara Keempat</b> Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris atas penggunaan/pengalihan treasury stock hasil pembelian kembali.</p> <p><b>First Agenda</b> Approval of the Board of Directors' Accountability Report on the running of the Company for the fiscal year ending 31 December, 2015.</p> <p><b>Second Agenda</b> Approval and Ratification of the Company's Balance Sheet and Profit/Loss Statement for the fiscal year ending 31 December, 2015.</p> <p><b>Third Agenda</b> Approval of the appointment of an Independent Public Accounting Firm to audit the Company's books and records for the fiscal year 2016.</p> <p><b>Fourth Agenda</b> Delegation of authority to the Board of Commissioners for the use/diversion of treasury stock from share buybacks.</p>	<p><b>Keputusan Rapat</b> Untuk seluruh Mata Acara Rapat tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Terbatas (selanjutnya disebut "Undang-Undang No. 40 Tahun 2007") dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan OJK No 32 Tahun 2014 serta Pasal 11 ayat 1 butir a dan ayat (7) Anggaran Dasar Perusahaan, Rapat hanya sah dan mengikat apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk seluruh Mata Acara Rapat hanya sah dan mengikat, apabila disetujui secara musyawarah mufakat atau dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai maka melalui suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.</p> <p>Bahwa jumlah saham yang hadir dan/atau terwakili dalam Rapat ini adalah sejumlah 17.746.937.478 saham atau sama dengan 40,89% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perusahaan sampai dengan tanggal Rapat ini yaitu sejumlah dari total 43.401.163.019 saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dengan hak suara yang sah hingga saat Rapat yaitu sebanyak 43.521.913.019 saham, dikurangi dengan 120.750.000 saham yang diperoleh kembali oleh Perusahaan (treasury stock), sehingga dengan demikian Rapat tidak memenuhi korum sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 86 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 dan Pasal 26 ayat (1) butir a Peraturan OJK No. 32 Tahun 2014 serta Pasal 11 ayat 1 butir a Anggaran Dasar Perusahaan.</p> <p>Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, c dan d Anggaran Dasar Perusahaan, Pasal 17 dan Pasal 26 ayat (1) huruf b Peraturan OJK No. 32 Tahun 2014 dalam hal kuorum kehadiran pada rapat pertama tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat 1 huruf b Peraturan OJK No. 32 Tahun 2014, maka Perusahaan akan mengadakan rapat kedua yang dapat diadakan dengan ketentuan rapat kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan serta tata cara pemanggilan yang akan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p><b>Keputusan Rapat</b> Sesuai Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bakrieland Development Tbk Nomor: 12 tanggal 30 September 2016 dari Kantor Notaris Andalia Farida, S.H. M.H bahwa rapat tidak memenuhi ketentuan kourum dan tidak berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam Mata Acara Rapat. Akan diadakan pemanggilan rapat kedua yang mana waktu dan pemanggilannya akan ditentukan selanjutnya dengan mengingat ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan OJK No. 32 Tahun 2014. Perusahaan akan mengadakan Rapat kedua, yang akan diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak Rapat tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) butir c Peraturan OJK No 32 Tahun 2014.</p> <p><b>Meeting Resolution</b> Pursuant to the Notarial Deed of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bakrieland Development Tbk Number: 12 dated 30 September, 2016, issued by the Office of Notary Andalia Farida, S.H. M.H, the meeting did not have the required quorum, thus no valid and binding decisions on matters on the Meeting Agenda could be made. A second call for a meeting will be made in accordance with the Articles of Association and OJK Regulation No. 32/2014. The Company shall hold the second meeting 10 (ten) days at the earliest and 21 (twenty one) days at the latest from the day of the first Meeting as set out in Article 17 clause (1) point c of OJK Regulation No. 32/2014.</p>

Tabel Hasil RUPS Table GMS Resolutions

RUPS GMS	Mata Acara Agenda	Hasil Keputusan Resolution	Realisasi Realization
<p><b>Meeting Resolution</b> Pursuant to Article 86 clause (1) and Article 87 clause (2) of Law No. 40/2007 on Limited Liability Companies (hereinafter referred to as "Law No. 40/2007") and Article 26 clause (1) of OJK Regulation No. 32/2014 and Article 11 clause 1 point a and clause (7) of the Company's Articles of Association, the meeting shall only be declared valid and binding when attended by shareholders, and/or their valid proxies, representing more than 1/2 (half) of the total shares issued by the Company; and any decisions made by a GMS are only valid and binding when agreement is reached through consensus, or if this is not achieved, more than 1/2 (half) of the votes must be in agreement from all shares with a valid vote issued at the Meeting.</p> <p>The number of shares represented at the Meeting totaled 17,746,937,478 shares, accounting for 40.89% of all shares issued by the Company up to the day of the Meeting, totaling 43,401,163,019 shares, and representing the 43,521,913,019 shares issued and fully paid with valid votes up to the day of the Meeting minus the 120,750,000 shares that the Company has repurchased (treasury stock). The Meeting failed to meet the quorum as set out in Article 86 clause (1) of Law No. 40/2007, Article 26 clause (1) point a of OJK Regulation No. 32/2014 and Article 11 clause 1 point a of the Company's Articles of Association.</p> <p>As laid out in Article 11 clause (1) points b, c and d of the Company's Articles of Association, and Article 17 and Article 26 clause (1) point b of OJK Regulation No. 32/2014, when the attendance quorum at the first meeting is not reached as required by Article 26 clause 1 point b of OJK Regulation No. 32/2014, the Company shall hold a second meeting on the conditions that the second meeting is valid and decisions can be made when attended by shareholders having shares with valid votes in the attendance quorum and decision-making quorum, in accordance with the procedure for calling a meeting which will be determine by the Financial Services Authority.</p>			
<p>Rapat Kedua Atas RUPST 21 Oktober 2016 Second AGMS dated 21 October 2016</p>	<p><b>Mata Acara Pertama</b> Persetujuan atas Laporan Pertanggungjawaban Direksi tentang jalannya Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.</p> <p><b>First Agenda</b> Approval of the Board of Directors' Accountability Report for the fiscal year ending 31 December, 2015.</p>	<p><b>Mata Acara Pertama</b> Menyetujui Laporan pertanggungjawaban Direksi tentang jalannya Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo &amp; Rekan berdasarkan Laporan No. KNMT&amp;R-C2-31.08.2016/01 tanggal 31 Agustus 2016 termasuk Menyetujui penyajian kembali (restatement) Laporan Keuangan Perusahaan Tahun yang berakhir 31 Desember 2015 sebagaimana yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo &amp; Rekan berdasarkan Laporan No. KNMT&amp;R-C2-31.08.2016/01 tanggal 31 Agustus 2016 dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perusahaan, berikut memberikan pembebasan tanggung jawab (acquite de charge) serta pelunasan kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sepanjang tercatat dalam Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris tersebut.</p>	<p><b>Mata Acara Pertama</b> Sesuai Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bakrieland Development Tbk Nomor: 37 tanggal 21 Oktober 2016 dari Kantor Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, rapat telah menyetujui keputusan Mata Acara pertama yaitu Laporan pertanggungjawaban Direksi tentang jalannya Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, Menyetujui penyajian kembali (restatement) Laporan Keuangan Perusahaan Tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perusahaan, berikut memberikan pembebasan tanggung jawab (acquite de charge) serta pelunasan kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sepanjang tercatat dalam Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris tersebut.</p>

Tabel Hasil RUPS Table GMS Resolutions

RUPS GMS	Mata Acara Agenda	Hasil Keputusan Resolution	Realisasi Realization
		<p><b>First Agenda</b> Approval of the Board of Directors' Accountability Report for the fiscal year ending 31 December, 2015, audited by the Public Accounting Firm (KAP) Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo &amp; Co. based on Report No. KNMT&amp;R-C2-31.08.2016/01 dated 31 August, 2016, including approval of the restatement of the Company's Financial Report for the year ending 31 December, 2015, as audited by the Public Accounting Firm Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo &amp; Rekan based on Report No. KNMT&amp;R-C2-31.08.2016/01 dated 31 August, 2016, and the Board of Commissioners' Supervisory Report, to subsequently grant full release and discharge, and settlement to the Board of Directors, for their management actions, and to the Board of Commissioners for the supervisory actions undertaken during the fiscal year ending 31 December, 2015, as provided in the Reports submitted by the Boards of Directors and Commissioners.</p>	<p><b>First Agenda</b> Pursuant to the Notarial Deed of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bakrieland Development Tbk Number: 37 dated 21 October, 2016, issued by the Office of Notary Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, the meeting approves the resolution of the First Agenda on the Board of Directors' Accountability Report for the fiscal year ending 31 December, 2015, and approves the restatement of the Company's Financial Report for the year ending 31 December, 2015, and the Board of Commissioners' Supervisory Report, to subsequently grant full release and discharge, and settlement to the Board of Directors, for their management actions, and to the Board of Commissioners for the supervisory actions undertaken during the fiscal year ending 31 December, 2015, as provided in the Reports submitted by the Boards of Directors and Commissioners.</p>
	<p><b>Mata Acara Kedua</b> Persetujuan dan Pengesahan atas Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.</p> <p><b>Second Agenda</b> Approval and ratification of the Company's Balance Sheet and Profit/Loss Statement for the fiscal year ending 31 December, 2015.</p>	<p><b>Mata Acara Kedua</b> Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba/Rugi Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.</p> <p><b>Second Agenda</b> Approval and ratification of the Company's Statement of Financial Position and Profit/Loss Statement for the fiscal year ending 31 December, 2015</p>	<p><b>Mata Acara Kedua</b> Sesuai Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bakrieland Development Tbk Nomor: 37 tanggal 21 Oktober 2016 dari Kantor Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, rapat telah menyetujui keputusan Mata Acara kedua yaitu pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba/Rugi Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.</p> <p><b>Second Agenda</b> Pursuant to the Notarial Deed of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bakrieland Development Tbk Number: 37 dated 21 October, 2016, issued by the Office of Notary Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, the meeting agrees to the resolution of the Second Agenda on the ratification of the Company's Statement of Financial Position and Profit/Loss Statement for the fiscal year ending 31 December, 2015.</p>

Tabel Hasil RUPS Table GMS Resolutions

RUPS GMS	Mata Acara Agenda	Hasil Keputusan Resolution	Realisasi Realization
	<p><b>Mata Acara Ketiga</b> Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku Perusahaan untuk tahun buku 2016.</p> <p><b>Third Agenda</b> Approval of the appointment of an Independent Public Accounting Firm to audit the Company's books and records for the fiscal year 2016.</p>	<p><b>Mata Acara Ketiga</b> Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit terhadap buku Perusahaan untuk tahun buku 2016 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2016, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perusahaan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik berikut persyaratan-persyaratannya.</p> <p><b>Third Agenda</b> Approval of the conferring of authority to the Company's Board of Commissioners for the appointment of an Independent Public Accounting Firm to audit the Company's books and records for the fiscal year 2016, and other periods during fiscal year 2016. Approval of the conferring of authority to the Company's Board of Directors to determine the honorarium of the Public Accountant, as well as the terms and conditions of their appointment.</p>	<p><b>Mata Acara Ketiga</b> Sesuai Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bakrieland Development Tbk Nomor: 37 tanggal 21 Oktober 2016 dari Kantor Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, rapat telah menyetujui Mata Acara Ketiga untuk pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris atas usulan Komite Audit untuk menunjuk KAP Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo &amp; Rekan yang akan melakukan audit terhadap buku Perusahaan untuk tahun 2016 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2016 serta memberi wewenang kepada Direksi Perusahaan untuk menetapkan honorarium akuntan public tersebut berikut persyaratan-persyaratannya berdasarkan rekomendasi Komite Audit PT Bakrieland Development Tbk sesuai surat Perusahaan tertanggal 13 Oktober 2016 perihal Rekomendasi Penunjukan Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2016.</p> <p><b>Third Agenda</b> Pursuant to the Notarial Deed of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bakrieland Development Tbk Number: 37 dated 21 October, 2016, issued by the Office of Notary Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, the meeting agrees to the Third Agenda on conferring authority to the Board of Commissioners, upon the Audit Committee's recommendation to appoint KAP Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo &amp; Rekan to audit the Company's books and records for 2016, and other periods during fiscal year 2016, and conferring authority to the Company's Board of Directors to determine the honorarium of the Public Accountant, and the terms and conditions of their appointment, based on the recommendations of the Audit Committee of PT Bakrieland Development Tbk, and in accordance with the Company's letter dated 13 October, 2016, concerning Recommendations on the Appointment of a Public Accounting Firm for the Fiscal Year 2016.</p>



Tabel Hasil RUPS Table GMS Resolutions

RUPS GMS	Mata Acara Agenda	Hasil Keputusan Resolution	Realisasi Realization
	<p><b>Mata Acara Keempat</b> Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris atas penggunaan/pengalihan treasury stock hasil pembelian kembali.</p> <p><b>Fourth Agenda</b> Delegation of authority to the Board of Commissioners for the use/diversion of treasury stock from share buybacks.</p>	<p><b>Mata Acara Keempat</b> Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perusahaan guna memberikan persetujuan atas pengalihan saham hasil pembelian kembali tersebut dengan cara dijual kembali melalui Bursa Efek maupun diluar Bursa Efek, atau melalui pengalihan hak dengan cara lain, dengan ketentuan harga penjualan atas saham Perusahaan yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, tidak boleh lebih rendah dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek satu hari sebelum tanggal penjualan saham.</p> <p><b>Fourth Agenda</b> Approval of the conferring of authority to the Company's Board of Commissioners for granting approval to the diversion of repurchased shares by reselling the said shares through the Stock Exchange, and outside the Stock Exchange, or through the diversion of rights by other means, on the condition that the selling price of the Company's shares that are registered and traded at the Stock Exchange should not be lower than the closing price of the daily trading at the Stock Exchange one day prior to the date of the selling the shares.</p>	<p><b>Mata Acara Keempat</b> Sesuai Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bakrieland Development Tbk Nomor: 37 tanggal 21 Oktober 2016 dari Kantor Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, rapat telah menyetujui Mata Acara Keempat untuk pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perusahaan guna memberikan persetujuan atas pengalihan saham hasil pembelian kembali 120.750.000 saham dalam treasury stock dengan cara dijual kembali melalui Bursa Efek maupun diluar Bursa Efek, atau melalui pengalihan hak dengan cara lain, dengan ketentuan harga penjualan atas saham Perusahaan yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, tidak boleh lebih rendah dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek satu hari sebelum tanggal penjualan saham.</p> <p>Mata acara keempat tersebut telah diimplementasikan pada tanggal 25 dan 26 Januari 2017 dengan cara melakukan penjualan saham hasil pembelian kembali. Hal tersebut telah diinformasikan melalui surat kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p><b>Fourth Agenda</b> Pursuant to the Notarial Deed of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bakrieland Development Tbk Number: 37 dated 21 October 2016 issued by the Office of Notary Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, the meeting agrees to the Fourth Agenda on conferring authority to the Company's Board of Commissioners for granting approval of diverting buyback shares totaling 120,750,000 shares in the treasury stock by means of reselling them through the Stock Exchange, and outside the Stock Exchange, or through the diversion of rights by other means, on the condition that the selling price of the Company's shares that are registered and traded at the Stock Exchange should not be lower than the closing price of the trading day at the Stock Exchange one day prior to the date of the selling of the shares.</p> <p>The fourth agenda was implemented on 25 and 26 of January 2017 by performing sales of buyback shares. This was informed through a letter to Indonesia's Financial Services Authority.</p>

## Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ tata kelola Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi terkait pelaksanaan kerja yang dijalankan oleh Direksi. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kinerja dan aktivitas usaha yang dijalankan Bakrieland. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas pengawasan dan memberikan masukan kepada anggota Direksi dengan itikad yang baik, kehati-hatian, bertanggungjawab serta independen.

## Persyaratan, Keanggotaan dan Masa Jabatan

Persyaratan, keanggotaan dan masa jabatan anggota Dewan Komisaris Bakrieland secara keseluruhan telah memenuhi persyaratan formal dan material yang berlaku. Persyaratan formal bersifat umum, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sementara persyaratan material bersifat khusus, disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis Perusahaan.

## Komposisi Dewan Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris Perusahaan terdiri dari 3 (tiga) anggota, yaitu 1 (satu) Presiden Komisaris, 1 (satu) Komisaris dan 1 (satu) Komisaris Independen. Anggota Dewan Komisaris diseleksi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dan diangkat melalui mekanisme RUPS, dengan periode jabatan masing-masing 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai keputusan RUPS. Jabatan anggota Dewan Komisaris akan berakhir apabila mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi persyaratan, meninggal dunia, atau diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Periode Jabatan Tenure
1	Bambang Irawan Hendradi	Presiden Komisaris   President Commissioner	2015-2018
2	Armansyah Yamin	Komisaris   Commissioner	2015-2018
3	Kanaka Puradiredja	Komisaris Independen   Independent Commissioner	2015-2018

## Tugas dan Tanggung Jawab

Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan operasional yang dikelola oleh Direksi. Selain itu, Dewan Komisaris juga memberikan saran serta nasihat kepada Direksi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Keputusan RUPS Perusahaan, peraturan serta undang-undang yang berlaku. Sepanjang 2016, Dewan Komisaris tidak menemukan pelanggaran hukum dan peraturan yang dilakukan oleh manajemen Perusahaan.

## Board of Commissioners

The Board of Commissioners is a corporate governance organ within the Company responsible for performing general and/or specific supervisory functions in accordance with the Articles of Association, and imparting advice to the Board of Directors. The Board of Commissioners is also responsible for overseeing Bakrieland's business performance and activities. Every member of the Board must perform supervisory duties, and offer input to the Board of Directors, that demonstrates good will and due caution, in an accountable and independent manner.

## Requirements, Membership and Term of Office

In terms of requirements, membership and tenure, members of Bakrieland's Board of Commissioners in general have fulfilled all formal and material requirements. Formal requirements are general in nature in accordance with the prevailing legislation, whereas material requirements are more specifically tailored to the Company's business needs and characteristics.

## Composition of the Board of Commissioners

The Company's Board of Commissioners consists of 3 (three) members, namely 1 (one) President Commissioner, 1 (one) Commissioner and 1 (one) Independent Commissioner. Board members are selected by the Nomination and Remuneration Committee, and appointed at the GMS, and the term of office for each member is 3 (three) years with the possibility of reappointment in accordance with a GMS resolution. The term of office of Board members shall terminate by reason of resignation or death, or failure to qualify, or dismissal in accordance with a GMS resolution. The composition of the Board of Commissioners as of 31 December 2016 was as follows:

## Duties and Responsibilities

The Board of Commissioners is responsible for overseeing any operational activities that are managed by the Board of Directors. In addition, the Board of Commissioners is responsible for providing recommendations and advice to the Board of Directors in accordance with the provisions of the Articles of Association, Company GMS Resolutions, and the prevailing laws and regulations. In 2016, the Company did not come across any violations of the law in the property sector committed by the Company's management.

### Rapat Dewan Komisaris

Sepanjang 2016, Dewan Komisaris telah melakukan rapat 6 kali dengan agenda sebagai berikut:

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Kehadiran Attendance		
			IHS	AY	KP
1	21 Januari 2016	Laporan Komite Audit atas penyelesaian Laporan Keuangan Audit Committee Report	√	√	√
2	29 Februari 2016	Laporan Komite Audit atas penyelesaian Laporan Keuangan Audit Committee Report	√	√	√
3	29 Maret 2016	Laporan Komite Audit atas penyelesaian Laporan Keuangan Audit Committee Report	√	√	√
4	20 Oktober 2016	Pemilihan Kantor Akuntan Publik Appointment of Public Accounting Firm	√	√	√
5	9 November 2016	Rekomendasi Kantor Akuntan Publik Recommendation of Public Accounting Firm	√	√	√
6	15 Desember 2016	Pembentukan Komite Audit Masa Bakti 2017-2020 Establishing the Audit Committee Term of Office 2017-2020	√	√	√

### Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Selama tahun 2016, tidak ada program pelatihan dan pengembangan kompetensi Dewan Komisaris yang diselenggarakan di lingkungan Bakrieland. Dewan Komisaris mengikuti program pelatihan dan pengembangan kompetensi dengan inisiatif pribadi di luar lingkungan Bakrieland.

### Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komisaris

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris berpegang pada Pedoman dan Tata Tertib dengan menerapkan prinsip-prinsip berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan oleh Direksi dengan berpedoman dan mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris bertindak sebagai majelis dan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri mewakili Dewan Komisaris.
3. Pengawasan tidak boleh berubah menjadi pelaksanaan tugas-tugas eksekutif, kecuali dalam hal Perusahaan tidak mempunyai Direksi, dengan kewajiban dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah tidak ada Direksi harus memanggil RUPS untuk mengangkat Direksi.
4. Pengawasan dilakukan secara proaktif, tidak hanya dengan sekedar menyetujui atau tidak menyetujui terhadap tindakan-tindakan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, serta mencakup semua aspek bisnis Perusahaan. Dewan Komisaris dapat menggunakan jasa profesional yang mandiri dan/ atau membentuk Komite untuk membantu tugas Dewan Komisaris.

### Meetings of the Board of Commissioners

In 2016, the Board of Commissioners convened 6 meetings with the following agendas:

### Training and Competency Development

Translate Pleaseln 2016, no training and competency development programs for the Board of Commissioners were held within Bakrieland. The Board of Commissioners participated in such programs on their own initiative outside of Bakrieland.

### Board Manual and Work Rules

In discharging its duties and responsibilities, the Board of Commissioners abides by the Board Manual and Work Rules through the following:

1. Overseeing the management of the Company by the Board of Directors with reference to, and in conformity with, the Articles of Association and the prevailing laws and regulations
2. In carrying out its supervisory function, the Board of Commissioners acts as a council, and as such may not act on behalf of the Board of Commissioners.
3. The Board's supervisory duties may not be replaced with the implementation of executive duties, except when the Company has no Board of Directors. This includes an obligation to call a GMS in order to establish a Board of Directors no later than 60 (sixty) days following the absence of a Board of Directors.
4. Supervision should be proactive, not merely limited to the approval or disapproval of actions that require the approval of the Board of Commissioners, and cover all aspects of corporate business. The Board of Commissioners may solicit independent professional help and/or establish a Committee to specifically assist the Board of Commissioners.

## Komisaris Independen

Sesuai peraturan UU PT yang mensyaratkan bahwa jumlah Komisaris Independen dalam struktur Dewan Komisaris adalah sepertiga dari total jumlah anggota Dewan Komisaris, maka Perusahaan mengangkat Kanaka Puradiredja sebagai Komisaris Independen Perusahaan dalam periode jabatan sejak 2015 hingga 2018. Profil beliau telah tersajikan dalam bab Profil Dewan Komisaris.

## Kriteria Pengangkatan Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang:

1. Berasal dari luar Perusahaan.
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang Saham Utama Perusahaan.
4. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Untuk menjadi Komisaris Independen, calon Komisaris Independen harus memenuhi persyaratan formal dan material, juga harus memenuhi persyaratan independensi sebagai berikut:

1. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali Perusahaan.
2. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Direktur dan/atau Dewan Komisaris lainnya di Perusahaan.
3. Tidak menjabat sebagai Direksi di Perusahaan yang terafiliasi dengan Perusahaan.
4. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
5. Tidak bekerja di Perusahaan atau afiliasinya dalam kurun waktu enam bulan terakhir.
6. Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan atau Perusahaan lain yang menyediakan jasa dan produk kepada Perusahaan dan afiliasinya.
7. Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Komisaris Independen untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkup Perusahaan.
8. Jumlah Komisaris Independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu dari Komisaris Independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan.
9. Pemilihan Komisaris Independen harus memperhatikan pendapat pemegang saham minoritas yang dapat disalurkan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi.

## Independent Commissioners

Pursuant to the Law on Limited Liability Companies, which stipulates that Independent Commissioners within the Board of Commissioners must account for one-third of the total members of the Board, the Company has appointed Kanaka Puradiredja as its Independent Commissioner to serve from 2015 to 2018. His profile can be found in the chapter on the Profiles of the Board of Commissioners.

## Appointment Criteria for Independent Commissioners

An Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who:

1. Comes from outside the Company.
2. Does not own any Company shares, directly or indirectly.
3. Is not affiliated with the Company, the Board of Commissioners, the Board of Directors or any Principal Shareholders of the Company.
4. Has no direct or indirect business ties with the Company's business activities.

To become an Independent Commissioner, a candidate must fulfill all formal and material requirements, in addition to the following requirements relating to independence:

1. Is not affiliated with the Company's Controlling Shareholders.
2. Is not affiliated with Company Directors and/or other members of the Board of Commissioners.
3. Is not a Director of another business entity that is affiliated with the Company.
4. Has good knowledge of capital market laws and regulations.
5. Has not worked for the Company or its affiliates in the past six months.
6. Has no direct or indirect financial ties with the Company or other corporations that provide goods and services to the Company and its affiliates.
7. Is free from any business interest or other ties that may obstruct or interfere with the Independent Commissioner's ability to act or think freely about matters relating to the Company.
8. The number of Independent Commissioners must guarantee that the oversight mechanism works effectively, and adheres to the existing laws and regulations. At least one of the Independent Commissioners must have a background in accounting or the financial sector.
9. In electing an Independent Commissioner, the views and opinions of minority shareholders must be considered, and can be put forward through the Nomination and Remuneration Committee.

### Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Komisaris Independen Bakrieland tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, antar sesama anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali. Hal ini dinyatakan melalui Surat Pernyataan Tidak Memiliki Benturan Kepentingan yang telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris untuk masa jabatan tahun 2016.

Surat tersebut berisi pernyataan, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Tidak menerima atau memberikan suatu hal dalam bentuk apapun kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi independensi.
2. Tidak ikut serta dalam proses pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan oleh pemegang saham independen Perusahaan.
3. Mendahulukan kepentingan ekonomis Perusahaan di atas kepentingan ekonomis pribadi, keluarga, dan pihak lainnya.

### Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris membentuk komite-komite yang melapor langsung kepada Dewan Komisaris serta membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, yaitu pengawasan terhadap jalannya Perusahaan. Salah satu tugas komite adalah merumuskan kebijakan Dewan Komisaris sesuai ruang lingkup tugas komite yang bersangkutan. Penetapan pembentukan komite-komite dilakukan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris dan setiap komite diketuai oleh Komisaris Independen. Dewan Komisaris Bakrieland dibantu oleh Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan tugasnya.

#### Komite Audit

Komite Audit dibentuk berdasarkan SK No. 05 Kom-BLD/VII/2015 tentang Perpanjangan Masa Bakti Komite Audit, dengan masa bakti kepengurusan sejak 3 Juli 2015 hingga selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS Tahun 2016. Tugas utama Komite Audit adalah mendorong diterapkannya praktik GCG yang baik, terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai, meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan serta mengkaji ruang lingkup, ketepatan, kemandirian dan objektivitas auditor eksternal.

### Statement of Independence of Independent Commissioners

Bakrieland's Independent Commissioners are not affiliated with the members of the Board of Directors, fellow members of the Board of Commissioners, or the Controlling Shareholders. This has been documented in a written Statement on No Conflicts of Interest signed by the Board of Commissioners for the 2015 term of office.

The document contains statements including, but not limited to, the following:

1. The Board shall not accept anything from another party, or offer anything to another party, that may influence its independence.
2. The Board shall not participate in any decision-making processes that contain elements of a conflict of interests by the Company's independent shareholders.
3. The Board shall prioritize the Company's economic interests over personal interests, and that of their families and other parties.

### Committees under the Board of Commissioners

The Board of Commissioners forms committees that directly report to the Board of Commissioners to assist in the execution of the Board's duties and responsibilities, which primarily concern overseeing the running of the Company. One of the duties of the committees is to formulate policies for the Board of Commissioners according to the scope of work of each respective committee. Committees are established through Directives of the Board of Commissioners, and each committee is headed by an Independent Commissioner. In carrying out its duties, Bakrieland's Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee.

#### Audit Committee

The Audit Committee was formed by the Directive No.05 Kom-BLD/VII/2015 on the Extension of the Term of Office of the Audit Committee, pursuant to which the Committee remained in office from 3 July 2015 to no later than 30 (thirty) days after the 2016 Annual GMS. The Audit Committee is principally responsible for promoting the effective implementation of GCG, developing an appropriate internal control structure, improving the quality of financial transparency and reporting, and reviewing the scope of work, accuracy, independence and impartiality of the external auditor.

### Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan membantu Dewan Komisaris dengan melakukan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Menyampaikan laporan tertulis kepada Dewan Komisaris paling sedikit sekali dalam satu kuartal, yang menyajikan aktivitas dan rekomendasi Komite Audit serta masalah-masalah signifikan yang membutuhkan perhatian Dewan Komisaris, jika ada;
2. Menyiapkan laporan yang akan dimasukkan ke dalam laporan tahunan yang antara lain memuat aktivitas Komite Audit;
3. Membuat laporan khusus kepada Dewan Komisaris jika diminta;
4. Melakukan oversight atas ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perusahaan;
5. Melakukan oversight atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
6. Melakukan oversight terhadap perencanaan Audit Eksternal serta memonitor pelaksanaan kerja Auditor Eksternal;
7. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Auditor Eksternal;

### Duties and Responsibilities of the Audit Committee

The Audit Committee reports to the Board of Commissioners, and supports the Board in performing the following duties:

1. Delivering a written report to the Board of Commissioners, at least on a quarterly basis, which outlines the Committee's activities and recommendations, as well as any significant issues, if any, that require the attention of the Board of Commissioners;
2. Preparing reports to be included in the annual report, which contain information about the Committee's activities;
3. Preparing special reports for the Board of Commissioners, if requested;
4. Overseeing the Company's compliance with capital market laws and regulations, and other legislation related to the Company's business activities;
5. Overseeing all financial information disclosed by the Company, such as its financial statements and projections;
6. Overseeing the external audit plan, and monitoring the work of the External Auditor;
7. Offering recommendations to the Board of Commissioners about the appointment of an External Auditor;

### Profil Komite Audit

### Audit Profile of the Audit Committee

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Latar Belakang Background
Bambang Irawan Hendradi	Ketua Chairman	Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bakrieland Development Tbk No. 001/SK/Kom-BLD/VII/2016  Board of Commissioners' Directive of PT Bakrieland Development Tbk No. 001/SK/Kom-BLD/VII/2016	Manajemen Management
Indra Saftiri	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bakrieland Development Tbk No. 001/SK/Kom-BLD/VII/2016  Board of Commissioners' Directive of PT Bakrieland Development Tbk No. 001/SK/Kom-BLD/VII/2016	Hukum Law
Soenarso Soemodirjo	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bakrieland Development Tbk No. 001/SK/Kom-BLD/VII/2016  Board of Commissioners' Directive of PT Bakrieland Development Tbk No. 001/SK/Kom-BLD/VII/2016	Keuangan Finance

**Bambang Irawan Hendradi – Ketua Komite Audit**

Profil beliau telah disajikan dalam bab Profil Dewan Komisaris.

**Indra Safitri-Anggota**

Warga negara Indonesia, lahir di Rengat, Riau pada 20 Januari 1964 dan berusia 52 tahun. Berdomisili di Jakarta. Beliau menempuh pendidikan Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen PPM, serta merupakan pemegang Sertifikasi Manajemen Risiko-CRMP dan Internal Audit-QIA.

Sebelumnya beliau pernah menjabat anggota Komite Audit di beberapa perusahaan publik. Selain sebagai anggota Komite Audit PT Bakrieland Development Tbk, Beliau saat ini juga menjabat sebagai Senior of Counsel di Firma Hukum Safitri & Co, anggota Komite Audit di PT Bumi Resources Mineral Tbk, anggota Komite Audit PT Benakat Integra Tbk, anggota Komite Penilaian PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Ketua Umum Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Wakil Ketua Lembaga Komisaris Direksi Indonesia (LKDI).

**Soenarso Soemodwirjo-Anggota**

Warga negara Indonesia, lahir di Jember, 9 Mei 1946 dan berusia 70 tahun. Berdomisili di Tangerang. Beliau memperoleh gelar Sarjana (Akuntansi) dari Institut Ilmu Keuangan, Departemen Keuangan, Jakarta, 1974. Selain sebagai anggota Komite Audit PT Bakrieland Development Tbk, Beliau saat ini juga sebagai anggota Komite Audit dan Sekretaris Dewan Komisaris PT Papua Power Indonesia, anggota Komite Audit PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk, anggota Komite Audit PT Bank MNC Internasional Tbk, anggota Komite Audit PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk, dan anggota Direksi Hendropriyono Strategic Consultant.

Memiliki pengalaman luas dalam bidangnya, antara lain pernah menjabat sebagai Ketua Tim Task Force Penyusunan Manual Komite Audit, Konsultan Manajemen PT Sucofindo (Persero), Staf Ahli Direksi PT PAN (Multi Finance Company), anggota Komite Audit di PT Sucofindo (Persero), anggota Komite Audit PT Danareksa (Persero), dan anggota Komite Audit PT Bank CIMB Niaga Tbk.

**Bambang Irawan Hendradi – Audit Committee Chairman**

His profile can be found in the chapter on the Profiles of the Board of Commissioners.

**Indra Safitri-Member**

Born in Rengat, Riau, on 20 January, 1964. He earned a Bachelor's Degree in Law from the Faculty of Law of the University of Indonesia and a Master's Degree in Management from the PPM School of Management, and holds the CRMP Risk Management and QIA Internal Audit Certificates.

He formerly served as a member of the Audit Committee of several public corporations. Apart from being a member of the Audit Committee under PT Bakrieland Development Tbk, he currently also serves as a Senior Counsel at the Safitri & Co. Law Firm, Audit Committee member of PT Bumi Resources Mineral Tbk, Audit Committee member of PT Benakat Integra Tbk, Assessment Committee member of PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Chairman of the Association of Capital Market Legal Consultants (HKHPM) and Deputy Chairman of the Indonesia Institute of Commissioners and Directors (LKDI).

**Soenarso Soemodwirjo-Member**

Born in Jember on 9 May, 1946. He earned a degree in accounting from the Department of Finance of the Institute of Financial Studies in Jakarta in 1974. In addition to being a member of the Audit Committee of PT Bakrieland Development Tbk, he also currently serves as a member of the Audit Committee and the Secretary of the Board of Commissioners of PT Papua Power Indonesia, member of the Audit Committee of PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk, member of the Audit Committee PT Bank MNC Internasional Tbk member of the Audit Committee of PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk, and member of the Board of Directors of Hendrapriyono Strategic Consultant.

He has extensive experience in his areas of expertise, among others as the Head of the Task Force on the Formulation of the Audit Committee Manual, Management Consultant for PT Sucofindo (Persero), Advisor to the Board of Directors of PT PAN (Multi Finance Company), and member of the Audit Committee of PT Sucofindo (Persero), and member of the Audit Committee of PT Danareksa (Persero), and member of the Audit Committee of PT Bank CIMB Niaga Tbk.

## Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite Audit Frequency of Meetings and Attendance Level of Audit Committee Members

Periode: Tahun 2016  
Period: 2016

No.	Tanggal Date	Kehadiran Attendance			Materi Agenda
		KP	MH	IS	
1	19-Jan-16	√	√	√	Progres Audit oleh Kantor Akuntan Publik tentang Audit Laporan Keuangan per tanggal 31 Des 2015 Progress of the Audit Process of the Financial Report by the Public Accounting Firm as of 31 Dec 2015
2	25-Feb-16	√	-	√	Progres Audit Kantor Akuntan Publik atas Laporan Keuangan per tanggal 31 Desember 2015 yang dilakukan bersama Legal, Finance Anak Perusahaan dan Holding Progress of the Audit Process of the Financial Report by the Public Accounting Firm, conducted jointly with the Legal and Finance Divisions of the Subsidiaries and Holdings per 31 December 2015
3	22-Mar-16	√	√	√	Progres Audit Laporan Keuangan per tanggal 31 Desember 2015 bersama Kantor Akuntan Publik Progress of the Audit Process of the Financial Report per 31 December 2015 with the Public Accounting Firm
		IHS	SS	IS	
4	6-Oct-16	√	√	√	Pembahasan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perusahaan untuk tahun buku 2016 Discussion about the Appointment of the Public Accounting Firm to audit the Company's consolidated financial statements for the fiscal year 2016
5	9-Nov-16	√	√	√	Pembahasan laporan keuangan konsolidasian per 30 September 2016 Discussion about the consolidated financial statements per 30 September 2016
6	20-Dec-16	√	√	√	Paparan Eksternal Audit plan oleh Kantor Akuntan Publik untuk audit laporan keuangan konsolidasian per 31 Desember 2016 Presentation of the external audit plan by the Public Accounting Firm for auditing consolidated financial statements per 31 December 2016

IHS: Bambang Irawan Hendradi, SS: Soenarso Soemodiwirjo, KP: Kanaka Puradiredja, MH: Mohammad Hassan, IS: Indra Safitri

### Independensi Komite Audit

Sesuai dengan Piagam Komite Audit, Komite Audit menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan independen dengan menghindari potensi terjadinya benturan kepentingan. Komite mendukung Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi dan pengawasan tentang proses pelaporan keuangan, proses audit internal dan eksternal serta praktik GCG berjalan dengan baik dan sesuai prosedur. Berdasarkan surat dari Komite Audit kepada Dewan Komisaris, fungsi Komite Pemantau Risiko dan Komite Kebijakan Corporate Governance dijalankan oleh Komite Audit.

### Independence of the Audit Committee

In accordance with the Audit Committee Charter, the Audit Committee performs its duties and responsibilities professionally and independently, and avoids any potential conflicts of interest. The Committee supports the Board of Commissioners in evaluating and overseeing the financial reporting process, the internal and external audit process and GCG practices, ensuring that their implementation is in line with the appropriate procedures. Based on the letter from the Audit Committee to the Board of Commissioners, the functions of the Risk Monitoring Committee and the Corporate Governance Policy Committee shall be carried out by the Audit Committee.



## Laporan Komite Audit

Kepada Yth:  
Dewan Komisaris  
PT Bakrieland Development Tbk  
Wisma Bakrie 1, Lantai 7  
Jalan HR Rasuna Said Kav B-1  
Jakarta 12920

Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016

Dengan hormat.

Komite Audit adalah sebuah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Sebagai Perusahaan terbuka, keberadaan dan fungsi dari Komite ini berpedoman kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait.

Sesuai dengan peraturan diatas, tugas utama Komite Audit di PT Bakrieland Development Tbk (Perusahaan) adalah:

- a. Melakukan oversight atas laporan keuangan Perusahaan yang diterbitkan untuk kepentingan publik.
- b. Melalui hasil kerja Auditor Eksternal melakukan oversight atas efektivitas pengendalian internal yang telah diterapkan oleh Manajemen dalam proses penyajian laporan keuangan Perusahaan.
- c. Melakukan kajian atas rencana dan hasil aktivitas yang dilakukan oleh Auditor Internal dalam meyakinkan bahwa aktifitas operasional telah sesuai dengan peraturan Perusahaan.
- d. Melakukan kajian atas rencana dan hasil aktivitas Auditor Eksternal dalam meyakinkan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.
- e. Melakukan kajian atas obyektivitas dan independensi Auditor Internal maupun Eksternal.

Dan menyampaikan laporannya secara berkala kepada Dewan Komisaris.

Untuk periode tahun 2016 Komite Audit Perusahaan terdiri dari seorang Ketua dan 2 (dua) anggota sebagai berikut:

1. Kanaka Puradiredja (Ketua/Komisaris Independen)
2. Mohamad Hassan (Anggota/Profesional Independen)
3. Indra Safitri (Anggota/Profesional Independen)

## Audit Committee Report

To,  
Board of Commissioners  
PT Bakrieland Development Tbk  
Wisma Bakrie 1, Lantai 7  
Jalan HR Rasuna Said Kav B-1  
Jakarta 12920

Annual Report of the Audit Committee for Year Ending 31 December 2016

Dear Sir/Madam,

The Audit Committee is established by and responsible to the Board of Commissioners to assist the Board in performing its duties and functions. As a public company, the Committee's formation and functions refer to Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.04/2015 and other applicable regulations.

Pursuant to the regulation above, the primary duties of the Audit Committee in PT Bakrieland Development Tbk cover the following:

- a. Oversee the Company's financial reports which are prepared to serve the public interest.
- b. Based on the audit results of the external auditor, oversee the effectiveness of internal controls applied by Management in preparing the Company's financial reports.
- c. Review internal auditor's activity plans and results in making sure that operational activities are in compliance with Company regulations.
- d. Review the external auditor's activity plans and results in making sure that the financial reports are free from material misstatement.
- e. Assess the impartiality and independence of the internal and external auditors.

And present the report periodically to the Board of Commissioners.

For the 2016 period, the Company's Audit Committee consists of a Chairperson and 2 (two) members as provided below:

1. Kanaka Puradiredja (Chairperson/ Independent Commissioner)
2. Mohamad Hassan (Member/ Independent Professional)
3. Indra Safitri (Member/ Independent Professional)

Periode Juni 2016 hingga Desember 2016

1. Bambang Irawan Hendradi (Ketua Komite Audit)
2. Soenarso Soemodiwirjo (Anggota/Profesional Independen)
3. Indra Safitri (Anggota/Profesional Independen)

Sepanjang tahun 2016, Komite Audit menyelenggarakan 6 kali pertemuan, dengan fokus utamanya adalah memonitor penyelesaian laporan keuangan Perusahaan, baik laporan keuangan interim maupun tahunan yang diaudit oleh Auditor Eksternal. Adapun tingkat kehadiran rapat anggota Komite untuk masing-masing periode adalah sebagai berikut:

Periode Januari-Juni 2016

- |                       |        |
|-----------------------|--------|
| 1. Kanaka Puradiredja | 100 %  |
| 2. Mohammad Hassan    | 66,6 % |
| 3. Indra Safitri      | 100 %  |

Periode Juni-Desember 2016

- |                            |       |
|----------------------------|-------|
| 1. Bambang Irawan Hendradi | 100 % |
| 2. Soenarso Soemodiwirjo   | 100 % |
| 3. Indra Safitri           | 100 % |

Hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Memonitor pelaksanaan dan penyelesaian audit laporan keuangan konsolidasian tahun 2015 dengan Auditor Eksternal serta isu-isu terkait dengan laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan konsolidasian auditan per 31 Desember 2015 dibahas pada bulan September tahun 2016.
- b. Membahas perencanaan audit Auditor Eksternal atas Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2016 dan progresnya.
- c. Membahas Laporan Keuangan Triwulanan Perusahaan tahun 2016 sebelum disampaikan ke pihak Otoritas.
- d. Melakukan pembahasan atas obyektivitas dan independensi Auditor Eksternal dan merekomendasikan penunjukan Auditor Eksternal.
- e. Membahas isu-isu legal dan perpajakan.

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 31 Desember 2016

From June 2016 to December 2016

1. Bambang Irawan Hendradi (Chairperson of Audit Committee)
2. Soenarso Soemodiwirjo (Member/ Independent Professional)
3. Indra Safitri (Member/ Independent Professional)

In 2016, the Audit Committee held 6 meetings that primarily focused on monitoring the completion of Company financial reports, both interim and annual reports audited by the external auditor. The level of attendance during Committee meetings for the respective period is as follows:

January-June 2016 Period

- |                       |        |
|-----------------------|--------|
| 1. Kanaka Puradiredja | 100 %  |
| 2. Mohammad Hassan    | 66,6 % |
| 3. Indra Safitri      | 100 %  |

June-December 2016 Period

- |                            |       |
|----------------------------|-------|
| 1. Bambang Irawan Hendradi | 100 % |
| 2. Soenarso Soemodiwirjo   | 100 % |
| 3. Indra Safitri           | 100 % |

Matters discussed in the meetings are as follows:

- a. Monitoring of the preparation and completion of consolidated financial reports for 2015 with the external auditor and relevant issues relating to the financial reports. Audited consolidated financial reports as of 31 December 2015 were discussed in September 2016.
- b. The external auditor's audit plan for the Company's financial reports of 2016 and the progress achieved
- c. The Company's Quarterly Financial Reports in 2016 prior to submission to the relevant authorities.
- d. The impartiality and independence of the external auditor and recommended the appointment of an external auditor.
- e. Legal and tax issues

Thank you for your kind attention.

Jakarta, 31 December 2016



**Bambang Irawan Hendradi**  
Ketua  
Chairman



**Soenarso Soemodiwirjo**  
Anggota  
Member



**Indra Safitri**  
Anggota  
Member

### Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk berdasarkan SK Dewan Komisaris No.001/SK/Kom-BLD/07 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi. Pada 2015, dilakukan perubahan susunan keanggotaan melalui SK Dewan Komisaris No.002/KOM-Perusahaan/SKDK/VI/2015 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi. Bakrieland memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang diperbaharui pada tanggal 5 Juni 2015, yang berisi pengaturan tentang keanggotaan, tugas, rapat, serta pelaporan Komite.

### Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan para eksekutif, sampai dengan satu tingkat di bawah Direksi.
2. Membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Terlibat dalam proses perekrutan (wawancara) dan memberikan rekomendasi atas calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan para Eksekutif sampai dengan satu tingkat di bawah Direksi agar tercipta penempatan orang yang tepat pada posisi yang tepat (*the right man on the right place*).
4. Memberikan rekomendasi tentang kebijakan besaran gaji, tunjangan dan fasilitas yang kompetitif dan mengacu pada perkembangan pasar, untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
5. Mengawasi proses pelaksanaan nominasi dan remunerasi agar tidak menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan.
6. Mengadakan pertemuan rutin para anggota Komite minimal 4 (empat) bulan sekali atau 3 (tiga) kali dalam setahun, masing-masing pertemuan dihadiri oleh minimal 2 (dua) anggota Komite yang salah satunya adalah Ketua Komite, dan membuat berita acara pertemuan.

Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi selama tahun buku 2016 telah sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.

### Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee has been established pursuant to the Board of Commissioners' Directive No.001/SK/ Kom-BLD 07 on the Establishment and Appointment of the Nomination and Remuneration Committee. In 2015, changes were made to the Committee's membership structure pursuant to the Board of Commissioners Directive No. 002/KOM-PERSEROAN/SKDK/VI/2015 on Changes to the Membership Structure of the Nomination and Remuneration Committee. Bakrieland has its own Charter for the Nomination and Remuneration Committee ratified on 5 June 2015 which governs on membership, duties, meetings and reporting obligations of the Committee.

### Duties and Responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee has the following duties and responsibilities:

1. Determining the selection criteria and nomination procedures for the members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and executives up to one level below the Board of Directors.
2. Developing an assessment system and making recommendations about the number of members in the Board of Commissioners and the Board of Directors.
3. Engaging in the recruitment process (interviews), and recommending candidates for the Board of Commissioners, the Board of Directors and executives up to one level below the Board of Directors, to ensure the right person ends up in the right position.
4. Making Recommendations about policies relating to salaries, allowances and bonuses for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors that are competitive and in line with market developments.
5. Overseeing the implementation of the nomination and remuneration functions to prevent breaches of procedure.
6. Holding meetings of Committee members at least every 4 (four) months or 3 (three) times a year, whereby each meeting should be attended by at least 2 (two) Committee members, one of whom is the Committee Chairperson, and ensuring that each meeting is documented in the meeting minutes.

Activities conducted by the Nomination and Remuneration Committee for 2016 are in compliance with the Charter of the Nomination & Remuneration Committee.

## Profil Komite Nominasi dan Remunerasi

## Nomination & Remuneration Committee Profile

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Latar Belakang Background
Kanaka Puradiredja	Ketua   Chairman	Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bakrieland Development Tbk No. 002/KOM-Perusahaan/SKDK/VI/2015 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi  PT Bakrieland Development Tbk Board of Commissioners' Directive No. 002/KOM-PERSEROAN/SKDK/VI/2015 of 5 June 2015	Keuangan   Finance
Bambang Irawan Hendradi	Anggota   Member		Teknik   Engineering
Elis Juniarti	Anggota   Member		Manajemen SDM HR Management

**Kanaka Puradiredja** – Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi  
Profil beliau telah disajikan dalam bab Profil Dewan Komisaris.

**Kanaka Puradiredja** – Nomination & Remuneration Committee Chairman  
His profile can be found in the chapter on the Profiles of the Board of Commissioners.

**Bambang Irawan Hendradi** – Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi  
Profil beliau telah disajikan dalam bab Profil Dewan Komisaris.

**Bambang Irawan Hendradi** – Nomination & Remuneration Committee Member  
His profile can be found in the chapter on the Profiles of the Board of Commissioners.

**Elis Juniarti**-Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi  
Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bakrieland Development Tbk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Bakrieland Development Tbk No. 002/KOM-PERSEROAN/SKDK/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015.

**Elis Juniarti**-Nomination & Remuneration Committee Member  
Appointed as Member of the Nomination and Remuneration Committee of PT Bakrieland Development Tbk in accordance with PT Bakrieland Development Tbk Board of Commissioners's Directive No. 002/KOMPERSEROAN/SKDK/VI/2015 of 5 June 2015.

Bergabung dengan PT Bakrieland Development Tbk sejak tahun 2011 dan menjabat sebagai Head of Talent Management (2011-2012), lalu sebagai Pjs. Chief Corporate Human Capital Officer (2012-2013), dan sebagai Chief Corporate Human Capital Officer (2013-sekarang).

Joined PT Bakrieland Development Tbk in 2011 and served as the Head of Talent Management (2011-2012), before appointed ad-interim Chief Corporate Human Capital Officer (2012-2013), and Chief Corporate Human Capital Officer (2013-present).

Sebelumnya beliau pernah berkarir sebagai Executive Search & Assessment Head TASS Consulting (2006-2011), HR Business Consulting Manager PT Concept Systems International/Concept Systems International Limited (2000-2005), dan Senior Consultant BTI Consultants Indonesia (1991-2000).

During her career, she has served as the Executive Search & Assessment Head TASS Consulting (2006-2011), HR Business Consulting Manager PT Concept Systems International/Concept Systems International Limited (2000-2005), and Senior Consultant BTI Consultants Indonesia (1991-2000).

**Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran****Meeting Frequency and Attendance**

No.	Tanggal Date	Kehadiran Attendance			Materi Agenda
		KP	IHS	EJ	
1	29 Maret 2016	√	√	√	Mengkaji kembali kebijakan remunerasi terkait pemberlakuan aturan BPJS Ketenagakerjaan mengenai Program Jaminan Pensiun dan BPJS Kesehatan mengenai Program Jaminan Kesehatan. Review the remuneration policies related to the application of the decree regarding BPJS Ketenagakerjaan Retirement Security Program and BPJS Kesehatan regarding Health Insurance Program.
2	14 Oktober 2016	√	√	√	Mengkaji kembali Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite di Bawah Dewan Komisaris PT Bakrieland Development Tbk, yang disesuaikan dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Review the Guidance for Directors, Board of Commissioners, and the Committees under the Board of Commissioners of PT Bakrieland Development Tbk, which is adjusted by the Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 34/POJK.04/2014 of the Nomination and Remuneration Committee of Public Company.
3	10 November 2016	√	√	√	Mengkaji kembali Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi PT Bakrieland Development Tbk, yang disesuaikan dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Review the Requirements and Procedure for Appointment and Dismissal of Directors of PT Bakrieland Development Tbk, which is adjusted by the Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 34/POJK.04/2014 of the Nomination and Remuneration Committee of Public Company.
<b>Total Kehadiran</b> Total Attendance		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
<b>Persentase Kehadiran Rapat</b> Percentage of Meeting Attendance		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	

**KP:** Kanaka Puradiredja, **IHS:** Bambang Irawan Hendradi, **EJ:** Elis Juniarti

**Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi**

Komite Nominasi dan Remunerasi menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan independen dan menghindari potensi terjadinya benturan kepentingan. Komite menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan para eksekutif, sampai dengan satu tingkat di bawah Direksi, serta tugas lainnya sesuai dengan ketentuan yang sudah ada.

**Kebijakan Suksesi Direksi**

Pengangkatan dan pemberhentian para anggota Direksi dilakukan oleh RUPS dimana anggota Direksi tersebut diangkat dari calon-calon yang diusulkan oleh para Pemegang Saham Perusahaan. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Selama jabatan seorang Direksi tersebut lowong oleh sebab apapun, untuk sementara Perusahaan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.

**Independence of the Nomination and Remuneration Committee**

The Nomination and Remuneration Committee performs its duties and responsibilities professionally and independently, and avoids any potential conflicts of interest. The Committee determines the selection criteria and the nomination procedures for the members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and executives up to one level below the Board of Directors. In addition, the committee performs other duties as outlined in existing policies.

**Succession Policy for the Board of Directors**

Members of the Board of Directors are appointed and dismissed by the GMS, at which they are elected from the candidates nominated by the Company's shareholders. If the position of one or more members of the Board of Directors is vacant, a GMS must be convened within 60 (sixty) days of the vacancy in order to fill it in accordance with the relevant legislation provisions and the Articles of Association. During the time in which the position of a Director is vacant, the Company is managed by a member of the Board of Commissioners appointed at a meeting of the Board of Commissioners. The length of service of a person replacing a member of the Board of Directors is for the remaining tenure of the members of the Board of Directors in office.

## Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi

Kepada Yth:  
Dewan Komisaris  
PT Bakrieland Development Tbk  
Wisma Bakrie 1, lantai 7  
Jalan HR. Rasuna Said Kav. B-1  
Jakarta 12920

Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016.

Komite Nominasi dan Remunerasi (“Komite”) bertugas untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris khususnya dalam hal perumusan sistem nominasi dan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ini disusun dengan mempertimbangkan ketentuan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada Pedoman Umum Good Corporate Governance (GCG) Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Adapun susunan keanggotaan Komite berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bakrieland Development Tbk No.002/KOM-PERSEROAN/SKDK/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi, yaitu menjadi sebagai berikut:

1. Kanaka Puradiredja  
Ketua/Komisaris Independen
2. Bambang Irawan Hendradi  
Anggota/Presiden Komisaris
3. Elis Juniarti  
Anggota/Chief Corporate Human Capital Officer

Selama tahun 2016, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali dengan kehadiran 100% seluruh anggotanya.

## Nomination And Remuneration Committee Report

To Our Distinguished Board Of Commissioners  
PT Bakrieland Development Tbk  
Wisma Bakrie 1, 7th Floor,  
HR. Rasuna Said Kav. B-1,  
Jakarta 12920

Annual Report on the Implementation of the Nomination and Remuneration Committee Activities for the Period Ended December 31, 2016.

The Nomination and Remuneration Committee (the “Committee”) has the responsibility to assist the implementation of the Board of Commissioners, in particular, to formulate a nomination and remuneration system for the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company. The system has been prepared by taking into account the provisions of the National Committee of Governance (NCG) on Indonesia’s Good Corporate Governance (GCG), General Guidelines and Regulation of the Financial Services Authority (FSA) No. 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Public Listed Companies.

The composition of the membership of the Committee, according to the Decree of the Board of Commissioners of PT Bakrieland Development Tbk No.002/KOM-COMPANY/SKDK/VI/2015, dated June 5, 2015 on the amendment of Membership Composition of the Nomination and Remuneration Committee, was as follows:

1. Kanaka Puradiredja  
Chairman/Independent Commissioner
2. Bambang Irawan Hendradi  
Member/President Commissioner
3. Elis Juniarti  
Member/Chief Corporate Human Capital Officer

During 2016, the Nomination and Remuneration Committee held 3 meetings with 100% attendance of all its members.

Adapun pokok bahasan dalam rapat-rapat tersebut diantaranya adalah:

- Mengkaji kembali kebijakan remunerasi terkait pemberlakuan aturan BPJS Ketenagakerjaan mengenai Program Jaminan Pensiun dan BPJS Kesehatan mengenai Program Jaminan Kesehatan.
- Mengkaji kembali Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite di Bawah Dewan Komisaris PT Bakrieland Development Tbk yang kami atur dalam rangka disesuaikan dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- Mengkaji kembali Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi PT Bakrieland Development Tbk, yang disesuaikan dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Selain itu, pada tahun 2016, total kompensasi remunerasi yang dibayarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebesar Rp13.316.093.497,- (Tiga Belas Miliar Tiga Ratus Enam Belas Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).

Jakarta, 5 Januari 2017

The subjects of these meetings included the following:

- Re-examine remuneration policy related to the enactment of BPJS Employment regulation on the Retirement Security Program and BPJS Healthcare regulation regarding the Health Insurance Program.
- Re-assess Guideline for Board of Directors, Board of Commissioners, and the Committees Under the Board of Commissioners of PT Bakrieland Development Tbk, which were reviewed in order to be adjusted to the Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Public Listed Companies.
- Re-assess Terms and Procedures for the Appointment and Termination of the Board of Directors of PT Bakrieland Development Tbk, which is adjusted to the Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Public Listed Companies.

In addition, in 2016, the total compensation or remuneration paid to the Board of Commissioners and Directors amounted to Rp13,316,093,497,- (Thirteen Billion Three hundred Sixteen Million, Ninety Three Thousand Four Hundred Ninety-seven Rupiah).


Jakarta, January 5 2017



**Kanaka Puradiredja**  
Ketua  
Chairman



**Bambang Irawan Hendradi**  
Anggota  
Member



**Elis Juniarti**  
Anggota  
Member

## Direksi

Direksi adalah organ tata kelola yang menjalankan kegiatan pengelolaan perusahaan dalam bidang operasional dan finansial, serta pihak yang bertanggung jawab dalam memutuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan perusahaan. Seluruh anggota Direksi Bakrieland telah memenuhi persyaratan formal dan material yang berlaku. Persyaratan formal bersifat umum, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan persyaratan material bersifat khusus, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis Perusahaan.

## Board of Directors

The Board of Directors is a corporate governance organ responsible for the management of the Company in operational and financial matters, and for setting and implementing corporate policies. All members of Bakrieland's Board of Directors have met both formal and material requirements of appointment. Formal requirements are general in nature in accordance with the prevailing legislation, whereas material requirements are more specifically tailored to the Company's business needs and characteristics.

### Struktur Direksi per 31 Desember 2016

Structure of the Board of Directors as of 31 December 2016

No.	Nama Name	Jabatan Position	Periode Jabatan Tenure
1	Ambono Janurianto	Presiden Direktur & CEO President Director & CEO	2015-2018
2	Agus Jayadi Alwie	Direktur & Chief Development Officer Director & Chief Development Officer	2015-2018
3	Charles Marc Dressler	Direktur Independen Independent Director	2015-2018

## Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab

Sebagaimana tercantum dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas, tugas utama Direksi adalah menjalankan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan. Di lingkungan Perusahaan, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh baik secara pribadi maupun bersama atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan terbukti bersalah atau lalai.

Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perusahaan melalui pengelolaan risiko dan pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik pada seluruh jenjang organisasi. Tanggung jawab Direksi juga mencakup penerapan struktur pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal, dan pengambilan tindakan berdasarkan temuan-temuan Corporate Internal Audit sesuai dengan arahan Dewan Komisaris.

Direksi wajib menyusun strategi bisnis, termasuk rencana kerja dan anggaran serta pelaksanaan praktik akuntansi dan pembukuan sesuai ketentuan Perusahaan publik. Selain itu, Direksi harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas Direksi, maka pembagian tugas Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi, sebagai berikut:

1. Ambono Janurianto (President Director & CEO) bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional.
2. Agus Jayadi Alwie (Director & Chief Development Officer) bertanggung jawab atas bidang corporate strategy & development.

## Scope of Work and Responsibilities

As stipulated in Law No. 40/2007 on Limited Liability Companies, the Board of Directors is primarily responsible for managing the Company in accordance with its corporate objectives and goals. Each member of the Board of Directors shall take full responsibility, both personally and collectively, over Company losses if the person concerned is proven guilty of negligence.

The Board of Directors is responsible for the management of the Company through effective risk management and ensuring good corporate governance at all organizational levels. Such responsibilities cover the implementation of internal control structures and internal audit functions, and taking the necessary actions, based on corporate internal audit findings, as directed by the Board of Commissioners.

The Board of Directors must develop a business strategy, including work and budget plans, and implement accounting and bookkeeping practices that adhere to policies related to public companies. Furthermore, the Board of Directors is accountable to the shareholders through GMS for the implementation of its duties and responsibilities. If the GMS does not provide the Board of Directors with a clear job description, the Board shall determine its own duties. The duties of the current Board of Directors are:

1. Ambono Janurianto (President Director & CEO) responsible for operational activities.
2. Agus Jayadi Alwie (Director & Chief Development Officer) responsible for corporate strategy & development.



3. Charles Marc Dressler (Independent Director) bertanggung jawab atas bidang corporate services.

### Rapat Direksi

Kebijakan mengenai rapat Direksi diatur dalam Pedoman Dewan yang berlaku di Bakrieland yang disahkan dengan Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris PT Bakrieland Development Tbk, No. 001/KOM-DIR-PERSEROAN/SK/I/2016, yang menyatakan bahwa Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.

Sepanjang 2016, Direksi menyelenggarakan 13 kali rapat, dengan agenda sebagai berikut:

### Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Meeting Frequency and Attendance

No.	Tanggal Date	Kehadiran Attendance			Materi Agenda
		AJ	AJA	MD	
1	11 January 2016	√	√	√	Laporan Tahunan Bakrieland 2015 Annual Report Bakrieland 2015
2	1 February 2016	√	√	√	Unit Business Performance Review Unit Business Performance Review
3	3 February 2016	√	√	√	Unit Business Performance eview Unit Business Performance Review
4	1 Ma 2016	√	√	√	Restructuring Equity-Linked Bonds (ELB) and Others Restructuring Equity-Linked Bonds (ELB) and Others
5	13 April 2016	√	√	√	Progress in Completion of Financial Reports as of 31 December 2015 and Others Progress in Completion of Financial Reports as of 31 December 2015 and Others
6	18 April 2016	√	√	√	Business Performance Unit Review Quarter I 2016 Business Performance Unit Review Quarter I 2016
7	25 April 2016	√	√	√	Business Performance Unit Review Quarter I 2016 Business Performance Unit Review Quarter I 2016
8	8 Agustus 2016	√	√	√	Business Performance Unit Review Semester I 2016 Business Performance Unit Review Semester I 2016
9	10 Agustus 2016	√	√	√	Business Performance Unit Review Semester I 2016 Business Performance Unit Review Semester I 2016
10	10 Oktober 2016	√	√	√	Budget 2017 Preparation Budget 2017 Preparation
11	21 November 2016	√	√	√	Materials for Annual Public Expose 2016 Materials for Annual Public Expose 2016
12	19 Desember 2016	√	√	√	Bakrieland Budget and Business Plan 2017 Bakrieland Budget and Business Plan 2017
13	22 December 2016	√	√	√	Laporan Tahunan Bakrieland 2016 Annual Report Bakrieland 2016

AJ: Ambono Janurianto, AJA: Agus Jayadi Alwie, MD: Charles Marc Dressler

3. Charles Marc Dressler (Independent Director) responsible for corporate services.

### Meetings of the Board of Directors

Board of Directors' meetings are governed in the Board Manual which Bakrieland has established and ratified through PT Bakrieland Development Tbk Board of Directors and Commissioners' Directive No. 001/KOM-DIR-PERSEROAN/SK/I/2016 which stipulates that the Board of Directors is required to periodically convene its board meetings at least once a month. The Board of Directors must also hold meetings with the Board of Commissioners at least once in 4 (four) months. The Board of Directors meeting is declared valid and decisions made are binding if more than ½ (half) of board members are present or represented in the meeting.

In 2016, the Board of Directors has held 13 meetings with the following agendas:

## Komite dan Satuan Kerja Direksi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengelola perusahaan, Direksi dibantu oleh 2 (dua) satuan kerja dan 1 (satu) komite, yaitu:

1. Satuan Kerja Audit Internal yang berfungsi untuk memantau dan memastikan aktivitas pengendalian internal berjalan dengan baik.
2. Satuan Kerja Manajemen Risiko berfungsi untuk memastikan bahwa kerangka kerja pengelolaan risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap risiko Perusahaan.
3. Komite/Panitia Tender, untuk memberikan penilaian objektif atas calon rekanan dalam proses tender pengadaan barang dan/atau jasa.

## Rapat Gabungan Direksi dan Komisaris

Sepanjang 2016, Direksi menyelenggarakan 6 kali rapat bersama Dewan Komisaris. Berikut ini agenda rapat tersebut:

## Committees and Units under the Board of Directors

In fulfilling its managerial duties and responsibilities, the Board of Directors is supported by 2 (two) work units and 1 (one) committee:

1. Internal Audit Unit in monitoring and ensuring the smooth implementation of internal control activities.
2. Risk Management Unit in ensuring that the risk management framework provides adequate protection against corporate risks.
3. Tender Committee in objectively assessing potential business associates and vendors during the tendering process to procure goods and/or services.

## Joint Meetings of the Boards of Directors and Commissioners

In 2016, the Board of Directors has convened 6 joint meetings with the Board of Commissioners. The meeting agendas were as follows:

No.	Tanggal Date	Hari Day	Materi Agenda	Kehadiran Attendance					
				HIS	KP	AY	AJ	AJA	MD
1	28-Mar-16	Senin Monday	Laporan Komite Audit Mengenai Penyelesaian Audit LapKeu BLD Konsolidasi, diharapkan Direksi dapat memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini Audit Committee Report on the Completion of the Audit of the BLD Consolidated Financial Report, the Board of Directors is expected to pay special attention to this matter	√	√	√	√	√	√
2	17-May-16	Selasa Tuesday	Progress Laporan Keuangan Desember 2015 & Maret 2016 Progress of Financial Report December 2015 & March 2016  Issues Lainnya Other Issues	-	√	√	√	√	√
3	2-Aug-16	Selasa Tuesday	1. Progress Laporan Keuangan Desember 2015 & Maret 2016 Progress of Financial Report December 2015 & March 2016 2. Rencana Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun 2016 Annual GMS Implementation Plan for 2016	√	√	-	√	√	√
4	26-Sep-16	Senin Monday	Rencana Pelaksanaan RUPS Tahunan 2016 PT BLD Tbk Annual GMS Implementation Plan of PT BLD Tbk for 2016	-	√	√	√	√	√
5	20-Nov-16	Selasa Tuesday	Budget dan Business Plan BLD 2017 BLD Budget and Business Plan for 2017	-	√	-	√	√	√
6	20-Dec-16	Selasa Tuesday	Budget dan Business Plan BLD 2017 BLD Budget and Business Plan for 2017	-	√	-	√	√	√

IHS: Bambang Irawan Hendradi, KP: Kanaka Puradiredja, AY: Armansyah Yamin, AJ: Ambono Janurianto, AJA: Agus Jayadi Alwie, MD: Charles Marc Dressler

## Program Pelatihan Direksi

Selama tahun 2016, tidak ada program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Direksi yang diselenggarakan di lingkungan Bakrieland. Direksi mengikuti program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi dengan inisiatif pribadi diluar lingkungan Bakrieland.

## Training Programs for the Board of Directors

In 2016, no training and competency development programs for the Board of Directors were held within Bakrieland. The Board of Directors participated in such programs on their own initiative outside of Bakrieland.

### Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi

1. Setiap Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan.
2. Tunduk pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta memastikan seluruh aktivitas Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS.
3. Memimpin dan mengurus Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan dan senantiasa berusaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perusahaan.
4. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan.
5. Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perusahaan dalam mencapai visi, misi dan tujuan Perusahaan.
6. Mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
7. Melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengurusan maupun pemilikan serta mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan atau pihak lain dengan Perusahaan, dengan pembatasan tertentu.
8. Menyiapkan susunan organisasi pengurus Perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya.
9. Menerapkan Good Corporate Governance secara konsisten.
10. Wajib menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Khusus sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
11. Bertanggung jawab secara pribadi atas kesalahan dan kelalaiannya dalam menjalankan tugas.

### Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bakrieland tidak ada yang memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal kekeluargaan, finansial dan bisnis antar sesama anggota Direksi, antar sesama anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali. Hal ini dinyatakan melalui Surat Pernyataan Tidak Memiliki Benturan Kepentingan yang telah ditandatangani oleh Direksi untuk masa jabatan pada 2016.

### Board Manual and Work Rules

1. Each member of the Board of Directors must carry out their duties in good faith, and in the best interest of the Company and its business operations.
2. Comply with existing laws and regulations, Articles of Association and GMS resolutions, and ensure that all Company activities are consistent with the prevailing legislation, Articles of Association and GMS resolutions.
3. Lead and manage the Company in accordance with corporate objectives and goals, and consistently work to improve corporate efficiency and effectiveness.
4. Control, maintain and manage Company assets.
5. Take full responsibility of implementing duties in the Company's best interest in order to achieve its corporate vision, mission and goals.
6. Represent the Company in and out of court.
7. Take all the necessary actions and measures regarding the management, ownership and others that binds the Company with other parties, or other parties with the Company, with certain limitations.
8. Prepare the organizational structure of the Company's managing boards, complete with detailed job descriptions.
9. Apply the principles of good corporate governance.
10. Develop and maintain a Special Register in compliance with existing rules and regulations.
11. Personally be responsible for any mistake or act of negligence in performing their duties.

### Affiliations with Members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the Controlling Shareholders

None of the members of Bakrieland's Board of Commissioners and Board of Directors has any familial, financial or business affiliations with fellow members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and the Controlling Shareholders. This is documented in the Statement of No Conflict of Interest signed by the members of the Board of Directors for the 2016 term of office.

## Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

### Prosedur Penilaian Kinerja

Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPST berdasarkan pelaksanaan tugas dan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Penilaian kinerja komite di bawah Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan pencapaian tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan Dewan Komisaris, yang akan memberikan penilaian satu tahun sekali sebelum RUPST diadakan.

### Kriteria Penilaian Kinerja

Tata cara penilaian keberhasilan Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite dilakukan dengan menggunakan Key Performance Indicator (KPI) yang disusun bersama-sama dalam suatu rapat Dewan Komisaris yang terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan diputuskan oleh Dewan Komisaris. Aspek KPI dapat meliputi, tetapi tidak terbatas pada perspektif keuangan, pelanggan, proses internal, pengembangan sumber daya manusia, dan kepemimpinan. Penetapan KPI harus memenuhi kriteria Specific, Measurable, Accurate, Reliable dan Timeline (SMART).

Komponen yang tercantum dalam KPI berfokus pada sasaran kerja yang dicapai dalam periode tertentu sesuai rencana dan target kerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan. Oleh karena itu, KPI menjadi tolok ukur dan bahan evaluasi keberhasilan kinerja Dewan Komisaris, Direksi dan Komite di akhir periode anggaran untuk mencapai tujuan Perusahaan. KPI senantiasa dikaji ulang secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan perusahaan sehingga tetap relevan terhadap implementasinya. Prosedur dan penetapan penyusunan KPI diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris.

Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite secara keseluruhan dan kinerja perorangan setiap anggota merupakan bagian tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif. Hasil evaluasi kinerja perorangan merupakan salah satu dasar pertimbangan untuk memberhentikan dan/atau menunjuk kembali anggota, serta berfungsi sebagai sarana penilaian dan peningkatan efektivitas. Tata cara evaluasi kinerja Direksi, Dewan Komisaris, dan komite di bawah Dewan Komisaris diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No.198/Kom-BLD SK/XII/09.

## Performance Evaluation of the Board of Commissioners and the Board of Directors

### Performance Evaluation Procedure

The performance of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors— as set out in the Company's Articles of Association—is evaluated by the Shareholders at the Annual GMS. The performance of the duties and responsibilities of the committees under the Board of Commissioners, on the other hand, is evaluated by the Board of Commissioners once a year prior to the Annual GMS.

### Performance Evaluation Criteria

The effectiveness of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the Committees is evaluated with the use of Key Performance Indicators (KPI) developed in a Board of Commissioners' meeting along with the Board of Directors, and the Nomination and Remuneration Committee, with the Board of Commissioners responsible for the final decision. KPI includes, but is not limited to, aspects such as finance, customers, internal processes, and human resources development and leadership. During the establishments of KPI, the SMART (Specific, Measurable, Accurate, Reliable and Timely) criteria must be taken into account.

Components of KPI focus on goals achieved within a specified period of time in keeping with the work plan and targets laid out in the Annual Work and Budget Plan. KPI, therefore, serves as a benchmark to help evaluate the performance of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the Committees, at the end of the budget period, for the purpose of achieving Company objectives and goals. To remain relevant, KPI are regularly reviewed to reflect any Company developments. The setting of the KPI is also governed by the directives of the Board of Commissioners.

The evaluation of the overall performance of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the Committees, as well as the individual performance of each member, form an inseparable part of the Company's compensation and incentive scheme. The results of individual performance evaluations are taken into consideration before dismissing and/or reappointing a member, and serve as a tool for assessing and improving effectiveness. The procedure for evaluating the performance of the Board of Directors, the Board of Commissioners and the Committees under the Board of Commissioners is set out in the Board of Commissioners' Directive No.198/Kom-BLD SK/XII/09.

## Program Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Setiap tahun, Dewan Komisaris dan Direksi membuat Surat Pernyataan Kepemilikan Saham dan dimuat dalam Laporan Tahunan Perusahaan. Surat pernyataan tersebut menyatakan jumlah lembar saham yang dimiliki anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi beserta keluarga (istri dan anak). Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi beserta keluarga per 31 Desember 2016 tidak memiliki saham pada Bakrieland dan perusahaan lain.

## Pernyataan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi

Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib menandatangani Surat Pernyataan Rangkap Jabatan guna memenuhi prinsip independensi dan transparansi dalam GCG. Surat tersebut berisi pernyataan bahwa untuk masa satu jabatan pada satu tahun tidak menjabat sebagai Direktur, Komisaris di Perusahaan lain di luar Perusahaan dan anak Perusahaan/afiliasinya. Seluruh anggota Direksi Bakrieland telah menandatangani surat pernyataan untuk masa jabatan pada 2016.

## Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Perusahaan tidak memiliki kebijakan yang secara khusus mengatur keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi baik dalam hal pendidikan, pengalaman kerja, usia dan jenis kelamin. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan sesuai dengan Pedoman Dewan.

## Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi menerima imbalan jasa dalam bentuk gaji, tunjangan, dan fasilitas. Sesuai Anggaran Dasar Bakrieland, remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan melalui RUPS. Besaran remunerasi ditetapkan dengan memperhatikan besaran penghasilan tahun-tahun sebelumnya, bebas tugas dan tanggung jawab, serta disesuaikan dengan tingkat remunerasi eksekutif pada industri sejenis. Bakrieland telah memiliki Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 006/KOM-BLD/SK/XII/2011, yang mengatur mengenai prosedur remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris. Surat Keputusan ini merupakan penyempurnaan dari Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 19/Kom-BLD/SK/XII/09.

## Share Ownership Program for the Board of Directors and the Board of Commissioners

Each year, the Board of Commissioners and the Board of Directors prepare a Statement of Share Ownership, which is then published in the Company's Annual Report. The statement documents the number of shares owned by each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as members of their families (spouses and children). None of the members of the Boards of Commissioners and Directors, or their families, own any shares in Bakrieland or other companies as of 31 December 2016.

## Statement of Concurrent Positions of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors is expected to sign a Statement of Concurrent Positions as a part of fulfilling the GCG requirements of independence and transparency. In the document, the signee states that he or she has not held the position of a Director or a Commissioner in a business entity other than the Company, or its Subsidiaries/affiliates, during their one year term of office at the Company. All members of Bakrieland's Board of Directors have signed the statement for the 2016 term of office.

## Policy on the Diversity of the Composition of the Board of Commissioners and to the Board of Directors

The Company does not have a policy that exclusively regulate the diversity of the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors in terms of education, work experience, age, and gender. Appointment of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors conducted in accordance with the Board Manual.

## Remuneration Policy of the Board of Commissioners and the Board of Directors

The Board of Commissioners and the Board of Directors receive compensation for services rendered, in the form of salary, allowance and bonuses. In accordance with Bakrieland's Articles of Association, the remuneration is set by the GMS. Considerations taken into account when determining the amount of remuneration include the amount of income received in previous years, and the scope of duties and responsibilities. The salary is adjusted to the remuneration rate of executives in the same industry. Bakrieland's Board of Commissioners' Directive No. 006/KOM-BLD/SK/XII/2011 governs the remuneration procedure for the Board of Directors and the Board of Commissioners. The Directive is an amended version of the earlier Board of Commissioners' Directive No. 19/Kom-BLD/SK/XII/09.

**Tabel Remunerasi Karyawan Perorangan**  
Table Remuneration of Individual Employees

Komponen Remunerasi Remuneration Component	2015		2016	
	Tertinggi Highest	Terendah Lowest	Tertinggi Highest	Terendah Lowest
Gaji (Rp)/Tahun Salary (Rp)/year	849.655.040	19.302.000	849.655.040	30.000.000
Tunjangan (Rp)/Tahun Benefits (Rp)/year	389.803.840	12.600.000	389.803.840	14.100.000
Total	1.239.458.880	31.902.000	1.239.458.880	44.100.000

Pada 2016, Dewan Komisaris menerima remunerasi sebesar Rp4.240.626.000 dan Direksi menerima remunerasi sebesar Rp9.075.467.497.

In 2016, the Board of Commissioners received remuneration totaling Rp 4,240,626,000, while the Board of Directors received remuneration totaling Rp9,075,467,497.

### Kebijakan Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Untuk mengatur hal ini, maka tanggal 8 Juni 2009 diterbitkan SK Direksi dan Dewan Komisaris Bakrieland No. 079/DIR-KOM/SK/VI/09 tentang Benturan Kepentingan. Kebijakan Benturan Kepentingan memuat panduan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi agar dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mendahulukan kepentingan ekonomis Perusahaan dan tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, keluarga dan pihak-pihak lain. Selain itu, kebijakan ini juga mengatur pemberian dan penerimaan hadiah dan donasi, kegiatan sampingan, dan kerahasiaan informasi.

### Conflict of Interest Policy

Conflict of interest refers to a situation where there is a conflicting economic interest between the Company and individual shareholders, or members of the Board of Commissioners and the Board of Directors. To address this issue, the Directive of Bakrieland's Board of Directors and Board of Commissioners No. 079/DIR-KOM/SK/VI/09 on Conflicts of Interest was issued on 8 June, 2009. The Conflict of Interest Policy guides members of the Board of Commissioners and the Board of Directors to perform their duties and responsibilities in a manner that prioritizes the Company's economic interest, and ensures that they do not abuse their position and power for personal interest and gain, or the interest and gain of their families or other parties. The policy also regulates the offering and acceptance of gifts and donations, side jobs and confidentiality of information.

Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi setiap tahunnya menandatangani Surat Pernyataan Benturan Kepentingan. Surat tersebut berisi pernyataan, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Tidak menerima atau memberikan suatu hal dalam bentuk apapun kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi independensi.
2. Tidak ikut serta dalam proses pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan oleh pemegang saham independen Perusahaan.
3. Mendahulukan kepentingan ekonomis Perusahaan di atas kepentingan ekonomis pribadi, keluarga, dan pihak lainnya. Jika di kemudian hari mengalami situasi dimana terdapat benturan kepentingan, maka anggota Dewan Komisaris dan Direksi akan menarik diri untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bakrieland telah menandatangani Surat Pernyataan Benturan Kepentingan untuk masa jabatan tahun 2016.

Each members of Bakrieland's Board of Commissioners and Board of Directors have to signa Statement of No Conflict of Interest on annual basis. The document contains statements, including, but not limited to, the following:

1. Does not accept anything from another party that may influence their independence or offer anything to another party that may influence their independence.
2. Does not participate in the decision-making processes that contains elements of conflict of interest by the Company's independent shareholders.
3. Prioritizes the Company's economic interest over personal gain, and that of their families or other parties. If a situation arises where a conflict of interest is present, the member of the Board of Commissioners or the Board of Directors shall withdraw from any involvement in the decision-making process. All members of Bakrieland's Board of Commissioners and Board of Directors have signed a Statement of No Conflict of Interest for the term of office of 2016.

### Akuntan Publik

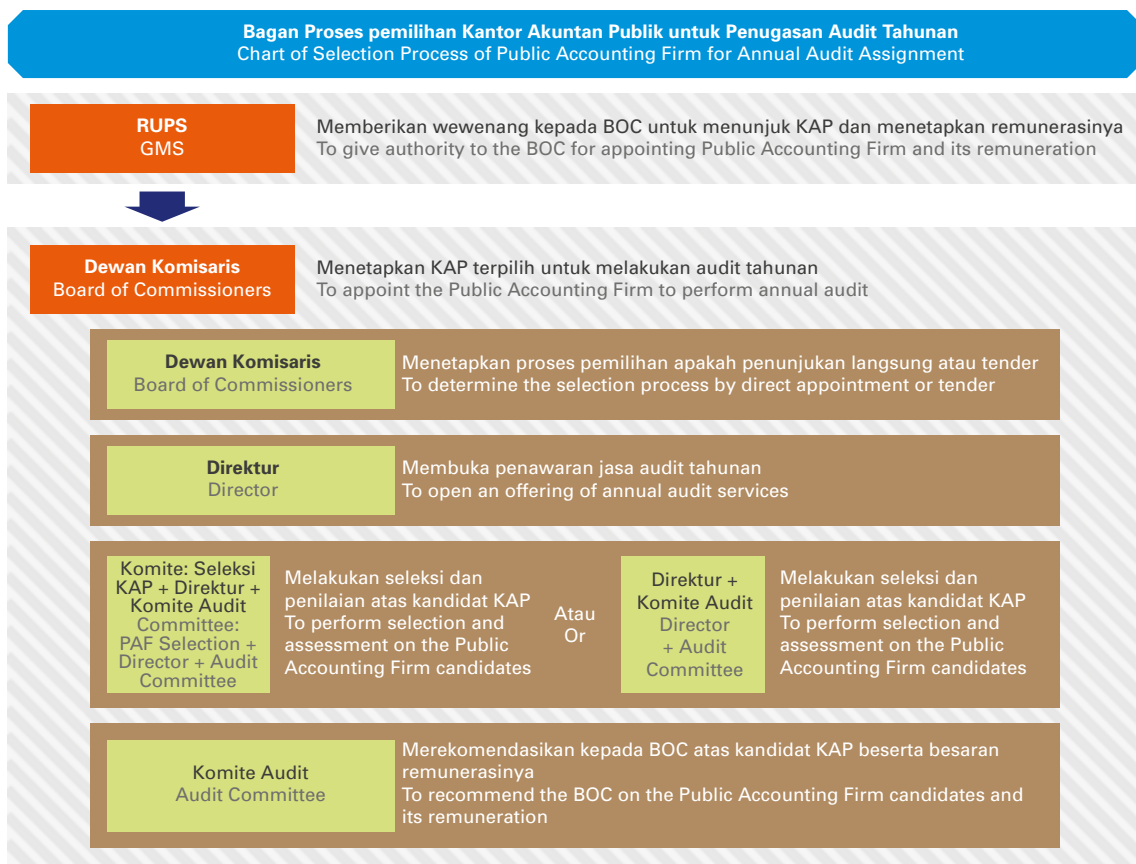
Perusahaan memiliki Kebijakan Pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Penugasan Audit Tahunan sejak 2011. Kebijakan tersebut disusun sesuai dengan Peraturan OJK dan Menteri Keuangan RI yang mengatur mengenai independensi akuntan yang memberikan jasa audit di pasar modal, laporan keuangan yang disampaikan kepada OJK wajib diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK, serta jasa Akuntan Publik. Pada 2012, Perusahaan melakukan penyempurnaan untuk lebih meningkatkan objektivitas proses pemilihan KAP.

### Public Accountant

Since 2011, the Company has had a Policy that guides the Selection of Public Accounting Firms (KAP) to perform Annual Audit Assignments. The policy was introduced pursuant to regulations issued by OJK, and the Finance Minister, on the independence of accountants who provide audit services in the capital market, whereby financial statements submitted to OJK must be audited by an accountant registered with OJK and on services rendered by a public accountant. In 2012, the Company made the necessary changes to enhance the impartiality of the selection process of public accounting firms.

#### Bagan Pemilihan KAP

#### Diagram KAP Selection



Kebijakan Pemilihan KAP menjadi pedoman pokok dalam melakukan pemilihan KAP yang melakukan audit atas laporan keuangan tahunan untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan independensi atas proses tersebut. Kebijakan tersebut mengatur siapa saja pihak yang terkait dalam proses pemilihan, aspek penilaian beserta persyaratan dan kriterianya. Nama dan Tahun Akuntan Publik yang melakukan Audit Laporan Keuangan Tahunan selama 5 tahun terakhir:

The KAP Selection Policy provides key guidelines for selecting KAP responsible for auditing annual financial statements in order to ensure that the process is transparent, accountable and independent. The policy governs the parties involved in the selection process, as well as other aspects related to the evaluation, including requirements and selection criteria. The Public Accounting Firms that performed the Company’s annual financial audit in the past 5 years are listed below:

Tahun Year	Nama Name	KAP KAP
2012	A. Kristianto Wahyu I., M.Si., CPA	Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan
2013	Meilyn Soetiono, SE, Ak., CPA	Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan
2014	Meilyn Soetiono, SE, Ak., CPA	Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan
2015	Benny Jayawardaya, M. Ak., CPA	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan
2016	Benny Jayawardaya, M. Ak., CPA	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan

Secara prosedur, penetapan KAP diawali melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk KAP serta remunerasinya. Dalam prosesnya, Dewan Komisaris menetapkan proses pemilihan dengan sistem tender.

Komite Seleksi memberikan penilaian dan hasil opini atas kandidat KAP. Setelah itu, Komite Audit merekomendasikan KAP yang dipilih kepada Dewan Komisaris beserta dengan besaran remunerasi yang akan diberikan di tahun buku. Selanjutnya, persetujuan Dewan Komisaris diserahkan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti. Pada 2016, KAP yang ditunjuk telah 6 kali melakukan audit Laporan Keuangan dan tidak memberikan jasa lain di luar jasa audit laporan keuangan tahunan. Biaya yang dikeluarkan untuk jasa audit adalah Rp3.280.000.000. Hasil opini KAP atas laporan keuangan tahunan Perusahaan pada 2016 adalah Wajar Tanpa Pengecualian.

## Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Perusahaan juga memiliki Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa untuk menciptakan suatu sistem pengadaan yang andal dimana barang dan/atau jasa diadakan sesuai dengan kebutuhan operasional, proses yang berlaku, dilaksanakan tepat waktu, terkendali dan dengan biaya yang wajar. Kebijakan ini berlaku efektif sejak 2011.

Kebijakan ini diterbitkan agar menjadi panduan bagi karyawan Perusahaan dalam melaksanakan dan mengelola kegiatan pengadaan di Perusahaan secara efektif dan efisien sesuai peraturan yang berlaku dan mengacu pada prinsip GCG. Kebijakan ini antara lain mengatur prinsip umum pengadaan, kategori barang dan/atau jasa, metode pengadaan, pengaturan penerbitan kontrak/perjanjian. Di dalam kebijakan ini setiap calon rekanan diharuskan melampirkan dokumen Pakta Integritas Eksternal, yang antara lain berisi:

- Pernyataan untuk menghindari praktik benturan kepentingan.
- Pernyataan untuk melaporkan apabila mengetahui adanya indikasi benturan kepentingan.
- Pernyataan larangan pemberian hadiah atau hiburan lainnya kepada karyawan Perusahaan yang berhubungan dengan pengadaan proyek/ pekerjaan.

In terms of procedure, the KAP selection process is preceded by a GMS, during which the Board of Commissioners is handed the power to appoint a KAP and determine their remuneration. The Board of Commissioners then determines the selection process through a tendering mechanism.

The Selection Committee provides advice about the assessment results and the potential KAPs. The Audit Committee then recommends the selected KAP to the Board of Commissioners and the amount of remuneration they should be awarded during the fiscal year. The Board of Commissioners subsequently hands over its approval to the Board of Directors for a follow up. In 2016, the appointed KAP audited financial reports on 6 occasions, issuing an unqualified opinion, and did not provide any services other than the audit of the Company's annual financial statements. The Company's audit fees totaled Rp3,280,000,000.

## Goods and/or Services Procurement Policy

The Company has introduced its own Goods and/or Service Procurement Policy in 2011 to develop a reliable procurement system that ensures the availability of goods and/or services that matches the Company's operational needs, complies with existing mechanisms, is well-managed and at a reasonable cost. This policy has been in effective since 2011.

The policy guides the employees' implementation and management of procurement activities to ensure that they are effective and efficient, and adheres to the prevailing regulations and GCG principles. The policy, inter alia, governs the basic principles of procurement, categorization of goods and/or services, procurement methods, and issuance of contracts or agreements. According to the policy, every potential business associate must enclose an External Integrity Pact that, among others, contains the following:

- Statement that any potential conflict of interest will be avoided.
- Statement that any potential conflict of interest will be reported.
- Statement that no gifts, or any other form of offerings, will be given to the Company's employees that might relate to the awarding of projects/work.



- d. Pernyataan untuk mengikuti proses pelelangan yang mengacu kepada prinsip keadilan (fair competition).
- e. Pernyataan untuk memberikan informasi yang akurat dan benar kepada pihak Bakrieland.
- f. Pernyataan untuk tidak memberikan atau memberitahukan (menyebarkan/ membocorkan) informasi yang bersifat rahasia mengenai Bakrieland.

### Kebijakan Email

Kebijakan e-mail bertujuan untuk mengatur penggunaan seluruh email di lingkungan Bakrieland dengan domain [www.bakrieland.com](http://www.bakrieland.com) dalam hal pengiriman dan penerimaan email, serta keamanan penggunaan dan pengawasan email. Kebijakan yang berlaku efektif sejak 2011 ini mengatur ketentuan penggunaan email untuk kepentingan perusahaan dan pribadi, pembuatan dan penghapusan akun email, informasi rahasia, risiko hukum, serta sistem pengawasan email.

Tujuan penerbitan kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memastikan penggunaan yang tepat dari sistem email Bakrieland.
- b. Membuat karyawan Bakrieland menyadari komponen-komponen yang dapat diterima dan tidak dapat diterima pada sistem email Bakrieland.

### Kebijakan Pengelolaan dan Backup Data

Perusahaan menerbitkan kebijakan atas pengelolaan dan *backup* data sebagai upaya pencegahan atas potensi terjadinya kehilangan dokumen digital, data dan informasi penting lainnya. Oleh sebab itu, Perusahaan mengantisipasi risiko kehilangan data dengan menempatkan *back up data* pada ruang sentral yang terjaga dengan aman. Untuk lebih memastikan pengelolaan data yang baik dan pengoptimalan manfaat sistem *backup data* yang telah diimplementasikan di Bakrieland, maka disusunlah Kebijakan Pengelolaan dan Backup Data yang disahkan melalui SK Direksi No. 024/DIRPerusahaan/SKD/XII/2012.

### Laporan Publikasi Pembayaran Pajak 2016

Perusahaan dan Anak Perusahaan telah terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak dan Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan domisili masing-masing perusahaan. Perusahaan sebagai wajib pajak, turut menunaikan kewajiban perpajakan yang dilakukan selama 2016 dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Pajak Penghasilan Pasal 21/26
- b. Pajak Penghasilan Pasal 23/26
- c. Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)
- d. Pajak Penghasilan Pasal 25/29
- e. Pajak Pertambahan Nilai
- f. Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- g. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- h. Pajak Bumi dan Bangunan

### Email Policy

The Company's email policy regulates the use of email within Bakrieland through the [www.bakrieland.com](http://www.bakrieland.com) domain, including sending and receiving emails, ensuring email security, and monitoring email correspondence. The policy, which came into effect in 2011, contains provisions on email usage for corporate and personal purposes, the creation and deletion of email accounts, confidential information, legal risks and the email monitoring system.

The policy was issued for the following purposes:

- a. To ensure the appropriate use of Bakrieland's email system.
- b. To build awareness among Bakrieland employees of what is, and what is not, acceptable when it comes to the Company's email system.

### Data Management and Backup Policy

The Company has a data management and backup policy to prevent accidental loss of digital documents, data or other vital information. To anticipate the risk of data loss, the Company stores its backup data in a central server in a safe and secure location. To further ensure effective data management and optimal use of Bakrieland's backup data system, a policy on data management and backup was approved by Directive No. 024/DIRPerusahaan/SKD/XII/2012.

### Tax Payment Report in 2016

The Company and the Subsidiaries are registered as tax payers with the Tax Office and the Local Revenue Office in accordance with the place of domicile of the respective entities. As a tax payer, the Company fulfilled its tax obligations in 2016 in the following tax classifications:

- a. Income Tax Article 21/26
- b. Income Tax Article 23/26
- c. Income Tax Article 4 (2)
- d. Income Tax Article 25/29
- e. Value-Added Tax
- f. Sales Tax on Luxury Goods
- g. Local Tax and Levy
- h. Land and Buildings Tax

## Manajemen Risiko

Sistem manajemen risiko merupakan rangkaian prosedur dan proses pengidentifikasian risiko usaha, analisis potensi terjadinya risiko usaha, penerapan langkah mitigasi yang tepat guna dan tepat sasaran serta evaluasi dari efektivitas penerapan manajemen risiko. Pengelola sistem manajemen risiko adalah fungsi kerja Corporate Risk Management & Compliance (RMC) yang secara berkala melakukan koordinasi dengan Anak Perusahaan, termasuk membahas efektivitas manajemen risiko dan kepatuhan di lingkungan Perusahaan.

Selain menjadi fasilitator dalam melakukan koordinasi, RMC juga berfungsi untuk memantau implementasi tata kelola perusahaan, Penyusun dan Reviewer Kebijakan, pengelola Task Monitoring System (TMS), serta pengelolaan Sistem Manajemen Mutu yang ditetapkan Perusahaan.

## Profil Risiko Usaha

### Risiko Internal

#### Risiko Keuangan | Financial Risk

Jenis Risiko Type of Risk	Deskripsi Description	Langkah Mitigasi Mitigation Measures
Risiko Mata Uang	Merupakan risiko kerugian pada saat terjadinya apresiasi atau depresiasi mata uang asing yang disebabkan oleh adanya posisi transaksi yang masih terbuka. Kinerja keuangan Perusahaan dapat dipengaruhi oleh perubahan kurs, mengingat beberapa komponen dalam konstruksi bangunan diimpor dari luar negeri.	Untuk mengurangi risiko atas perubahan mata uang asing, Perusahaan memberlakukan kebijakan hedging, yaitu lindung nilai untuk pinjaman dalam mata uang non-rupiah. Dalam kegiatan operasional, Perusahaan juga mengutamakan penggunaan material bangunan produksi dalam negeri.
Currency Risk	The risk of loss in the event of the appreciation or depreciation of a foreign currency due to a transaction position that remains open. The Company's financial performance may be affected by fluctuations in the exchange rate, due to the fact that several construction components are imported.	To reduce the risk of foreign exchange rate fluctuations, the Company applies a hedging policy for loans denominated in foreign currencies. In terms of its operational activities, the Company gives priority to the use of locally-produced construction materials.
Risiko Suku Bunga	Merupakan risiko yang timbul akibat fluktuasi tingkat suku bunga pinjaman yang dilakukan oleh kreditur. Risiko ini akan sangat berdampak pada besarnya pembiayaan yang diperlukan oleh Anak Perusahaan, karena biaya yang dikeluarkan akan meningkat, sehingga mempengaruhi kegiatan operasional dan kinerja keuangan Perusahaan.	Untuk mengurangi dampak risiko perubahan tingkat suku bunga, Bakrieland melakukan metode pembayaran bertahap dengan jangka waktu yang lebih panjang ataupun pinjaman dengan bunga tetap.
Interest Rate Risk	The risk that arises due to interest rate fluctuations of loans from creditors. Such risks significantly impact the amount of financing needed by a Subsidiaries, as the costs incurred can affect the Company's operational activities and financial performance.	To reduce the impact of risks related to interest rate fluctuations, Bakrieland offers an installment payment method spread over a longer period of time or a fixed interest rate loan scheme.
Risiko Kredit	Risiko kredit yang merupakan risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam tidak dapat dan/atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo.	Untuk mengurangi dampak risiko ini, Bakrieland sangat selektif dalam memberikan kredit dengan sistem penjualan tunai bertahap kepada konsumen. Hal itu dimulai dari strategi penetapan uang muka, pemilihan segmen pasar hingga pemenuhan persyaratan-persyaratannya.
Credit Risk	The risk of loss as a result of a debtor's inability and/or refusal to fulfill their obligation to repay a loan in full on the date of maturity.	To reduce the impact of this risk, Bakrieland is highly selective when handing out credit through the cash installment sales scheme for consumers. The process involves determining the down payment, selecting the market segment and ensuring the fulfillment of various requirements.

## Risk Management

The Company's risk management system involves a series of procedures and processes for identifying and analyzing business risks, applying effective and accurately targeted mitigation measures, and evaluating the effectiveness of the risk management system. The risk management system is managed by the Corporate Risk Management & Compliance (RMC) unit, which periodically coordinates with the Subsidiaries, discussing the effectiveness or risk management and compliance with the Company.

Apart from facilitating coordination efforts, RMC also helps monitor the implementation of corporate governance, prepares and reviews policies, manages the Task Monitoring System (TMS) and the implementation of the Quality Management System established by the Company.

## Business Risk Profile

### Internal Risk

### Risiko Pasar | Market Risk

Jenis Risiko Type of Risk	Deskripsi Description	Langkah Mitigasi Mitigation Measures
Risiko Pasar	Pangsa pasar yang cukup besar dan tumbuh secara signifikan menjadi daya tarik bagi banyak pihak untuk terlibat ke dalam industri yang sama dengan Anak Perusahaan. Situasi ini memberikan dampak meningkatnya persaingan usaha dan kemungkinan terjadinya kelebihan pasokan di pasar yang dapat menurunkan penjualan produk dan berkurangnya permintaan terhadap produk Perusahaan.	Untuk mengantisipasi hal ini, Bakrieland selalu mengeluarkan produk yang inovatif sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar dan memfokuskan pengembangan pada proyek-proyek yang telah memiliki kinerja yang telah terukur selama ini.
Market Risk	A substantial market share with impressive growth appeals to many market players interested in entering the same industries in which the Company's Subsidiaries already operate. In such circumstances, business competition becomes fiercer with a higher likelihood of market oversupply that in turn will drive product sales down, resulting in a lower demand for Company products.	To anticipate this, Bakrieland regularly introduces innovative products in order to meet market needs, and focuses on development projects with proven and measurable performance.

### Risiko Operasional | Operational Risk

Risiko Kinerja Anak Perusahaan	Sebagai Induk Perusahaan, penghasilan dan laba operasi Perusahaan merupakan kontribusi dari kinerja Anak Perusahaan. Faktor-faktor yang dapat berdampak negative terhadap kinerja keuangan Anak Perusahaan diantaranya adalah ketidak mampuan memenuhi target yang ditetapkan, kondisi makro ekonomi yang tidak stabil, kerugian usaha dan sebagainya. Penurunan kegiatan usaha dan penghasilan Anak Perusahaan secara langsung akan menurunkan tingkat penghasilan Perusahaan.	Sebagai upaya mitigasi, Perusahaan secara aktif melakukan pemantauan terhadap Anak Perusahaannya, seperti memberlakukan peraturan seleksi ketat terhadap seluruh kontraktor, menerapkan sistem usaha yang baik untuk mengurangi risiko bisnis, sekaligus memperbaharui informasi dan memperkuat akuntabilitas untuk pengambilan keputusan bisnis di lingkungan Anak Perusahaan. Salah satu acuan dalam persetujuan terhadap proyek adalah penetapan Internal Rate of Return (IRR) >20%.
Subsidiaries Performance Risk	As a Parent Company, Bakrieland's corporate earnings and operating profits are drawn from contributions made by the Subsidiaries. Factors that adversely affect the financial performance of the Subsidiaries include an inability to meet expected targets, unstable macro-economic conditions and business losses. A declining trend in business activities and earnings of the Subsidiaries will directly reduce the Company's income.	As a mitigation measure, the Company actively monitors its Subsidiaries, enforces a strict selection process for all contractors and implements an effective business system to minimize business risks, while updating information and strengthening accountability for business decision-making in Subsidiaries. One of the benchmarks used for approving projects is an Internal Rate of Return (IRR) of >20%.
Risiko Usaha	Bakrieland sebagai Perusahaan properti yang terintegrasi mempunyai lini bisnis yang beragam dalam bidang landed residential, kondominium, perkantoran, perhotelan, hiburan dan rekreasi serta pusat perbelanjaan. Faktor keberagaman usaha tersebut menimbulkan dampak pada meningkatnya risiko usaha.	Untuk mengantisipasi risiko tersebut, dalam memulai pengembangan usahanya Bakrieland selalu menerapkan evaluasi yang seksama dan melakukan uji tuntas dengan penetapan IRR yang sangat ketat.
Business Risk	As an integrated property developer, Bakrieland runs multiple lines of business ranging from landed residential, condominiums, office spaces, hotels, entertainment and recreational centers, and shopping malls. Due to such diversity in its business endeavors, the Company's business risk may increase.	To anticipate this risk, Bakrieland conducts thorough evaluations and exercises due diligence in establishing and strictly enforcing IRR in the early stage of business development.
Risiko Sistem & Teknologi	Risiko sistem & teknologi timbul sebagai akibat adanya ketidakseragaman sistem dan teknologi dalam operasional Perusahaan. Kompleksitas sistem yang belum terintegrasi penuh antara Perusahaan dan Anak Perusahaan dapat menimbulkan gangguan terhadap sinkronisasi bisnis satu sama lain.	Bakrieland meminimalisasi potensi masalah ini dengan menetapkan bahwa Anak Perusahaan tetap mengacu pada kebijakan penetapan sistem dan teknologi sesuai yang diacu oleh Perusahaan.
Systems & Technology Risk	The systems & technology risk arises due to a lack of uniformity in the systems and technology utilized for the Company's business operations. The complexity of the systems that are not fully integrated by between the Company and the Subsidiaries may interfere with the management flow between businesses.	Bakrieland minimizes the possibility of this risk by ensuring that the Subsidiaries comply with the Company's policies on systems and technology.

### Risiko Sumber Daya Manusia (SDM) | Human Resources (HR) Risk

Jenis Risiko Type of Risk	Deskripsi Description	Langkah Mitigasi Mitigation Measures
Risiko Sumber Daya Manusia (SDM)	Risiko SDM berkaitan dengan penyimpangan hasil dari tingkat produktivitas yang diharapkan, karena adanya variabel yang mempengaruhi produktivitas kerja. Sebagai Perusahaan yang mengelola jumlah tenaga kerja dengan berbagai macam latar belakang usia dan pendidikan, Bakrieland akan mengalami tantangan dalam mencapai tujuan Perusahaan jika SDM tersebut tidak dikelola dengan baik. Indikator keberhasilan pengelolaan SDM di Bakrieland dapat dilihat antara lain dari tingkat produktivitas, tingkat pergantian karyawan, serta tingkat absensi.	Dalam mengelola risiko SDM, Bakrieland selalu menempatkan SDM sebagai aset utama dalam mencapai tujuan Perusahaan. Usaha yang telah dilakukan, antara lain selalu mengadakan penilaian karyawan berbasis dua arah antara atasan dan bawahan, dan memberikan remunerasi yang kompetitif dengan Perusahaan lain dalam industri yang sejenis untuk menjaga rendahnya tingkat pergantian karyawan.
Human Resources (HR) Risk	HR risk relates to inconsistencies between outcomes and expected levels of productivity due to the variables that can affect productivity. As a Company that manages employees from diverse backgrounds in terms of age and education, Bakrieland will need to face certain challenges in achieving Company goals if its human capital is not effectively managed. Indicators of success in HR management within Bakrieland include the level of productivity, employee turnover rate and level of absenteeism.	To manage this risk, Bakrieland treats its human capital as a primary assets that can help it achieving its corporate goals. To demonstrate this commitment, the Company ensures two-way appraisals between supervisors and subordinates, and offers competitive remuneration in comparison to other companies in the same industry, in a bid to maintain low employee turnover.

### Risiko Eksternal | External Risk

Jenis Risiko Type of Risk	Deskripsi Description	Langkah Mitigasi Mitigation Measures
Risiko Lingkungan, Sosial dan Politik	Risiko yang timbul dalam pengembangan properti dapat terdiri dari berbagai jenis, di antaranya peraturan pemerintah tentang pembatasan pemilikan properti oleh warga negara asing, aturan perpajakan, bencana alam, kejahatan dan terorisme yang seluruhnya berada di luar kendali Perusahaan. Bakrieland selalu berusaha memenuhi ekspektasi seluruh pemangku kepentingan ( <i>stakeholders</i> ) sebelum memulai suatu proyek.	Hal itu dilakukan melalui implementasi standar- standar terbaik dan terencana, risiko-risiko yang mungkin timbul dapat diminimalisasi dengan tetap memperkirakan force majeure yang mungkin terjadi. Seluruh proyek diasuransikan, serta senantiasa memperhatikan faktor lingkungan, sehingga terjadi keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.
Environmental, Social and Political Risk	Risks associated with property development come in different forms including government policies concerning foreign property ownership restrictions, tax regulations, natural disasters, crime and terrorism, all of which are beyond the Company's control. Bakrieland consistently strives to meet the expectations of stakeholders before the commencement of each project.	Mitigation involves the implementation of clear and high standards, with potential risks minimized by taking into account the likelihood of force majeure events. All projects are insured, and consistently pay heed to the environment, in an effort to create a balance between development and environmental conservation.
Risiko Hukum	Dalam hubungan bisnis dengan pihak ketiga, selalu terdapat potensi timbulnya sengketa atau perkara hukum. Dalam hal kondisi tersebut terjadi dan bernilai material, maka dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan pencapaian target laba Perusahaan. Selanjutnya, adanya perubahan kebijakan hukum yang ditetapkan oleh regulator yang harus dipatuhi oleh obyek hukum, juga dapat memberikan risiko hukum bagi Perusahaan.	Untuk meminimalisasi risiko hukum, Bakrieland secara seksama mengikuti peraturan yang berlaku dan memastikan bahwa proyek telah memenuhi unsur hukum. Risiko tuntutan hukum masyarakat terhadap dampak lingkungan yang mungkin terjadi diminimalisir melalui pemenuhan persyaratan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan penanganan dampak lingkungan.
Legal Risk	In business dealings with a third party, there is always the possibility of a dispute or a lawsuit. If this situation arises, and is of material value, it may have a bearing on business activities and the Company's ability to meet its profit targets. Furthermore, regulatory changes can also create legal risk for the Company.	To minimize legal risk, Bakrieland strictly adheres to existing laws and regulations, ensuring that projects fulfill all legal requirements. The risk of a civil lawsuit for possible environmental impacts can be minimized by meeting all government requirements, particularly in relation to the handling of environmental issues.

Jenis Risiko Type of Risk	Deskripsi Description	Langkah Mitigasi Mitigation Measures
Risiko Reputasi	Risiko reputasi merupakan potensi hilang atau melemahnya nama baik Perusahaan. Hal itu mungkin terjadi akibat adanya publikasi negatif atau rendahnya penerimaan lingkungan eksternal, yang disebabkan ketidakmampuan Perusahaan dalam mengambil tindakan terhadap isu eksternal yang terkait dengan Perusahaan serta ketidakmampuan dalam mengelola komunikasi dengan pihak eksternal yang berkepentingan. Situasi ini dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap Perusahaan.	Bakrieland berkomitmen menjaga reputasi dan citra produk-produk yang dikeluarkan oleh Anak Perusahaan. Disamping itu, Bakrieland juga selalu menjaga hubungan baik dengan masyarakat luas maupun masyarakat sekitar dimana suatu proyek dibangun, baik melalui program tanggung jawab sosial perusahaan maupun partisipasi dalam berbagai proyek atau kegiatan masyarakat sekitar. Hubungan dengan publik dan media juga selalu dibina melalui Corporate Affairs Directorate.
Reputation Risk	The risk of loss or damage to the good name and reputation of the Company. This may be a result of negative publicity or low acceptance from the external environment, attributed to the Company's failure to take the necessary actions when dealing with external issues related to the Company, and its inability to effectively manage communication with relevant external parties. Under such circumstances, the Company may be negatively perceived by certain parties.	Bakrieland is fully committed to maintaining its good reputation and the good image of the products introduced by its Subsidiaries. In addition, Bakrieland also maintains good relations with the public at large and the local communities living near Company project sites, either through corporate social responsibility programs or participation in various community-level projects and activities. Relations with the public and the media are fostered through the Corporate Affairs Directorate.

### Efektivitas Manajemen Risiko

Alur kerja Manajemen Risiko yang diterapkan di lingkungan Perusahaan senantiasa diupayakan untuk selalu berjalan secara efektif. Pola desentralisasi atau pengelolaan dan penerapan terhadap prinsip-prinsip manajemen risiko dan kepatuhan oleh masing-masing Anak Perusahaan memudahkan Perusahaan dalam mendeteksi dan memitigasi risiko usaha sejak dini. Sistem manajemen risiko yang efektif merupakan upaya Perusahaan untuk menjaga kestabilan bisnis dan menerapkan praktik GCG yang baik.

Perusahaan melaksanakan analisis risiko atas aktivitas-aktivitas usaha dengan melakukan identifikasi atas tujuan awal dari aktivitas tersebut, menentukan potensi kejadian yang dapat menghalangi tercapainya tujuan tersebut (risiko), mendeteksi kemungkinan keterjadian, dampak dari risiko, mengidentifikasi atau menetapkan tindakan pengendalian untuk mengurangi dampak dari risiko, kemudian memberikan penilaian dengan menetapkan apakah risiko tersebut termasuk rendah, sedang, atau tinggi (low, moderate, high).

Sebagai upaya memenuhi tujuan tersebut, Perusahaan mengelola risiko di antaranya melalui Transaction Based Risk Management yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko dan memberikan rekomendasi agar tujuan transaksi dan rencana strategis lainnya dapat tercapai. Setiap transaksi dan rencana strategis lainnya terlebih dahulu mendapatkan tinjauan dan rekomendasi dari RMC, sebelum akhirnya diajukan kepada manajemen untuk pengambilan keputusan. Selama 2016, RMC telah menyelesaikan tinjauan terhadap 54 transaksi yang terdiri dari proposal proyek, transaksi keuangan, data pelaporan kepada instansi eksternal dan regulator, kontrak/perjanjian, investasi, dan lain-lain.

### Effectiveness of the Company's Risk Management

All efforts are made to ensure that the Company's risk management work flow runs smoothly and effectively. A decentralization approach, where the risk management and compliance are managed and applied by the respective Subsidiaries, allows the Company to be more effective at early detection and mitigation of risks. Establishing an effective risk management system is part of the Company's effort to maintain business stability and ensure the appropriate application of GCG principles.

The Company conducts risk analysis of business activities by identifying the primary objective of carrying out an activity, predicting possible events that may hamper the achievement of the said purpose, detecting the likelihood of such risk occurring, determining the impact of the risk, identifying control measures to minimize risk impact, and subsequently making assessments to categorized the risk as either low, moderate or high.

In an effort to achieve the abovementioned purpose, the Company manages its risks through the Transaction-Based Risk Management set to identify risks and offer recommendations to ensure the implementation of transactions and strategic plans. Every transaction and strategic plan is reviewed by RMC prior to its eventual submission to management. In 2016, RMC reviewed 54 transactions including project proposals, financial transactions, data and information reports to external agencies and regulators, contracts/agreements and investments.

Hasil review Transaction Based Risk Management dilaksanakan oleh RMC, dapat dijadikan salah satu pertimbangan Corporate Internal Audit Division untuk melakukan audit berbasis risiko dalam rangka melakukan assurance dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif untuk melakukan peningkatan nilai dan operasional Perusahaan dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko.

## Kepatuhan

Budaya kepatuhan merupakan landasan dasar Perusahaan menjalankan seluruh aktivitas bisnisnya. Sebagai perusahaan publik, Perusahaan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kepatuhannya terhadap nilai, perilaku, peraturan perusahaan dan peraturan perundangan berlaku.

Sebagai salah satu bentuk penerapan aspek kepatuhan, sejak 2009 Perusahaan telah menerapkan Task Monitoring System (TMS). Penerapan TMS bertujuan untuk meminimalisir risiko dan meningkatkan kelancaran kegiatan operasional. Selama 2016, masing-masing divisi bersikap proaktif untuk menindaklanjuti hasil tinjauan dari TMS.

Fungsi Kepatuhan di Bakrieland dipimpin oleh Division Head, yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan berjalannya fungsi Kepatuhan yakni mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang ada di perusahaan dan melakukan pemutakhiran yang diperlukan, menyusun kebijakan-kebijakan baru yang diperlukan perusahaan, serta mengawasi pelaksanaan implementasi praktik GCG di perusahaan, yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan-kebijakan yang ada di Bakrieland senantiasa mengikuti adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh, hal tersebut tercermin dari telah dimutakhirkannya Board Manual yang adalah kebijakan yang mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, serta Komite-komite di bawah Dewan Komisaris, yang selesai dilakukan pada awal tahun 2016. Pemutakhiran tersebut dilakukan sebagai penyesuaian dari adanya perubahan peraturan Bapepam Nomor: Kep-45/PM/2004 tanggal 29 November 2004 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik menjadi Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Bakrieland senantiasa melaksanakan fungsi kepatuhan dengan cara mengimplementasikan peraturan perundangan yang berlaku, dan menerjemahkannya ke dalam bentuk kebijakan, SOP, serta instruksi kerja yang dapat dipahami secara umum oleh personil yang bertanggung jawab. Selain itu, Bakrieland secara rutin melaporkan laporan-laporan yang wajib disampaikan kepada regulator terkait secara berkala sesuai ketentuan.

The results of the review of Transaction-Based Risk Management by RMC may be taken into consideration by the Corporate Internal Audit Division when performing a risk-based audit for the purpose of providing assurance, as well as independent and objective consultancy, in order to improve the Company's operations by evaluating and enhancing the effectiveness of its risk management.

## Compliance

A culture of compliance makes a solid foundation for the Company's business activities. As a public corporation, the Company continuously works to increasing its level of compliance with corporate values, behaviors and regulations, as well as existing legislation.

To ensure compliance, the Company has been using the Task Monitoring System (TMS) since 2009. TMS minimizes risks and assists the smooth running of operational activities. In 2016, each division considered the results of TMS reviews before taking any actions.

Compliance function in Bakrieland is led by each Division Head, who holds the responsibility for ensuring the compliance function runs to monitor the implementation of existing policies within the Company and of updating the policies if necessary, to draw up new policies needed by the Company, as well as overseeing the implementation of good corporate governance practices within the Company in accordance with the prevailing regulations.

Bakrieland's policies are always aligned with the changes in applicable laws and regulations. For instance, it is reflected in the updated Board Manual, which is a policy that governs the duties, authorities, and responsibilities of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and Committees under the Board of Commissioners, which was completed in early 2016. These updates are performed as an adjustment of the change in the regulation of Bapepam No. Kep-45/PM/2004 dated 29 November 2004 on the Board of Directors and Commissioners of Companies and Listed Companies further changed into OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 of the Board of Directors and the Board of Commissioners of Companies or Listed Companies.

Bakrieland always performs its compliance function by implementing the prevailing regulations, and translating the implementations into a form of policies, SOPs, and working instructions that are generally understood by the respective personnel in charge in addition, Bakrieland conducts regular reports that must be submitted to the relevant regulator periodically in accordance with the regulations.

Dalam hal pelaksanaan GCG, Bakrieland memiliki Pedoman Pelaksanaan GCG, yang mengatur mengenai pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi, Rapat Dewan Komisaris dan Direksi, serta jalur komunikasi dengan pihak yang berkepentingan, yang salah satunya dinyatakan bahwa Bakrieland berkomitmen untuk menyebarluaskan ketentuan OJK tentang larangan transaksi efek oleh orang dalam (*insider trading*).

### Pencapaian 2016

- Pelaksanaan identifikasi dan evaluasi sistem manajemen risiko dilakukan secara terdesentralisasi dimana pengelolaan dan penerapan terhadap prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Kepatuhan dilaksanakan oleh masing-masing unit bisnis sebagai pemilik risiko (risk owner). Sebab pada intinya, Manajemen Risiko yang efektif merupakan usaha untuk memitigasi risiko yang dilaksanakan oleh pemilik risiko serta merupakan salah satu bagian dari implementasi tata kelola Perusahaan yang baik.
- Perusahaan mengelola risiko melalui aktivitas Transaction Based Risk Management. Dalam hal ini, pemeriksaan dokumen transaksi selalu dilakukan oleh Divisi Risk Management & Compliance (RMC). Transaction Based Risk Management bertujuan untuk mengidentifikasi risiko dan memberikan rekomendasi mitigasi agar tujuan transaksi dapat tercapai secara maksimal. Setiap transaksi, rencana maupun keputusan strategis lainnya terlebih dahulu mendapatkan tinjauan dan rekomendasi dari Divisi RMC, sebelum akhirnya diajukan kepada bagian yang terkait untuk pengambilan keputusan.
- Selama tahun 2016, Divisi RMC telah menyelesaikan tinjauan terhadap 54 transaksi yang terdiri dari proposal proyek, transaksi perbankan, data pelaporan/penyampaian informasi kepada instansi eksternal dan regulator, kontrak/perjanjian, investasi, dan lain-lain.

### Rencana 2017

Pada tahun mendatang, Divisi Risk Management & Compliance senantiasa berfokus untuk melaksanakan analisis risiko atas transaksi-transaksi signifikan yang dilakukan oleh Anak Perusahaan. Aktivitas tersebut bersifat koordinasi dengan fungsi kerja manajemen risiko yang telah ada di Anak Perusahaan.

### Unit Audit Internal

Pedoman terbaru pembentukan Divisi Internal Audit Bakrieland adalah mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK/2015 tanggal 23 Desember 2015. Peraturan tersebut mengatur kewajiban perusahaan publik untuk membentuk unit Audit Internal dan Piagam Audit Internal yang menjelaskan tentang struktur dan kedudukan unit Audit Internal, tugas dan tanggung jawab unit Audit Internal, wewenang unit Audit Internal, kode etik Audit Internal, persyaratan auditor yang duduk dalam unit Audit Internal, pertanggungjawaban unit Audit Internal,

In terms of GCG implementation, Bakrieland already retain a GCG Manual which regulates the shareholders, the Board of Commissioners, the Board of Directors, Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as the communication with other related parties, one of which states that Bakrieland is committed to disseminating the provisions of the OJK regarding the prohibition of insider trading transactions.

### Achievements in 2016

- The risk management system was evaluated in a decentralized manner whereby the principles of Risk Management and Compliance were managed and applied by each respective Subsidiaries as the risk owner. Effective risk management is an attempt by risk owners to mitigate risks, and a part of good corporate governance.
- The Company managed risks through Transaction-Based Risk Management activities. A part of this involved the examination of all transaction documents by the Risk Management & Compliance (RMC) Division. Transaction-Based Risk Management aims to identify risks, and provide recommendations about mitigation measures to ensure the objectives of the transactions are maximally achieved. The RMC Division reviewed every transaction, plan, and other strategic decisions, and made recommendations about how any potential risks could be mitigated, prior to their eventual submission to the relevant unit responsible for making decisions.
- In 2016, the RMC Division reviewed 54 transactions including project proposals, banking transactions, data and information reporting/disclosure to external agencies and regulators, contracts/agreements and investments.

### Plan for 2017

In 2017, the Risk Management & Compliance Division will continue to focus on conducting risk analysis of any significant transactions made by the Subsidiaries. Such activities are coordinated with the risk management divisions in the respective Subsidiaries.

### Internal Audit Unit

When establishing Bakrieland's Internal Audit Division, the Company referred to the latest guidelines set out in OJK Regulation No. 56/POJK/2015 dated 23 December, 2015. The regulation stipulates the obligation of a public company to form an Internal Audit Unit, and establish an Internal Audit Charter that defines the structure and position of the Internal Audit Unit, including its duties and responsibilities, power and authority, code of ethics and accountability, in addition to auditor requirements such as the stipulation that auditors and officers in the Internal

dan larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor dan pelaksana yang duduk dalam unit Audit Internal dari pelaksana kegiatan operasional perusahaan maupun Anak Perusahaan.

### Profil Kepala Unit Audit Internal

#### Jordan Lubis

Warga negara Indonesia, lahir di Padang, 7 Oktober 1962, berusia 54 tahun. Berdomisili di Bogor, beliau memiliki gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Sumatera Utara dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Medan Area. Beliau juga memiliki sertifikat Qualified Internal Audit (QIA).

Beliau memulai karir di berbagai institusi keuangan dan properti Indonesia sejak 1990. Sejak 2006, beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Corporate Internal Audit (CIA) Bakrieland. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Hubungan Investor dan Pemerintah, Chief Financial Officer di Anak Perusahaan dan juga sebagai Corporate Secretary Perusahaan.

### Jumlah Pegawai Divisi Audit Internal

Pada tahun 2016, jumlah pegawai Divisi Corporate Internal Audit Bakrieland adalah 2 (dua) orang, dan didukung dengan sertifikasi Qualified Internal Audit (QIA).

### Struktur dan Kedudukan

Divisi Corporate Internal Audit dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur & CEO atas persetujuan Dewan Komisaris. Kepala Divisi bertanggungjawab langsung kepada Presiden Direktur & CEO. Divisi CIA menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala dalam bentuk laporan kepada Presiden Direktur & CEO dan kepada Dewan Komisaris dilakukan melalui Komite Audit.

### Tugas dan Tanggung Jawab

Selaras dengan Piagam Audit Internal, Divisi CIA melakukan kegiatan pemberian keyakinan (assurance) dan konsultasi (consultancy) yang bersifat independen dan objektif sesuai dengan prinsip manajemen, guna meningkatkan nilai tambah dan memperbaiki operasional Perusahaan melalui pendekatan yang sistematis. Hal ini dilakukan dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola perusahaan. Untuk mendukung pelaksanaan hal tersebut, antara lain dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan.
- Menguji dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola dengan kebijakan Perusahaan.
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya

Audit Unit cannot hold concurrent positions relating to the operational activities of the Company and the Subsidiaries.

### Profile of the Head of the Internal Audit Unit

#### Jordan Lubis

Indonesian citizen, born in Padang, 7 October 1962, aged 54 years. Reside in Bogor, he has a Sarjana degree in Mechanical Engineering from Universitas Sumatera Utara and a Sarjana degree in Economics from Universitas Medan Area. He is certified as Qualified Internal Audit (QIA).

He has been building a career in a number of financial institutions and property firms in Indonesia since 1990. Since 2006, he has served as the Head of Bakrieland's Corporate Internal Audit (CIA) Division. He formerly served as the Head of the Investor and Government Relations Division, the Chief Financial Officer at a Subsidiary and the Company's Corporate Secretary.

### Number of Internal Audit Division Employees

In 2016, Bakrieland's Corporate Internal Audit Division had 2 (two) employees, and was supported by Qualified Internal Audit (QIA) certification.

### Structure and Position

The Corporate Internal Audit Division is under the leadership of a Division Head appointed and dismissed by the President Director & CEO upon the approval of the Board of Commissioners. The Division Head reports directly to the President Director & CEO. The CIA Division periodically submits an activity implementation report to the President Director & CEO and to the Board of Commissioners through the Audit Committee.

### Duties and Responsibilities

In line with the Internal Audit Charter, the CIA Division is tasked with providing assurance and consultancy in an independent and impartial manner, and in accordance with management principles, to add value to the Company and improve its operations. This is achieved by evaluating and enhancing the effectiveness of risk management, internal control structures and corporate governance. The following measures have been undertaken to support the implementation of these activities:

- Preparing and executing the annual internal audit plan.
- Testing and evaluating the conformity of risk management, internal control structures and compliance with Company policies .
- Examining and assessing the efficiency and effectiveness of the Company's finances, accounting, operations, human resources, marketing, information technology and others.



- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada tingkat manajemen.
  - e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikannya kepada Presiden Direktur & CEO dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
  - f. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
  - g. Bekerja sama dengan Komite Audit.
  - h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan.
  - i. Mengevaluasi ketaatan Perusahaan terhadap hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, serta kebijakan dan prosedur Perusahaan.
  - j. Melaksanakan penugasan khusus yang relevan dengan ruang lingkup pekerjaan audit.
- d. Provide improvement recommendations and objective information on activities assessed at the management level.
  - e. Prepare audit report for submission to the President Director & CEO and the Board of Commissioners through the Audit Committee.
  - f. Monitor, analyze and report on the implementation of the recommended improvements.
  - g. Working alongside the Audit Committee.
  - h. Develop programs for evaluating the quality of internal audit activities
  - i. Evaluate Company's compliance with existing laws and regulations, as well as corporate policies and procedures.
  - j. Implement special assignments relevant to the scope of audit work.

### Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahun 2016, fokus Divisi Corporate Internal Audit Bakrieland adalah melakukan pengujian atas efektivitas pengendalian, penanganan risiko dan tata kelola terhadap kegiatan yang berpengaruh besar terhadap pencapaian tujuan Perusahaan. Kegiatan yang dilakukan antara lain melakukan audit atas aktifitas tata kelola keuangan, kontrak, transaksi sewa menyewa dan audit atas transaksi pinjaman keuangan.

Divisi Corporate Internal Audit telah membahas hasil audit tersebut dengan pihak yang diaudit dan bersama-sama merumuskan langkah perbaikan.

### Activity Report

In 2016, Bakrieland's Corporate Internal Audit Division focused on testing the effectiveness of the Company's internal control systems, risk management and governance of activities that have a significant impact on the achievement of Company's goals and objectives. Some of the activities conducted included the audit of financial management activities, contracts, leasing transactions and credit transactions.

The Corporate Internal Audit Division has discussed the audit findings with the auditees, before coordinating with them to jointly formulate improvement measures.

## Corporate Affairs

Sebagai perusahaan properti terintegrasi yang terkonsolidasi dengan Unit-Anak Perusahaan, Bakrieland meyakini bahwa pengelolaan kinerja operasional harus dilakukan secara terpadu, terencana dan andal. Pengelolaan yang dilakukan dengan tepat akan mengoptimalkan proses koordinasi dan sinergi antara Anak Perusahaan, Perusahaan dan Kelompok Usaha Bakrie (KUB) lainnya. Oleh sebab itu, Bakrieland mengimplementasikan sistem komunikasi dan informasi yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan guna mewujudkan visi dan misi Perusahaan, meningkatkan dan memperdalam *brand awareness* terhadap produk-produk Bakrieland.

Direktorat Corporate Affairs (CA) berperan sebagai jembatan dan/atau fasilitator proses komunikasi yang berlangsung antara Perusahaan dan Anak Perusahaan serta kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal. Dalam mengelola proses komunikasi, CA berupaya untuk memastikan bahwa prosedur dan bentuk penyampaian informasi mematuhi *standard operating procedure* (SOP) yang berlaku. Pengelolaan lalu lintas komunikasi yang selaras dan terintegrasi dilakukan guna menjaga reputasi Perusahaan dan menumbuhkan kepercayaan pada seluruh pemangku kepentingan.

Program kerja CA diselaraskan dengan kebijakan strategis Perusahaan, yaitu berfokus pada bisnis inti sebagai pengembang properti terintegrasi. Dengan mengusung tema kegiatan *corporate communication* pada 2016 yaitu "Untuk menjaga persepsi publik tentang posisi Bakrieland sebagai pengembang properti berkelanjutan yang solid dengan fokus secara terpadu pada bidang pengembangan inti" maka CA memastikan bahwa hasil kegiatan mampu memberikan dampak yang maksimal bagi reputasi Perusahaan.

Guna mencapai tujuan *corporate communication*, CA menerapkan langkah-langkah strategis seperti:

1. Mempertahankan reputasi dan posisi Perusahaan di industri properti melalui program-program yang terkoordinasi.
2. Mendukung misi Perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang untuk menjadi perusahaan yang berkelanjutan secara finansial serta ramah lingkungan melalui kegiatan CSR dalam bidang pendidikan, lingkungan dan sosial.

Kegiatan CA yang dilakukan pada 2016 terklasifikasi dalam unit kerja Internal & External Communication, dan Corporate Social Responsibility (CSR). Ketiga unit kerja tersebut memiliki ruang lingkup, tugas dan tanggung jawab masing-masing.

## Corporate Affairs

As an integrated property developer seamlessly consolidated with all its Subsidiaries, Bakrieland believes that operational performance management must be integrated, planned and reliable. Proper management will optimize coordination and synergies among Subsidiaries, the Company and other members of the Bakrie Business Groups (KUB). In view of this, Bakrieland has a communication and information system in place designed to help accelerate growth as part of establishing the Company's vision and mission, as well as strengthening and extending the brand awareness of Bakrieland's products.

The Corporate Affairs (CA) Directorate functions as a link and/or facilitator of the communication process between the Company and its Subsidiaries as well as with its internal and external stakeholders. In managing the communications process, CA makes sure that all procedures and forms of information delivery abide by the existing standard operating procedure (SOP). Aligning and integrating the communication flow is important to maintain the good reputation of the Company and build the trust of all stakeholders.

CA's work program is aligned with the Company's strategic policies that focus on its core business as an integrated property developer. Through its overarching corporate communication theme for 2016 of "Building public perception on Bakrieland's position as a solid and sustainable property developer that concentrates on developing its core business in an integrated manner", CA makes sure that all activities generate maximum impact for the Company's image and reputation.

To achieve its corporate communication goals, CA undertakes the following strategic measures:

1. Maintain the Company's reputation and position in the property industry through well-coordinated programs.
2. Support the Company's mission in the short- and long-term to become financially sustainable and a eco-friendly company through its CSR activities in the educational, environmental and social sectors.

In 2016, CA's activities were carried out by its Internal & External Communications and Corporate Social Responsibility (CSR) work units. All three work units had their respective scope of work, and their own set of duties and responsibilities.

### Internal & External Communications

Internal Communications (IC) berperan sebagai fasilitator dan jembatan komunikasi antar Perusahaan dengan Anak Perusahaan dan Kelompok Usaha Bakrie melalui media komunikasi. IC mengelola data dan informasi secara terintegrasi dan menginformasikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan memanfaatkan beragam saluran komunikasi seperti i-News, *email & flyer blast*, e-Newsletter (e-News), majalah dinding, situs, cinderamata, serta materi komunikasi korporasi seperti kartu ucapan dan kalender dalam format cetak maupun elektronik.

Secara khusus, IC mengelola situs resmi Perusahaan yang berperan sebagai portal data resmi yang dipublikasikan Perusahaan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari seluruh pemangku kepentingan serta publik. Sesuai diamanatkan oleh regulator, situs resmi Perusahaan mencakup informasi-informasi terkini dan yang layak diketahui publik. Situs resmi Perusahaan yaitu [www.bakrieland.com](http://www.bakrieland.com) berbasis *web* dan *mobile*. Pengelolaan dan pengembangan situs resmi Perusahaan dibantu oleh Divisi CIT agar terhindar dari kendala-kendala teknis.

External Communications (EC) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari CA dalam berkomunikasi dengan pihak eksternal, seperti media dan publik. Oleh karena itu, EC harus berjalan secara berkesinambungan dan terstruktur agar proses komunikasi dan informasi yang diberikan kepada pihak eksternal akurat dan akuntabel. Selain itu, EC berupaya untuk terus meningkatkan *brand image* setiap produk-produk Perusahaan agar semakin diterima sebagai satu kesatuan yang utuh, dan meningkatkan hasil dari strategi pemasaran yang telah dijalankan.

Tanggung jawab Tim EC mencakup tugas-tugas berikut ini:

- Mengelola arus lalu lintas komunikasi antara Perusahaan dan pemangku kepentingan melalui media.
- Memberikan rekomendasi dan bimbingan di bidang komunikasi kepada semua pemangku kepentingan.
- Merumuskan, menetapkan dan menerapkan prosedur yang efisien dan efektif untuk memfasilitasi pengambilan keputusan dalam komunikasi di tingkat Perusahaan maupun Anak Perusahaan.
- Mendukung tujuan komunikasi Perusahaan dalam lingkup internal dan eksternal

Dalam melaksanakan kegiatan EC, CA bekerja sama dengan seluruh tim Marketing dan Public Relations Anak Perusahaan Perusahaan dalam menjalankan program komunikasi eksternal. CA bertindak sebagai *advisor*, koordinator dan regulator dengan tim Marketing dan Public Relations Anak Perusahaan Bakrieland.

### Internal & External Communications

Internal Communications (IC) work unit facilitates and links the communication between the Company and its Subsidiaries as well as with the Bakrie Business Groups through various communication media. IC manages data and information in an integrated manner to be disseminated to relevant parties, by making effective use of multiple communication channels such as i-News, email & flyer blasts, e-Newsletters (e-News), bulletin boards, websites, and souvenirs, in addition to corporate communication materials such as greeting cards and calendars both in print and electronic form.

IC specifically manages the Company's official website that serves as a portal for information released by the Company to meet the information needs of all stakeholders and the public at large. As required by regulators, the Company's official website features updated information relevant for public knowledge. The official site at [www.bakrieland.com](http://www.bakrieland.com) is web- and mobile-based. In managing and developing its website, the Company is assisted by the CIT Division to avoid any technical complications.

External Communications (EC) forms an inseparable part of CA in communicating with external parties such as the media and the public at large. EC therefore must work in a continual and structured fashion to ensure that information shared with external parties is both accurate and accountable. Furthermore, EC consistently works toward building the brand image of every Company product as a unified whole, while improving marketing outcomes and strategies.

The EC Team is responsible for the following:

- Managing the communication flow between the Company and stakeholders through the media.
- Offering recommendations and guidance in communication to all stakeholders.
- Developing, establishing and applying efficient and effective procedures to facilitate decision-making in communication at the Company and Subsidiaries levels.
- Supporting the Company's communication goals internally as well as externally.

In implementing EC activities, CA worked alongside the Marketing and Public Relations teams of all Subsidiaries under the Company in carrying out external communication programs. CA acts as advisor, coordinator and regulator with the Marketing and Public Relations department of all Bakrieland Subsidiaries.

Salah satu tugas utama EC adalah berkoordinasi dengan berbagai divisi Perusahaan dan Anak Perusahaan, terkait penyelenggaraan beragam kegiatan yang terdiri dari:

- Pendekatan *online*: *strategic news, straight news, feature article dan one-on-one interview*
- Pendekatan *offline*: *countering issue, strategic stakeholders approach dan feeding strategic info.*

### Kegiatan 2016

Pada 2016, IC melakukan beberapa kegiatan terkait dengan peliputan dan distribusi informasi sebagai berikut:

- a. Corporate & Units: berita aktivitas keseharian, informasi saham, aksi korporasi dan penghargaan yang dicapai Perusahaan
- b. Sumber Daya Manusia: kegiatan karyawan
- c. Green News: aktivitas ramah lingkungan yang dilakukan Perusahaan
- d. CSR: peran aktif Perusahaan dalam bidang pendidikan dan sosial kemasyarakatan
- e. Promosi dan Pemasaran di Anak Perusahaan: aktivitas Perusahaan di bidang pemasaran
- f. Internal Perusahaan dan Anak Perusahaan: penayangan informasi dari divisi, penggunaan identitas Perusahaan dalam materi publikasi, serta informasi terkini mengenai rekan kerja dan Perusahaan.
- g. Financial Report, RUPST dan PE

### Media Relations

Program komunikasi eksternal (EC) selama 2016 difokuskan pada *support* terhadap komunikasi korporat sesuai misi dan visi Perusahaan. Namun demikian, dengan terbatasnya sumber daya maupun kegiatan korporasi dan Anak Perusahaan, maka kegiatan EC selama 2016 diselenggarakan sesuai dengan arahan kebijakan Manajemen untuk lebih bersikap *low profile*.

Perusahaan berhubungan dengan media eksternal dalam rangka menyampaikan informasi yang penting untuk diketahui publik melalui RUPS Tahunan dan Public Expose. Pada 2016, jumlah berita Perusahaan yang diinformasikan oleh media adalah sebanyak 502 berita, yang mencakup informasi mengenai korporasi dan CSR, *city property, landed residential, hotels and resorts, serta theme park.*

One of the EC's main duties is to coordinate with the divisions under the Company and the Subsidiaries, including online and offline activities as follows:

- Online activities: *strategic news, straight news, feature articles, and one-on-one interviews,*
- Offline activities: *Countering issue, strategic stakeholders approach, and feeding strategic information.*

### Activities In 2016

In 2016, IC initiated the following activities related to news coverage and information dissemination:

- a. Corporate & Units: news on daily activities, stock information, corporate actions and awards that the Company had earned
- b. Human Resources: employee activities
- c. Green News: eco-friendly activities conducted by the Company and Subsidiaries
- d. CSR: Company's active role in the education and e) social-community areas
- e. Promotion and Marketing in Subsidiaries: corporate activities in relation to marketing
- f. Internal Company's and Subsidiaries: information released by divisions, use of Company identity in publication materials, and updated information on the Company and its associates.
- g. Financial Report, Annual GMS and PE

### Media Relations

In 2016, the Company's external communications (EC) continued to focus on supporting corporate communications in accordance with corporate vision and mission statements. However, given the limitations in resources, as well as in respect to corporate and Subsidiaries activities, the EC agenda in 2016 was kept aligned with the Management's policy and direction of maintaining a low profile.

The Company came into contact with the external media when imparting important information which the public required to be aware of, through its Annual GMS and Public Expose. In 2016, at least 502 times news was disseminated through the media, covering news on corporate and CSR information, *city property, landed residential, hotels and resorts, as well as theme park.*

## Rencana 2017

Pada 2017, IC berencana untuk tetap melakukan beberapa kegiatan rutin sebagai berikut:

- a. I-News, Majalah Dinding (selektif), Direct Email Blast
- b. Website *updates* dan *monitoring*
- c. Merancang dan menerbitkan e-Card Season's Greetings dan e-Calendar
- d. Menerbitkan e-Newsletter bulanan
- e. Mendukung kegiatan promosi Subsidiaries PR dan Marketing
- f. Mendukung penyelenggaraan RUPST/LB dan Public Expose

Di tahun mendatang, program EC yang akan dilaksanakan adalah *support* PR untuk aksi korporasi Perusahaan, *support* kegiatan PR untuk Anak Perusahaan, *support* program CSR Bakrieland, Media Relations, RUPS dan Public Expose Perusahaan.

## Sekretaris Perusahaan

### Dasar Hukum Penunjukan

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 perihal Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar, Perusahaan telah menunjuk Sekretaris Perusahaan melalui Surat Keputusan Direksi PT Bakrieland Development Tbk No. 015/DIR-PERSEROAN/SKD/VII/2014 tertanggal 18 Juli 2014.

### Profil Sekretaris Perusahaan

#### Erry Zul Amri Djaelani

Saat ini, Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Erry Zul Amri Djaelani. Beliau memulai karirnya sejak 1983 di berbagai institusi keuangan. Beliau menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan PT Bakrieland Development Tbk sejak 18 Juli 2014. Selama bergabung di Bakrieland, beliau pernah menjabat sebagai Chief Financial Officer di Anak Perusahaan serta Kepala Divisi Risk Management & Compliance Bakrieland. Beliau menyelesaikan pendidikan jurusan Perbankan di Universitas Pembangunan Nasional.

## Plans In 2017

In 2017, IC plans to carry out the following activities:

- a. I-News, bulletin board (selective), Direct Email Blasts;
- b. Website updates and ongoing monitoring;
- c. e-Card Season's Greetings and e-Calendar 2018;
- d. Monthly e-Newsletters;
- e. Support promotional activities of all Subsidiaries' PR and Marketing; and
- f. Support Annual/Extraordinary GMS and Public Expose.

In the coming year, EC programs to be implemented include supporting PR for corporate actions, supporting PR activities for Subsidiaries, and supporting Bakrieland's CSR programs, media relations, GMS and public expose.

## Corporate Secretary

### Legal Basis of Appointment

Pursuant to Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 35/POJK.04/2014 concerning the Corporate Secretary of Issuers or Public Companies, and Attachment I of the Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 on January 20, 2014 on Regulation Number I-A on the Listing of Shares and Equity Securities Other Than Shares Issued by Publicly-Listed Companies, the Company has appointed a Corporate Secretary through the Directive of the Board of Directors of PT Bakrieland Development Tbk No. 015/DIR-PERSEROAN/SKD/VII/2014 dated 18 July, 2014.

### Profile of the Corporate Secretary

#### Erry Zul Amri Djaelani

The position of the Corporate Secretary is presently held by Erry Zul Amri Djaelani. He has been building a career in various financial institutions since 1983, and has been serving as the Corporate Secretary of PT Bakrieland Development Tbk since 18 July, 2014. Since joining Bakrieland, he has been entrusted with the positions of a Chief Financial Officer of a Subsidiary and the Head of Bakrieland's Risk Management & Compliance Division. He completed his studies in banking at the National Development University.

Selama 2016, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti sejumlah pelatihan, sebagai berikut:

In 2016, the Corporate Secretary took part in a number of training programs, including:

No.	Tanggal Date	Kegiatan Activity	Penyelenggara Organizer
1	27 Januari 2016 27 January 2016	Sosialisasi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka Sensitization of the Financial Services Authority (OJK) Circular Letter No. 32 concerning Good Corporate Governance Guidelines	Indonesian Corporate Secretary Association (ICSA) Indonesian Corporate Secretary Association (ICSA)
2	1 Februari 2016 1 February 2016	Seminar Corporate Social Responsibility Talk for Leaders Seminar on Corporate Social Responsibility-Talk for Leaders	Bursa Efek Indonesia (BEI) Indonesia Stock Exchange (BEI)
3	16 Februari 2016 16 February 2016	Sosialisasi Ketentuan dan Workshop Aplikasi Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Lembaga Bukan Bank (LLD-LBB) Sensitization of Reporting Obligations Related to Foreign Exchange Activities for Non-Banking Institutions (LLD-LBB) and Workshop on Applying this Requirement	Bank Indonesia (BI) Bank Indonesia (BI)
4	3 Maret 2016 3 March 2016	Pembiayaan Properti dan Investasi Syariah Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Property Financing and Sharia Investment to Bolster Indonesia's Economic Growth	Indonesian Association of Islamic Economist (IAEI) Indonesian Association of Islamic Economist (IAEI)
5	15 Maret 2016 15 March 2016	Temu Konsultasi Anggota Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Consultation Meeting of Indonesia Issuers Association (AEI) Member	Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Indonesia Issuers Association (AEI)
6	1 April 2016 1 April 2016	Menyikapi Hasil Judicial Review Mahkamah Konstitusi No 7 Tahun 2014 yang berimplikasi pada kebijakan PKWT, Outsourcing dan PHK, serta isu ketenagakerjaan akibat kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean Response to the Outcome of the Constitutional Court's Judicial Review No. 7/2014, and its implications on the PKWT policy, outsourcing and termination of employment, and labor issues arising from the ASEAN Economic Community agreement	Indonesian Corporate Secretary Association (ICSA) Indonesian Corporate Secretary Association (ICSA)
7	31 Mei 2016 31 May 2016	Sosialisasi Peraturan OJK No. 8 Tahun 2015 tentang Website Sensitization of OJK Regulation No. 8/2015 concerning websites	Indonesian Corporate Secretary Association (ICSA) Indonesian Corporate Secretary Association (ICSA)
8	1 Juni 2016 1 June 2016	Pertemuan Perusahaan Terdaftar (Issuer Gathering) dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Tahun 2016 Issuers Gathering with the Indonesia Central Securities Depository 2016	Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Indonesia Central Securities Depository (KSEI)
9	25 Juli 2016 25 July 2016	Acara Halal Bi Halal dan Seminar 2016 Halal Bi Halal Social Gathering and Seminar 2016	Bursa Efek Indonesia (BEI) Indonesia Stock Exchange (BEI)
10	28 Juli 2016 28 July 2016	Musyawaharah Anggota Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Consultative Meeting of Indonesia Issuers Association (AEI) Members	Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Indonesia Issuers Association (AEI)
11	6 September 2016 6 September 2016	Sosialisasi <i>Tax Amnesty</i> Sensitization of Tax Amnesty	Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Indonesia Issuers Association (AEI)
12	26 Oktober 2016 26 October 2016	Merger dan Akuisisi dalam Perspektif Persaingan Usaha serta Tren dalam Perekonomian Global Mergers and Acquisitions in the Context of Business Competition and Global Economic Trends	Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Oversight Commission on Business Competition (KPPU)
13	15 November 2016 15 November 2016	Keterbukaan Informasi Emiten dan Perusahaan Publik Disclosure of Information about Issuers and Public Companies	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Financial Services Authority (OJK)
14	15 Desember 2016 15 December 2016	Seminar Partisipan KSEI Tahun 2016 Seminar on KSEI Participants in 2016	Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Indonesia Central Securities Depository (KSEI)

### Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan ketentuan dari OJK dan Bursa Efek Indonesia, maka tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan adalah:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
  - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.
  - b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu.
  - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham.
  - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
  - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
5. Sekretaris Perusahaan harus memiliki akses terhadap informasi material dan relevan yang berkaitan dengan kewajiban penyampaian keterbukaan informasi Perusahaan Tercatat kepada publik.
6. Menyiapkan daftar khusus yang berkaitan dengan Direksi, Dewan Komisaris dan keluarganya baik dalam Perusahaan Tercatat maupun afiliasinya yang antara lain mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis dan peranan lain yang menimbulkan benturan kepentingan dengan Perusahaan Tercatat.
7. Membuat daftar pemegang saham termasuk kepemilikan 5% (lima per seratus) atau lebih.

### Laporan Aktivitas Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, Sekretaris Perusahaan melakukan berbagai kegiatan sepanjang 2016, di antaranya adalah:

1. Memandu Perusahaan untuk senantiasa patuh terhadap peraturan pasar modal, dan mengikuti perkembangan peraturan baru untuk selanjutnya memastikan bahwa Perusahaan mengimplementasikan peraturan-peraturan tersebut. Perusahaan menerbitkan 1 (satu) Laporan Keuangan Tahunan Audit 2015, 3 (tiga) Laporan Keuangan Triwulanan 2016 dan serta 1 (satu) Laporan Tahunan 2015.
2. Melakukan korespondensi dengan regulator Pasar Modal (OJK dan BEI) selama 2016 sebanyak 76 (tujuh puluh enam) kali.

### Duties and Responsibilities

In accordance with the policies issued by OJK and the Indonesia Stock Exchange, the duties and responsibilities of the Corporate Secretary are as follows:

1. Monitoring capital market developments, especially regarding applicable laws and regulations in the capital market.
2. Offering input to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company on compliance with the prevailing capital market laws and regulations.
3. Assisting the Board of Directors and the Board of Commissioners in implementing corporate governance that covers:
  - a. Disclosure of information to the public, including making information available on the websites of issuers or public companies.
  - b. Timely submission of reports to the Financial Services Authority.
  - c. Organizing and documenting General Meetings of Shareholders.
  - d. Convening and documenting the meetings of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.
  - e. Organizing Company orientation programs for the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.
4. Act as liaison between Issuers or Public Companies and the shareholders of Issuers or Public Companies, the Financial Services Authority and other stakeholders.
5. Disclose information relevant for a publicly-listed company to release to the public.
6. Prepare a special list about the Board of Directors, the Board of Commissioners, and members of their families, including affiliations that, among others, cover share ownership, business ties and other roles that may create conflicts of interest with the publicly-listed company.
7. Prepare a register of shareholders with at least 5% (five percent) ownership in the Company.

### Activity Report of the Corporate Secretary

To fulfill their duties and responsibilities, the Corporate Secretary conducted the following activities in 2016:

1. Guided the Company to ensure its compliance with capital market regulations; and monitored regulatory developments, ensuring that the Company implements any new regulations. The Company released 1 (one) Audited Annual Financial Report, 3 (three) Quarterly Financial Reports and 1 (one) Annual Report for 2015.
2. Engaged in correspondence with capital market regulators (OJK and BEI) as many as 75 (seventy five) times in 2016.

3. Memberikan keterbukaan informasi terkait Perusahaan yang disampaikan melalui pelaporan, baik yang diatur maupun tidak, antara lain dalam bentuk siaran pers, *website*, dan melayani setiap kebutuhan informasi terkait kondisi Perusahaan. Siaran pers yang diterbitkan selama 2016 sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada 30 September 2016, 21 Oktober 2016 dan 30 November 2016.
  4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan RUPS Tahunan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada 30 September 2016 dan 21 Oktober 2016.
  5. Mengkoordinasikan pelaksanaan Paparan Publik (Public Expose) Tahunan sebanyak 1 (satu) kali, yaitu tanggal 30 November 2016.
  6. Mengikuti 14 (empat belas) kali *training/workshop*/sosialisasi yang diselenggarakan oleh OJK, Bursa Efek Indonesia, Bank Indonesia dan Indonesia Corporate Secretary Indonesia (ICSA).
  7. Mengikuti acara-acara sosialisasi dan *workshop* atas penerbitan dan pemberlakuan peraturan/ketentuan baru yang diselenggarakan oleh regulator.
3. Disclosed Company information by fulfilling reporting obligations, both statutory and non-statutory, in the form of press releases and on websites. In 2016, 3 (three) press releases were issued, including on 30 September, 2016, 21 October, 2016, and 30 November, 2016.
  4. Convened two Annual GMSs, on 30 September 2016, and 21 October, 2016.
  5. Coordinated the annual public expose on 30 November 2016.
  6. Participated in 14 (fourteen) training programs/workshops/sensitization events held by OJK, Indonesia Stock Exchange, Bank Indonesia and Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA).
  7. Participated in sensitization events and workshops on the issuance and enforcement of new regulations/provisions held by regulators.

### Keterbukaan Informasi

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, Perusahaan melalui Divisi Corporate Secretary dan Corporate Investor Relations senantiasa berkomitmen untuk menerapkan kebijakan terkait komunikasi perusahaan, yakni Pedoman Pengungkapan Informasi PT Bakrieland Development Tbk, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 124/SK/DIR-BLD/VII/08 dan Kebijakan Komunikasi dengan Para Pemegang Saham Perusahaan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No. 125/SK/DIR-BLD/VII/08. Sesuai dengan kebijakan tersebut, Perusahaan senantiasa berinisiatif untuk mengungkapkan hal-hal yang telah disyaratkan oleh peraturan perundangan berlaku serta hal-hal yang material dalam pengambilan keputusan oleh seluruh pemangku kepentingan.

### Akses Informasi Publik

Perusahaan senantiasa memberikan kesempatan kepada masyarakat umum dan investor untuk memperoleh informasi mengenai Bakrieland, melalui beragam sumber informasi berbasis elektronik sebagai wujud nilai transparansi yang merupakan bagian dari penerapan tata kelola terintegrasi. Kegiatan publikasi Perusahaan dapat diakses melalui situs [www.bakrieland.com](http://www.bakrieland.com) yang memuat informasi terkini seperti kemajuan proyek, pergerakan harga saham, aksi korporasi, dan informasi penting lainnya. Secara keseluruhan, isi website Perusahaan telah mengikuti ketentuan POJK No.8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik. Bakrieland juga memberikan informasi terkini kepada pihak-pihak yang berkepentingan melalui surat elektronik (*email*).

### Disclosure of Information

Pursuant to Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies, the Company, through its Corporate Secretary and the Corporate Investor Relations Division, remains committed to implementing policies related to corporate communication, namely the Guidelines for Disclosure of Information of PT Bakrieland Development Tbk, established through the Directive of Board of Directors No. 124/SK/DIR-BLD/VII/08 and the Policy on Communication with Company Shareholders, established through the Directive of Board of Directors No. 125/SK/DIR-BLD/VII/08. In accordance with these policies, the Company proactively discloses information on matters required by legislation, as well as material information for the decision-making purposes of all stakeholders.

### Access to Public Information

The Company provides members of the public and investors with information about Bakrieland through a wide range of electronic-based sources to demonstrate its commitment to applying the principle of transparency (a part of the Company's comprehensive implementation of good corporate governance). Information released by the Company can be accessed on its official website at [www.bakrieland.com](http://www.bakrieland.com), which contains up-to-date information on project progress, share price movements, corporate actions, among others. In general, contents of the Company website has complied with the POJK No.8/POJK.04/2015 regarding Website of Companies or Public Companies. Bakrieland also provides up-to-date information to relevant parties through electronic mail.



Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Perusahaan, masyarakat umum dan investor dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Bakrieland di:

Tel : (62-21) 5257835

Fax. : (62-21) 5225063

Email : corporate.info@bakrieland.com.

Corporate Secretary Perusahaan juga senantiasa melakukan pelaporan informasi dan fakta material melalui surat kepada OJK dan *electronic reporting* kepada Bursa Efek Indonesia.

### Rencana 2017

Pada 2017, Sekretaris Perusahaan akan semakin meningkatkan kepatuhan atas semua peraturan yang berlaku di bidang pasar modal dan lebih aktif mengikuti berbagai kegiatan sosialisasi, *workshop*, dan pelatihan terkait peraturan-peraturan baru Pasar Modal yang diselenggarakan oleh regulator dan lembaga penunjang di bidang pasar modal.

### Investor Relations

Investor Relations (IR) merupakan organ tata kelola yang secara strategis mengintegrasikan hubungan kerja antar organ tata kelola lainnya. Dalam aktivitas operasionalnya, IR berperan dalam memfasilitasi alur komunikasi dengan pemegang saham serta analis dan investor yang terkait dengan Perusahaan agar terjadi hubungan timbal balik yang efektif.

Penyampaian informasi dilakukan melalui pertemuan dengan investor seperti investor forum, *road show*, kegiatan *public relations*, serta mewakili Direksi pada setiap kegiatan yang berkaitan dengan komunikasi eksternal, khususnya dengan investor. Selain itu, Perusahaan mengungkapkan informasi yang relevan dan material melalui surat (*email*) yang langsung disampaikan kepada pihak regulator terkait, maupun melalui situs resmi perusahaan ([www.bakrieland.com](http://www.bakrieland.com)).

### Perkara Penting yang Sedang Dihadapi

Pada 2016, tidak terdapat perkara penting yang dihadapi Perusahaan.

For further information about the Company, members of the public and investors can contact Bakrieland's Corporate Secretary at:

Phone : (62-21) 5257835

Fax. : (62-21) 5225063

Email : corporate.info@bakrieland.com.

The Company's Corporate Secretary also regularly conveys material information and facts through written correspondence with OJK, and engages in electronic reporting with the Indonesia Stock Exchange.

### Plans in 2017

In 2017, the Corporate Secretary aims to further strengthen compliance with all applicable capital market regulations, and more actively participate in various sensitization events, workshops and training programs related to new capital market regulations held by OJK, Indonesia Stock Exchange, and supporting agencies in the capital market.

### Investor Relations

Investor Relations (IR) is a strategic corporate governance organ integrated with the workflow of other governance organs. In its operational activities, IR helps facilitate the flow of communication about the Company with shareholders, analysts and investors to foster effective reciprocal relationships.

Information is shared during meetings with investors, such as investor forums, road shows and public relations activities; and by representing the Board of Directors in activities related to external communication, particularly with investors. Furthermore, the Company discloses relevant material information through correspondence (email) with relevant regulators, and through the Company's official website ([www.bakrieland.com](http://www.bakrieland.com)).

### Legal Cases

There is no legal case issue being settled by the Company in 2016.

## Informasi Ada/Tidaknya Penerimaan Sanksi Administrasi dan Finansial

Pada 2016, Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang dibebankan oleh regulator dan pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang dilakukan oleh Perseroan.

## Inisiasi Anti Gratifikasi

Dalam rangka mendukung penerapan inisiatif anti gratifikasi, Perseroan menerbitkan Pakta Integritas kepada pihak eksternal seperti pemasok. Hal tersebut diatur dalam Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa, yang disahkan melalui Surat Keputusan Direksi PT Bakrieland Development No. 021/DIR-Perseroan/SK/VIII/11, yang mensyaratkan kelengkapan Pakta Integritas Eksternal untuk melengkapi dokumen kontrak/perjanjian dengan penyedia barang dan/atau jasa.

## Inisiasi Anti Korupsi

Perseroan berkomitmen untuk menjalankan praktik bisnisnya secara objektif, transparan dan profesional. Oleh karena itu, Perseroan dengan tegas menjalankan kegiatan usaha yang bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Perwujudan inisiatif anti korupsi berkaitan erat dengan komitmen Perseroan dalam menyusun Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System), di mana korupsi adalah hal yang tergolong pelanggaran dan diharapkan untuk dapat dilaporkan jika ditemukan.

## Rencana 2017

Di tahun 2017, Bakrieland akan tetap fokus untuk meningkatkan penerapan GCG di Perusahaan, Bakrieland juga akan terus melakukan penyempurnaan kebijakan dan praktik-praktik GCG melalui internalisasi GCG kepada seluruh pemangku kepentingan, mendayagunakan komite-komite yang ada, dan menyempurnakan sistem dan implementasi manajemen risiko. Kelengkapan dalam pengungkapan GCG pada laporan tahunan juga menjadi salah satu prioritas Bakrieland demi memelihara keterbukaan kepada para pemangku kepentingan.

## Information on Administrative and Financial Sanctions

In 2016, the Company has dutifully fulfilled all obligations imposed by regulators and the government as part of its accountability on Company performance.

## Anti-Gratification Initiative

To support the effective implementation of the anti-gratification initiative, the Company has issued an Integrity Pact to external parties, including suppliers. This is governed in the Policy on the Procurement of Goods and/or Services ratified through PT Bakrieland Development Board of Directors Directive No. 021/DIR-Perseroan/SK/VIII/11 which stipulates on the requirement of an External Integrity Pact to complete contractual documents/agreements with the providers of goods and/or services.

## Anti-Corruption Initiative

The Company is committed to ensure that its business practices are carried out in an objective, transparent and professional manner. The Company therefore remains resolute in running a business that is free from corruption, collusion and nepotism. This unfaltering support to the anti-corruption initiative is inextricably linked to the Company's commitment to develop Guidelines for a Whistleblowing System in which corruption is considered a violation that should be reported if such practices are detected.

## Plans in 2017

In 2017, Bakrieland will continue to focus on improving the implementation of GCG within the Company, while refining its GCG policies and practices by conveying information about GCG to all stakeholders, effectively utilizing existing committees, and improving risk management systems and their implementation. Bakrieland ensures that its GCG initiatives are disclosed in the Company's annual reports in order to maintain the culture of transparency with stakeholders.

## Sistem Pelaporan Pelanggaran

Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) merupakan salah satu metode Perusahaan dalam meningkatkan kinerja praktik GCG yang transparan dan akuntabel dan telah dijalankan sejak 2009. Melalui SPP, Perusahaan membuka akses bagi seluruh karyawan di semua level jabatan untuk melaporkan hal-hal yang tidak mematuhi peraturan dan kebijakan Perusahaan serta berpotensi memberikan dampak negatif bagi jalannya Perusahaan. Pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui SPP terkait dengan penyimpangan etika bisnis, etika kerja, kebijakan Perusahaan, peraturan perundangan yang berlaku, anggaran dasar Perusahaan, perjanjian kontrak Perusahaan dengan pihak luar, rahasia Perusahaan, atau perbuatan lainnya yang dapat merugikan Perusahaan dalam hal material dan imaterial.

### Mekanisme SPP

Pelapor menyampaikan laporan dalam bentuk surat disertai dengan dokumen pendukung yang diperlukan kepada Tim Khusus Pelaporan Pelanggaran (TKPP) yang terdiri dari Internal Audit Division Head, Corporate Legal Division Head, Chief CHC, dan Corporate Secretary, melalui salah satu cara berikut:

1. Surat ke TKPP di Wisma Bakrie 1, Lantai 6
2. Email: [whistleblowing@bakrieland.com](mailto:whistleblowing@bakrieland.com)
3. PO BO BAKRIELAND JKTM 12700

Jika dokumen pelaporan telah lengkap, TKPP akan melaporkan kasus terkait kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Pada saat yang bersamaan, TKPP melakukan investigasi terhadap pihak terlapor. Laporan yang tidak terbukti akan keabsahannya akan dikembalikan kepada pelapor. Bila pelaporan terbukti, maka TKPP akan melaporkan hasil temuan kepada Komite Audit untuk ditindaklanjuti kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Laporan yang berkaitan dengan TKPP disampaikan dalam bentuk surat dan ditujukan kepada Direktur Utama, sedangkan laporan-laporan yang berkaitan dengan Direktur Utama ditujukan kepada Komisaris Utama.

## Whistleblowing System

The Whistleblowing System (SPP), which has been implemented since 2009, is one of the many methods used by the Company to improve the implementation of GCG, and remain transparent and accountable. Through the Whistleblowing System, the Company provides employees at every level with the opportunity to report any violations of the Company's regulations and policy, and matters that may adversely affect the Company. Offences that may be reported through the Whistleblowing System include any breach of business ethics, work ethics, Company policy, existing legislation, Company's Articles of Association, Company's contract or agreement with an external party, disclosure of confidential information or other misconduct that may be harmful to the Company, both materially and immaterially.

### SPP Mechanism

A whistleblower can file a written report, complete with the necessary supporting documents, with the Special Whistleblowing Team (TKPP) consist of Internal Audit Division Head, Corporate Legal Division Head, Chief of CHC, and Corporate Secretary, through the following channels:

1. Letter to TKPP at Wisma Bakrie 1, 6th Floor
2. Email: [whistleblowing@bakrieland.com](mailto:whistleblowing@bakrieland.com)
3. PO BO BAKRIELAND JKTM 12700

If the required documents are complete, TKPP will report the case to the Board of Directors and the Board of Commissioners through the Audit Committee. At the same time, TKPP will launch an investigation of the alleged offence. If the report of wrongdoing cannot be verified, the complaint documents will be returned to the person who filed the report. If, however, the complaint is verified, TKPP will report the findings to the Audit Committee for a follow up by the Board of Commissioners and the Board of Directors. Any report relating to TKPP must be made in writing and addressed to the President Director, while a report relating to the President Director is to be addressed to the President Commissioner.

### Sistem Perlindungan Pelapor

Mekanisme SPP mengutamakan anonimitas identitas pelapor sehingga pelapor mendapatkan jaminan keamanan. Selain menyediakan fasilitas saluran pelaporan yang independen, bebas dan rahasia, Perusahaan turut menjamin kerahasiaan identitas pelapor hanya jika pelapor terbukti memberikan pelaporan yang benar dan absah. Pelapor yang memberikan laporan palsu dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku, misalnya KUHP pasal 310 dan 311 atau peraturan internal Perusahaan.

### Insentif bagi Pelapor

Pelaksanaan SPP berupaya untuk mendorong partisipasi aktif karyawan dalam menjaga nilai dan budaya Perusahaan. Nilai dan budaya Perusahaan akan tercermin dengan baik ketika seluruh karyawan bersama-sama menjaga dan mempertahankan citra yang baik. Sebagai bentuk penghargaan terhadap pelapor, Perusahaan memberikan insentif berupa penghargaan dalam bentuk material atau piagam, dengan perhitungan sebesar dua per seribu (dua permil) dari kerugian Perusahaan yang berhasil dikembalikan.

### Implementasi SPP 2016

Selama 2016, TKPP tidak menerima laporan atas penyimpangan apapun di Bakrieland maupun Anak Perusahaan.

### Rencana SPP 2017

Bakrieland berkomitmen untuk mensosialisasikan kembali kebijakan sistem pelaporan pelanggaran ini kepada seluruh pemangku kepentingan internal Perusahaan.

### Whistleblowing Protection System

The whistleblowing mechanism prioritizes the anonymity of the whistleblower to ensure their safety. Apart from providing independent, free and confidential channels to report any violations, the Company also guarantees that the whistleblower's identity will remain confidential provided that the whistleblower has given a truthful and valid account of an alleged violation. Whistleblowers who file a false report are liable to sanctions as set out in the applicable laws and regulations, such as Articles 310 and 311 of the Penal Code or the Company's internal regulations.

### Incentives for Whistleblowers

The whistleblowing system is expected to encourage the active participation of employees in upholding the Company's corporate values and culture. The Company believes that its corporate values and culture can be upheld if all employees collectively contribute to maintaining the Company's positive image and reputation. To show its appreciation to whistleblowers, the Company provides incentives, such as plaques or material incentives, should two out of a thousand of the Company's losses can be reclaimed.

### SPP Implementation in 2016

In 2016, TKPP did not receive any reports of violations pertaining to Bakrieland or its Subsidiaries.

### SPP Plan in 2017

Bakrieland will maintain its commitment to disseminate information about the whistleblowing system to all internal Company stakeholders.

**PILAR MENERAPKAN PRAKTIK USAHA TERBAIK & KEPATUHAN  
PILLAR ADOPTING BEST PRACTICE & COMPLIANCE**



## Memantapkan Bisnis Melalui Kepatuhan & Penerapan Praktik Usaha Terbaik

Strengthening Business Through Compliance & Best Practices

Bakrieland menyadari bahwa bisnis tidak dapat bertumbuh secara berkesinambungan jika tidak dapat mengikuti praktik usaha terbaik dan patuh dengan berbagai regulasi yang ada. Berdasarkan hal inilah Bakrieland terus membaharui berbagai kebijakan dan sistem kerja hingga melakukan upaya menginternalisasinya kepada berbagai karyawan melalui pelatihan. Berikut beberapa upaya Bakrieland selama tahun 2016:

### Pelatihan “Corporate Sustainability for Marketing”

Bakrieland akan terus berkomitmen untuk menerapkan keberlanjutan (*sustainability*) di berbagai fungsi kerja Bakrieland dan Anak Perusahaan. Di tahun 2016, kali ini fungsi pemasaran *marketing* mendapatkan kesempatan untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana menerapkan keberlanjutan di fungsi kerjanya. Bakrieland bekerjasama dengan Universitas Bakrie mengadakan pelatihan yang bertajuk “Corporate Sustainability for Marketing.” Perencanaan pelatihan dipimpin oleh Dr Didit Herawan, dosen Universitas Bakrie yang sudah lama menggeluti bidang *Strategic Management, Corporate Social Responsibility (CSR)* dan Inovasi.

Dr Didit Herawan dalam sesinya membagikan pengetahuan tentang telah terjadinya pergeseran pada perusahaan-perusahaan dunia, termasuk Indonesia, mengenai bagaimana perusahaan berbisnis dengan merespon secara komprehensif pada isu-isu yang terkait dengan masalah dunia seperti lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat lokal atau dikenal dengan pendekatan 3P yaitu “*People, Planet and Profit*”.

Pelatihan didukung juga oleh Bapak Dwi Prasetyo, General Manager Hotel Grand ELTY Krakatoa (GEK) Kalianda, salah satu Anak Perusahaan Bakrieland yang sudah berhasil menerapkan pendekatan “*People, Planet and Profit*” di properti Bakrieland yang berada di Lampung tersebut. Peran beliau dalam *workshop* ini adalah sebagai narasumber di mana beliau menjelaskan bagaimana ia menyelesaikan berbagai

Bakrieland recognizes that its business will not grow sustainably without implementing good business practices and ensuring compliance with existing laws and regulations. In view of this, Bakrieland continued to refine its policies and systems and internalize them across the Company to all employees through training. In 2016, Bakrieland had undertaken the following measures:

### Training on “Corporate Sustainability for Marketing”

Bakrieland shall remain committed in promoting sustainability in various work functions within Bakrieland and Subsidiaries. In 2016, the marketing function was given the opportunity to broaden its knowledge on ensuring sustainability in carrying out its work. Bakrieland has collaborated with Bakrie University to hold training on “Corporate Sustainability for Marketing.” The planning and designing of the training was led by Dr Didit Herawan, a lecturer at Bakrie University who has extensive experience in Strategic Management, Corporate Social Responsibility (CSR) and Innovation.

On his training session, Dr Didit Herawan shared knowledge on the current shift among companies worldwide, including in Indonesia, on how they do business by comprehensively responding to issues relating to global concerns such as the environment and local community empowerment or known as the 3P approach of “*People, Planet and Profit*”.

The training program has also gained the support of Mr. Dwi Prasetyo, General Manager of Grand ELTY Krakatoa Hotel (GEK) Kalianda, a Subsidiary that has succeeded in applying the “*People, Planet and Profit*” approach in Bakrieland’s property in Lampung. In the workshop, he acted as resource person and spoke on ways to resolve environmental issues faced by the Bakrieland property, managing and integrating

masalah alam yang terjadi disekitar lingkungan properti, mengelolanya dan mengintegrasikan dengan bisnis sehingga menambah *revenue* bagi perusahaan. Dengan konsep ini, di tahun 2015, GEK bahkan mampu meraih penghargaan Kalpataru Kategori Perintis dari Pemerintahan Provinsi Lampung atas usahanya menyelesaikan masalah abrasi pantai Kalianda yang pada waktu itu diselesaikan dengan cara menggalakkan penanaman *mangrove*.

Selain itu, 14 peserta yang terdiri dari fungsi *marketing* dan CSR, juga diajak untuk berlatih bagaimana merancang program “*People, Planet and Profit*” yang sesuai dengan kondisi properti masing-masing dan mempresentasikannya.

### Responsif Terhadap Perkembangan Dunia Digital

Dunia digital di Indonesia dalam beberapa tahun ini sedang menuju pertumbuhan yang luar biasa. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada akhir tahun 2016, diperkirakan pengguna internet di Indonesia mencapai 132,7 juta jiwa atau lebih dari 50% populasi penduduk Indonesia yang sebanyak 256,2 juta. Lompatan pengguna internet ini sangat tinggi mengingat pada tahun 2013 saja, pengguna internet baru sebanyak 74,6 juta. Artinya, dalam 3 tahun Indonesia bertambah 58 juta pengguna internet. Dengan besarnya pengguna internet, hal ini ikut menumbuhkan nilai transaksi industri electronic commerce (e-commerce). Di tahun 2016, transaksi e-commerce di Indonesia ditaksir mencapai Rp394 Triliun. Tentu inilah yang menjadi dasar Anak Perusahaan Bakrieland untuk memperkuat bisnis dengan memanfaatkan dunia digital untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dan sebagai alternatif *sales channel*.

Pada produk properti, digital dimanfaatkan untuk melayani pelanggan dan mendistribusikan informasi properti dengan mempergunakan *social media* yang sudah ada dengan mempertimbangkan jumlah pengguna *social media* tersebut. Sedangkan pada produk hotel dan *theme park*, selain mempergunakan *sales channel* digital yang sudah mapan, sudah mulai dibuat *sales channel* tersendiri yang diharapkan kedepannya meningkatkan *revenue*.

Total *revenue* yang didapatkan Bakrieland dan Anak Perusahaan dengan memanfaatkan dunia digital pada tahun 2015 adalah sebesar Rp9,057,509,501. Setahun kemudian, total *revenue* meningkat 10% atau mencapai Rp10.025.030.033.

them into the business which will consequently push corporate revenues upwards. Through this concept, GEK in 2015 has managed to earn the Kalpataru environmental award for the Pioneering Category, from the Lampung provincial government, for its efforts in dealing with the abrasion of the Kalianda Beach through encouraging mangrove planting.

Furthermore, 14 participants that consist of the marketing and CSR functions were also invited to follow training on how best to design the “*People, Planet and Profit*” program according to the situation facing their respective properties and to present the plan.

### Responsive to Developments in the Digital World

In recent years, the digital world in Indonesia has experienced exponential levels of growth. Based on data released by the Ministry of Communication and Informatics (Kemenkominfo), by late 2016 internet users in Indonesia were estimated to reach 132.7 million people or over 50% of the country’s population of 256.2 million people. This is indeed a sharp rise in the number of internet users as it was only 74.6 million people in 2013. This meant that within 3 years, Indonesia’s internet users had increased by 58 million people. This substantial number of internet users translated into further growth in transaction value of the electronic commerce (e-commerce) industry. In 2016, e-commerce transactions in Indonesia amounted to Rp394 trillion. This served as the basis on which Bakrieland Subsidiaries seek to strengthen businesses by making the most of the digital world with a view to improve customer services and as an alternative sales channel.

For product properties, digital technology was applied for delivering services to customers and disseminating property-related information by using available social media platforms with consideration over the number of users of the respective social networking site. Meanwhile, its hotels and theme parks not only made use of established digital sales channels but have also begun to create their own sales channels with the hope of increasing revenue.

Total revenues generated by Bakrieland and Subsidiaries by capitalizing on the digital world in 2015 reached Rp9,057,509,501. In the following year, total revenue increased 10% or Rp10,025,030,033.